

SIKAP MUHAMMADIYAH TERHADAP FORMAT GERAKAN EKONOMI ISLAM



Oleh

Mujahid Quraisy, SE
NPP. : 970020

Pembimbing :
Drs. Munrohim Misanam, MA.Ec, Ph.D

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister dalam
Ilmu Agama Islam
Yogyakarta 2002**



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Faxes. 523637

NOTA DINAS
No : 08/PS-MSI/ND/VI/2002

TESIS berjudul : SIKAP MUHAMMADIYAH TERHADAP FORMAT GERAKAN
EKONOMI ISLAM

Ditulis oleh : Mujahid Quraisy, SE

NIM : 970020

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23 Juni 2002

Ketua Program,

Drs. H. Amir Mu'allim, MIS





**Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

PERSETUJUAN

Tesis berjudul : **Sikap Muhammadiyah Terhadap Format Gerakan Ekonomi Islam**
yang ditulis oleh : **Mujahid Quraisy, SE.** Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim
Penguji Tesis Magister Studi Islam.

Yogyakarta, _____

Pembimbing.

Drs. Munrohim Misanam, MA.Ec, Ph.D



Universitas Islam Indonesia
Magister Studi Islam (S-2)
Jl. Demangan Baru No. 24 Lt.II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : : Mujahid Quraisy, SE

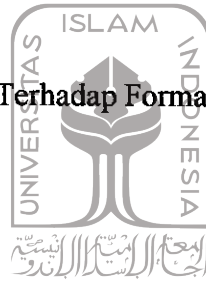
Tempat Tgl Lahir : Sengkang, 29 Mei 1967

Nomor Peserta : 970020

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : Sikap Muhammadiyah Terhadap Format Gerakan Ekonom Islam

Ketua : Drs. Yusdani, M.Ag



Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Drs. Munrokhim M., MA.Ec., Ph.D

Penguji I : Drs.H. Edy Suandi Hamid, M.Ec

Penguji II : Drs. H. Amir Mu'allim, MIS.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 2002
Pukul 07.30 – 08.30

Hasil/Nilai : A/85,5

Predikat : Dengan Pujian



Universitas Islam Indonesia
Magister Studi Islam (S-2)
Jl. Demangan Baru No. 24 Lt.II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Tesis berjudul : Sikap Muhammadiyah Terhadap Format Gerakan Ekonom Islam

Ditulis Oleh : Mujahid Quraisy, SE

NIM : 970020

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam



Yogyakarta, Oktober 2002

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Ketua Program
Magister Studi Islam



[Handwritten Signature]
Drs.H. Amir Mu'allim, MIS

The Attitude of Muhammadiyah
Toward Islamic Economic Movement
By : Mujahid Quraisy

Islamic economics movement represents Islamic movement to apply the principles of syari'ah in an economic system, to demand for economic justice, to empower people economy, to establish the institutions supporting it. Syari'ah bank, takafful insurance, baitul Mal wat Tamwil, Islamic education and training (syari'ah) are the manifestations of the movement. It is not originated from big Islamic mass organisation in Indonesia, but from intellectual discourse and the Islamic activists in 1980s and found its momentum when Moslem is politically and economically supported by the ruling government. The momentum is marked with the emergence of Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) and bank Muamalat Indonesia BMI in 1990s. The development of the islamic economic movement takes place in various circles of Moslem.

Muhammadiyah as social and religious organisation has of course the attitude and the strategy concerning to the issues of its people and its religion. Muhammadiyah and the advancement of its religion and the prosperity of people. The relationship is interesting to study, especially that related to the resurgence of the present Islamic economic and Muhammadiyah's view on economy. The problem necessary to answer are: 1. What is the attitude of Muhammadiyah toward Islamic economic movement ?; 2. What is the difference in the organisational commitment, public commitment and the attitude toward the form of Islamic economic movement among the leaders of Muhammadiyah in light of their regions ?; 3. Why has Muhammadiyah as a social organisation of very vast net work not put its priority on the strategic efforts in economy, especially in improving people economy. To answer the first and the second problems, a research has been conducted with 30 leaders of Muhamadiyah considered to be representative using a questionnaire. The second problem is statically examined using independent sampel t-test. The third problem is analyzed socio-historically according to the existing references. An interview of some personels of PP Muhammadiyah is conducted to complete the study.

It is found that essentially Muhammadiyah agreed the form of the islamic economic movement. The agreeing attitude reflects in its view and belief of tarjih Muhammadiyah committee. Because of the adherence to the majelis tarjih committee and the organisation commitment of the members of Muhammadiyah, it is indicative of strong enthusiasm. The statistic test proves the aforementioned result that the organisational commitment and attitude toward the form of Islamic economic movement does not show any significant difference. There is no significant difference in the public commitment. It indicates that there is individual freedom in choosing the way to solve the public problem. Muhammadiyah Jakarta is more enthusiastic in objective-empirically considering the fact as compared to Muhammadiyah Yogyakarta. Related to the network and syari'ah economic system building, Muhammadiyah puts more emphasis on the personality and character building than on the Islamic economic and system. The main reason for it is that the material participation of Muhammadiyah is to do good deed pertaining to the matters of the social-hereafter (amal jariyah).

KATA PENGANTAR

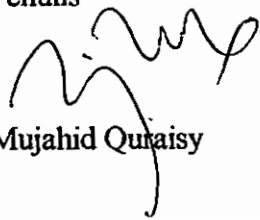
Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Tuhan maha pengasih dan penyayang, yang menciptakan dan memiliki segala-Nya. Atas ijin-Nya jualah karya tulis ini dapat diselesaikan.

Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih khususnya pada lembaga tempat penulis mengabdikan yakni *Islamic Business School* Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Yogyakarta yang memungkinkan penulis dapat menempuh pendidikan strata dua (S2) di Magister Studi Islam (MSI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Kepada Bapak Munrochim Misanam, SE, MA, Ph.D selaku pembimbing yang banyak membantu penulis memahami konsep dan metodologi ilmiah. Demikian juga tokoh-tokoh Muhammadiyah yang bersedia kerjasama memberikan data dan wawancara serta pengisian angket.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Isteri tercinta Sumarni yang memberi dorongan moril, seluruh kawan-kawan di STIS Jogjakarta dan segenap tim manajemen MSI UII Jogjakarta yang memberi dukungan dalam berbagai bentuk. Semoga Allah Swt. memberi balasan yang setimpal. Amien

Jogyakarta, 29 Mei 2002

Penulis


Mujahid Quraisy

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor. 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	Ṭsa'	ṣ	s dengan titik di atas
ج	Jim	j	-
ح	Ḥa'	h	h dengan titik di bawah
خ	Kha'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Ḍal	ḏ	z dengan titik di atas
ر	Ra'	r	-
ز	Za	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Ṣad	ṣ	s dengan titik di bawah
ض	Ḍad	ḏ	d dengan titik dibawah
ط	Ṭa'	ṭ	t dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	ẓ	z dengan titik di bawah

ع	Ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	g	-
ف	Fa	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
هـ	Ha’	h	-
ء	Hamzah	’	apostrof (di awal kalimat)
ي	Ya’	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متَعَدُّونَ ditulis *muta‘aqqidun*

عِدَّة ditulis *‘iddah*

III. *Ta’ Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

حِكْمَةٌ ditulis *hikmah*

جَنْزِيَةٌ ditulis *ji-yah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ ditulis a'antum

أَعَدَّتْ ditulis u'iddat

لَنْ شَكَرْتُمْ ditulis la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al-*

الْقُرْآنُ ditulis al-Qur'an

الْقِيَاسُ ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el)-nya.

السَّمَاءُ ditulis as-sama'

الشَّمْسُ ditulis asy-syams

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *zawil furud* atau *zawi al-furud*

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

كرامة الأولياء . ditulis *karamatul auliya'*
زكاة الفطر ditulis *zakatul fitr*

IV. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis *a*
_____ (kasrah) ditulis *i*
_____ (dammah) ditulis *u*

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif

جاهلية

ditulis *LAM a*
ditulis *Jahiliyyah*

2. fathah + ya' mati

تنسى

ditulis *a*
ditulis *tansa*

3. kasrah + ya' mati

كريم

ditulis *i*
ditulis *karim*

4. dammah + wawu mati

فروض

ditulis *u*
ditulis *furud*

VI. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati

بينكم

ditulis *ai*
ditulis *bainakum*

2. fathah + wawu mati

قول

ditulis *au*
ditulis *qaul*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
TIM PENGUJI.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Definisi Istilah dan Batasan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II DINAMIKA GERAKAN ISLAM DALAM REALITAS	
 SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL.....	18
A. Pendahuluan.....	18
B. Islam dalam Lintas Sejarah.....	19
C. Gerakan Islam menuju Modernisasi dan Islamisasi.....	24
D. Strategi Gerakan Islam Nasional.....	28

E. Islam Transformatif dalam Dinamika Politik dan Ekonomi Nasional.....	32
F. Tipologi Gerakan Ekonomi Islam.....	36
G. Muhammadiyah dan Perubahan Sosial.....	38
BAB III ACUAN TEORI.....	45
BAB IV SIKAP MUHAMMADIYAH TERHADAP FORMAT GERAKAN EKONOMI ISLAM	51
A. Gambaran Umum	51
A.1.1. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah.....	51
A.1.2. Visi dan Misi Muhammadiyah.....	55
A.1.3. Jaringan Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah.....	61
A.1.4. Struktur Organisasi PP Muhammadiyah 2000-2005.....	64
A.1.5. Program Kerja Muhammadiyah 2000-2005.....	66
A.1.6. Konsep Gerakan Pengembangan Ekonomi Muhammadiyah.....	84
A.1.7. Keputusan Majelis Tarjih terhadap Realitas Ekonomi (Bank) Konvensional.....	90
A.2.1. Sejarah dan Perkembangan Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia.....	96
A.2.2. Prinsip-Prinsip Syari'ah Ekonomi Islam.....	98
A.2.4. Perkembangan Bank Syari'ah.....	107
A.2.5. Perkembangan BMT.....	112
A.2.6. Perkembangan Asuransi Takafful.....	115
A.2.7. Perkembangan Pendidikan Ekonomi Islam	117
A.2.8. Perkembangan Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer ..	119
B. Muhammadiyah dan Gerakan Ekonomi Islam.....	125
C. Uji Perbedaan Komitmen & Sikap Anggota Muhammadiyah	128
1. Asumsi-Asumsi.....	129
2. Identifikasi dan Definisi Istilah Variabel Penelitian.....	130

3. Subjek Penelitian	131
4. Metode Pengumpulan Data.....	132
5. Metode Analisis data.....	133
D. Komitmen Organisasi, Komitmen Keumatan dan Sikap Muhammadiyah terhadap Format Gerakan Ekonomi Islam....	137
E. Generalisasi Sikap Muhammadiyah terhadap Format Gerakan Ekonomi Islam.....	142
BAB VI PENUTUP.....	146
A. Kesimpulan.....	148
B. Saran	148
C. Keterbatasan Penelitian.....	148

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.A.1.3	Jaringan Organisasi Muhammadiyah	61
Tabel 2.A.1.3	Organisasi Otonom Muhammadiyah	62
Tabel 3.A.1.3	Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Pendidikan	62
Tabel 5.A.1.3	Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Kesehatan	63
Tabel 6.A.1.3	Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Kesejahteraan sosial	63
Tabel 7.A.1.3	Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Ekonomi	63
Tabel.1.A.1.4	Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2000-2005	64
Tabel.2.A.1.3	Pengurus majelis/Lembaga Pembantu PP Muhammadiyah Periode 2000-2005	65
Tabel.1.A.1.6	Latar Belakang Persoalan Internal Muhammadiyah Membangun Ekonomi Persyarikatan	84
Tabel.2.A.1.6	Mamfaat KATAM bagi Organisasi & Anggota	88
Tabel.1.A.2.4	Jumlah Kantor Bank Umum Syari'ah (posisi per Januari 2001)	109
Tabel.2.A.2.4	Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah di Indonesia sampai tahun 2001	110
Tabel.1.A.2.5	Perkembangan Baitul mal wa Tanwil (BMT) di Indonesia sampai tahun 1999	113
Tabel.2.A.2.5	Kinerja Keseluruhan BMT Nasional dibawah PINBUK	114
Tabel.1.A.2.6	Kondisi Keuangan Asuransi Takafful 1997-2001	115
Tabel.1.A.2.7	Perkembangan Pendidikan Ekonomi Islam Tahun 2001	118
Tabel.1.C.	Uji Beda Statistik Sikap dan Komitmen Muhammadiyah menurut Wilayah	137
Tabel.B.1	Komitmen Organisasi Anggota Muhammadiyah	138
Tabel.B.2	Komitmen Keumatan Anggota Muhammadiyah	140
Tabel.B.3	Sikap Muhammadiyah Terhadap Format Gerakan Ekonomi Islam	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.A.1.6	Pemahaman Muhammadiyah terhadap Masalah–Masalah Ekonomi	85
Gambar 2.A.I.6	Potensi Muhammadiyah dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat	86



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagian Umat Islam berkeyakinan bahwa untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, baik dan benar diperlukan sebuah gerakan perubahan. Dalil al-Qur'an yang menunjang keyakinan tersebut adalah firman Allah yang artinya menyebutkan :

... Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum (masyarakat) sampai mereka mengubah (terlebih dahulu) apa yang ada pada diri mereka (sikap mental mereka).¹

menurut Shihab bahwa ayat ini berbicara tentang dua macam perubahan yakni perubahan yang di lakukan oleh Allah Swt, dan perubahan yang dilakukan oleh manusia. Perubahan yang dilakukan oleh Allah Swt bersifat pasti dan berlaku umum melalui proses sunnatullah. Sementara perubahan yang terjadi atas kehendak bebas manusia dapat bersipat individual dan kolektif. Artinya Untuk tujuan-tujuan perubahan kolektif manusia selain mampu menampilkan kepribadian dirinya juga memberi pengaruh objektif pada masyarakat untuk bergerak dan berubah menjadi lebih baik².

Dalam teori sosial – politik modern, perubahan dan gerakan Islam diyakini dan dilaksanakan melalui strategi struktural dan kultural. Strategi struktural

¹QS. Ar-Ra'd (13) : 11.

²Lihat M.Quraish Shihab, "Membumikan" Al-Qur'an", Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung, Mizan, 2000), hal.245-257

merupakan pendekatan melalui pintu politik-kekuasaan. Sementara strategi kultural adalah aktivitas langsung dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat sebagai sasaran misi atau dakwah. Fokus penulisan ini membahas mengenai Islam dalam wilayah gerakan kultural.

Gerakan Islam kultural menurut teori sosial politik Islam modern sosial merupakan ragam tipologi pemikiran sosial-politik cendekiawan Muslim Indonesia pada dekade 1980-an. Tipologi dan wacana pemikiran politik para pemikir transformatif bukanlah pada aspek-aspek doktrinal dari teologi Islam, tetapi pada pemecahan masalah-masalah empiris dalam bidang sosial-ekonomi, pengembangan masyarakat, penyadaran hak-hak politik masyarakat, orientasi keadilan sosial, dan sebagainya.³ Gerakan ekonomi Islam adalah bagian dari proses kulturasi-institusional ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh para pemikir Islam transformatif. Dapat dikatakan gerakan ekonomi Islam merupakan bentuk pemikiran transformatif yang dimotori antara lain oleh M. Dawam Rahardjo, Adi Sasono dan M. Amin Aziz. Berdasarkan analisis tersebut, maka pendekatan yang mereka lakukan tentunya berbeda dengan doktrin-doktrin “*mainstream* atau *ortodoks* Islam,” seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.⁴

³M.Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta : Paramadina,1995), hal. 162.

⁴Menurut Martin van Bruinessen, *mainstream ortodoks* adalah faham yang dianut mayoritas umat – atau lebih tepat, mayoritas ulama dan lebih tepat lagi, golongan ulama yang dominan. Istilah ini sebenarnya upaya Martin mendefinisikan gerakan sempalan yakni gerakan yang sengaja memisahkan diri dari *mainstream*. Lihat Martin van Bruinessen, “Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia : Latar Belakang Sosial Budaya” , *Ulumul Qur'an*, Vol.III No.I(1992), hal. 17

Gerakan ekonomi Islam ini dipelopori oleh intelektual Islam yang sebagian besar bermarkas di kampus. Misi dan visi mereka adalah menciptakan keadilan ekonomi, menerapkan prinsip-prinsip syari'ah (nonriba), dan pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat menengah-bawah. Dalam sejarah nasional, gerakan ekonomi Islam muncul sejak adanya upaya depolitisasi era rezim Orde Baru terhadap umat Islam. Kebijakan pembangunan nasional awal orde baru yang menempatkan pembangunan ekonomi sebagai fokus utama dengan mengandalkan hutang, investasi asing dan kaum sino-Indonesia di garda depan. Kebijakan politik Orde Baru tersebut menimbulkan dua jenis reaksi dari umat Islam. Reaksi pertama, pada tahun 1970-an menumbuhkan aktivitas Islam kultural dalam bentuk dakwah, kegiatan sosial, ekonomi dan keilmuan. Berkaitan dengan aktivitas tersebut di kampus-kampus tumbuh semangat kajian Islam yang melahirkan kader-kader muda Islam yang memiliki wawasan keagamaan mendalam dalam keahlian yang lebih beragam. Reaksi selanjutnya sekitar tahun 1980-an adalah kebangkitan kegiatan ekonomi umat Islam tatkala sosok ekonomi monopoli eksploitatif menguat dan mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Damanhuri menggambarkan gejala ini, sebagai mana dikutip oleh Baswir (1995) sebagai berikut :

Perusahaan-perusahaan konglomerasi kini tidak hanya cenderung menjadi model baku dalam memilih strategi pengelolaan perusahaan, tapi mereka juga hampir mendominasi seluruh cabang produksi yang ada. Sedemikian besarnya peranan mereka, maka 200 konglomerat terbesar diperkirakan telah menguasai 58% PDB Indonesia. Karena BUMN dan usaha-usaha menengah

masing-masing menyumbang sekitar 24% dan 10% terhadap PDB maka yang tersisa bagi usaha-usaha ekonomi rakyat tinggal sekitar 8%.⁵

Berdasarkan pemilahan tersebut di atas, umat Islam secara kultural selain memberikan reaksi atas depolitisasi juga sekaligus menghadapi dua tantangan dengan fokus yang berbeda pada tiap fase. Fase pertama, sampai akhir tahun 70-an, menghadapi tantangan ideologi keagamaan, dan fase kedua, sejak tahun 80-an, menghadapi tantangan realitas ekonomi dan berhadapan dengan kaum sino-Indonesia (nonpribumi) yang menguasai sekitar 75% modal swasta domestik.

Meskipun demikian ada beragam reaksi atas marginalisasi ekonomi, khususnya ekonomi umat Islam. Hefner,⁶ seorang antropolog yang banyak mencermati perkembangan sosial politik di Indonesia, membagi reaksi umat Islam dalam memperjuangkan ekonominya pada tiga kategori, yakni :

Pertama, nasional-statis, yang tujuan utamanya mengambil peran besar pada industri dan proyek strategis pemerintah. Prinsip pokok pemikirannya adalah revitalisasi Islam terletak di dalam kemajuan umat Islam di bidang pendidikan, teknologi ilmiah dan manajemen modern.

Kedua, gerakan ekonomi populis, yang menekankan pada kemandirian dan penegakan prinsip-prinsip syari'ah, sementara gerakan ekonomi diwujudkan dengan

⁵ Revisond Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Cet.I (Yogyakarta: kerjasama Pustaka Pelajar dan IDEA, 1997), hal. 56.

⁶ Robert W.Hefner, *Islam Pasar Keadilan; Artikulasi Lokal, Kapitalisme, dan Demokrasi* Cet.I (Yogyakarta, LKIS, 2000), hal.254.

perluasan bank Islam dengan bentuk lembaga keuangan lainnya, pengelolaan zakat beserta pendidikan dan pelatihan.

Ketiga, kerjasama, Bagi aliran ini, yang penting adalah semangat kejujuran dan keadilan. Kegiatan ekonomi tidak perlu diintervensi secara sistematis dan teoritis oleh agama. Nilai-nilai rasional dalam bisnis adalah prinsip utama dalam hubungan ekonomi dengan siapa saja.

Perbedaan-perbedaan pandangan tentang apa yang dimaksud ekonomi Islam sebenarnya juga terjadi pada tataran normatif-akademis. Menurut Rahardjo, pandangan umat Islam terhadap ekonomi Islam, dari segi istilah kemungkinan ditafsirkan dalam tiga pengertian. *Pertama*, ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam. *Kedua*, adalah sistem ekonomi Islam, menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. *Ketiga*, sebagai perekonomian Islam, atau lebih tepatnya disebut "perekonomian dunia Islam."⁷

Meskipun ada perbedaan dalam sikap dan pemikiran ekonomi Islam, banyak yang memandang bahwa momentum gerakan ekonomi Islam yang memilih ekonomi populis dan penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam berekonomi sebagai basis perjuangan (selanjutnya disebut Gerakan Ekonomi Islam), lahir ketika terjadi hubungan politik yang baik antara Islam dan "Pemerintah". Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) merupakan simbol keharmonisan politik Islam dan

⁷ M.Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Cet.I (Jakarta, Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF),1999), hal. 3-4

Pemerintah. Hadirnya Bank Muamalat pada tahun 1990 adalah simbol dukungan politik terhadap gerakan ekonomi Islam.⁸

Dalam perspektif ekonomi nasional, peluang gerakan ekonomi Islam ini lahir dari dampak negatif kebijakan ekonomi pembangunan. Krisis ekonomi Indonesia yang dimulai sejak tahun 1982 pasca *booming* minyak atau akibat turunnya harga minyak tahun 1982-1983, mengakibatkan Indonesia mengalami kesulitan membiayai pembangunan nasional dan membayar hutang luar negeri.⁹

Ketergantungan ekonomi Indonesia pada sektor migas menunjukkan bahwa sesungguhnya fondasi ekonomi bangsa sangat rapuh dan tingkat partisipasi masyarakat serta produktivitas sangat rendah. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Deregulasi pertama di bidang keuangan pada bulan Juni 1983 yang merupakan tonggak kesadaran pemerintah untuk memberi peluang swasta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Sektor non migas atau sektor riil menjadi sasaran utama paket-paket deregulasi

Inti kebijakan deregulasi di bidang keuangan adalah memberi kemudahan mendirikan bank swasta dengan syarat-syarat yang ringan. Situasi ini merupakan titik masuk umat Islam untuk melakukan institusionalisasi prinsip-prinsip syari'ah dengan model ekonomi (keuangan) bagi hasil. Sesungguhnya cikal bakal ekonomi

⁸ *Ibid*, hal. 263

⁹ Anwar Nasution, *Tinjauan Ekonomi Atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1988 pada Sistem Keuangan Indonesia*, Cet.I (Jakarta, Gramedia, 1990), hal. 3

Islam telah nampak dengan munculnya Baitul Tamwil Teknosa, yang diprakarsai oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB),¹⁰ Institusi Zakat yang dikelola secara produktif oleh Jama'ah Raden Fatah Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, dalam lembaga zakat Indonesia (LZI) menjadi awal aktualisasi cita-cita Islam mengembangkan prinsip-prinsip syari'ah sekaligus mengatasi kelemahan ekonomi rakyat.

Gerakan ekonomi Islam semakin kuat pengaruhnya sejak pemerintah mengeluarkan undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang bank bagi hasil. Krisis moneter tahun 1997 dan eksistensi bank syari'ah yang hampir tidak mengalami dampak krisis tersebut semakin memperkuat keyakinan pemerintah untuk lebih serius mengembangkan konsep ekonomi syari'ah. Terbukti sejak krisis ekonomi tahun 1997 pemerintah telah mengeluarkan UU No. 10 tahun 1998 dan UU No.23 tahun 1999 untuk penyempurnaan dan program pengembangan bank syari'ah.

Sampai tahun 2001, selain Bank Muamalat Indonesia (BMI), telah ada dua bank milik pemerintah yang beroperasi dengan konsep Syari'ah yakni BNI'46 dan Bank Mandiri, dua bank swasta lainnya masing-masing Bank IFI dan Bank Jabar, Asuransi Takafful Syari'ah, 80 BPRS dan 2808 BMT.¹¹ Kemudian di bidang pendidikan terdapat 12 perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia (SDM), peningkatan mutu

¹⁰ Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*, Cet.I (Yogyakarta, UII Press, 2001), hal. 4

¹¹ *Ibid*, hal..v

manajemen dan pengembangan teori-teori ekonomi Islam. Aktivitas-aktivitas ini tentunya tidak semua secara langsung menunjukkan sebuah gerakan ekonomi Islam sejati.

Gerakan ekonomi Islam di Indonesia ini, tidak nampak secara tegas mendapat dukungan kuat organisasi-organisasi massa Islam seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Al-Irsyad. Salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai lembaga Islam modernis berdiri pada tahun 1912, dan berhasil menjadi sebuah organisasi besar Islam. Menurut Peacock¹² (1986), keberhasilan Muhammadiyah menjadi organisasi besar adalah karena komitmen dan prinsip organisasi menjauhi kegiatan politik dan mengutamakan penyebaran agama, kesejahteraan, dan pendidikan. Dengan komitmen seperti itu, organisasi Muhammadiyah berkembang pesat dan sekarang telah memiliki ribuan sekolah, rumah sakit dan panti asuhan.

Muhammadiyah sering diidentikkan dengan kelompok Islam kelas menengah, santri modern yang tinggal di wilayah perkotaan. Mayoritas dari mereka adalah aktif di dunia bisnis dan perdagangan. Kesuksesan Muhammadiyah dalam mengembangkan amal usahanya tidak lepas dari kelompok ini. Daya tarik Muhammadiyah bagi kelas menengah pada waktu itu adalah karena organisasi ini sangat menghargai pemikiran rasional, bahkan pemikiran-pemikiran dari barat sekalipun dan anti pada ajaran sinkritisme .

Akhir-akhir ini Muhammadiyah mendapatkan kritikan tajam. Bahwa meskipun Muhammadiyah berhasil membawa wacana pemikiran dan perubahan budaya, namun tidak menyentuh akar masalah sesungguhnya. Bahkan cenderung materialistik-kuantitatif dan tidak memiliki strategi sosial yang aktual. Muhammadiyah tidak memiliki akar sosial yang kuat¹³. Konsep-konsep sosial Muhammadiyah sangat normatif atau subjektif.¹⁴

Kritik-kritik di atas diungkapkan sendiri oleh tokoh-tokoh intelektual muda Muhammadiyah. Sesungguhnya secara personal Muhammadiyah melahirkan banyak pengagas Islam transformatif. Pada bidang ekonomi seperti yang disebutkan di atas, tersebut nama seperti Dawam Rahardjo, yang memimpin Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah, sekaligus sebagai Presiden *The International Institute of Islamic Thought (IIIT)* Indonesia. Dawam sering dianggap sebagai lokomotif Islam transformatif. Baru pada kepemimpinan Dawam, sejak Muktamar ke-44 di Jakarta tanggal 8-11 Juli tahun 2000 secara eksplisit Muhammadiyah menunjukkan perhatiannya pada bidang ekonomi secara serius dengan mendirikan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMN). Sebagaimana tertulis dalam konsep program Muhammadiyah periode 2000-2005 pada point 10 tentang Ekonomi dan

¹² Peacock, James L, *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia*, (Jakarta, Cipta Kreatif, 1986), hal. 93

¹³ Abdul Munir Mulkhan, *Menggugat Muhammadiyah*, Cet.I (Yogyakarta, Fajar Pustaka, 2000), hal. 147

¹⁴ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam; Intrepretasi untuk Aksi*, Cet. IX. (Bandung, Mizan, 1999), Hal. 265

Kewiraswastaan, jelas bahwa Muhammadiyah sedang melakukan transformasi kegiatan yang lebih mengakar. Selain membuat jaringan ekonomi, dalam wadah BUMM (Badan Usaha Milik Muhammadiyah) juga pengembangan ekonomi Islam, pemberdayaan usaha kecil dan pelatihan masyarakat.¹⁵

Tipologi warga Muhammadiyah yang sering digambarkan sebagai sosok independen, urban, modernis dan rasional tentunya dapat menjadi hambatan atau tantangan dalam menciptakan jaringan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi isu aktual dekade ini. Muhammadiyah memang lahir menjawab isu-isu Islam pada masa awal. Dalam perjalanan waktu, tentunya Muhammadiyah harus melakukan upaya-upaya transformasi dalam konteks lingkungan yang berbeda dari apa yang pernah dihadapi pendirinya. Dalam lingkungan generasi baru Islam terjadi pergolakan pemikiran dan secara pragmatis ingin memberi jawaban terhadap tatanan ekonomi Indonesia yang sedang rusak.

Gerakan ekonomi Islam merupakan sebuah fenomena baru di kalangan Islam tahun 1980-an. Studi pemikiran dan aktivitas ekonomi yang berbentuk lembaga keuangan syari'ah, lembaga asuransi, lembaga zakat, *Baitul Mal wat Tanwil* (BMT) dan kegiatan sektor riil lainnya berkembang di mana-mana. Peran organisasi-organisasi massa Islam khususnya yang modernis seperti Muhammadiyah tentunya sangatlah besar. Fokus penelitian ini adalah seberapa jauh peran sosial Muhammadiyah dalam konteks kekinian yang berkaitan upaya penyelesaian masalah-

¹⁵Dawam Rahardjo, "Pengembangan Ekonomi Muhammadiyah", *Suara Muhammadiyah*, No. 12 Th.Ke- 85.(16-31, 2000) hal. 27, kolom 1

masalah sosial kontemporer. Selain itu seberapa besar komitmen Muhammadiyah terhadap pemberdayaan masyarakat dan bagaimana interaksi atau sikap terhadap gerakan ekonomi Islam yang sedang populer yang juga merupakan gerakan Islam .

Secara khusus penelitian dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya perbedaan komitmen organisasi, komitmen keumatan serta sikap Muhammadiyah menurut wilayah. Wilayah menjadi pertimbangan berdasarkan alasan pada perkembangan dinamis organisasi Muhammadiyah di dua wilayah utama yakni Jakarta dan Yogyakarta. Kemudian dinamika pembangunan dan gejala industrialisasi yang dapat mempengaruhi sikap dan kecenderungan individualistis dan sosialis. Secara teoritis sikap dan perilaku masyarakat berhubungan dengan perkembangan lingkungan dari tahapan agraris sampai ke tahapan industrialis¹⁶. Wilayah Jakarta adalah merupakan kota bercirikan metropolitan-industrialis dan Yogyakarta Agraris-semi industrialis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Adakah perbedaan komitmen organisasi, komitmen keumatan dan sikap terhadap gerakan ekonomi Islam dari para pemuka Muhammadiyah ditinjau dari wilayah.

¹⁶ Lihat Kuntowijoyo, "*Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*" Cet.I (Mizan, 1991), hal.279-281

- 2) Bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap gerakan ekonomi Islam
- 3) Mengapa Muhammadiyah sebagai organisasi sosial yang memiliki jaringan luas belum memprioritaskan upaya strategis di bidang ekonomi, utamanya dalam mengatasi ekonomi umat

C. Definisi Istilah dan Batasan Masalah

1) Definisi Istilah

- a). Sikap terhadap Format Gerakan Ekonomi Islam

Suatu respon evaluatif, setuju (*agree*) atau tidak setuju (*disagree*) terhadap institusionalisasi gerakan ekonomi Islam.

- b). Gerakan Islam

Gerakan Islam adalah gerakan yang bertujuan memperbaharui cara berpikir dan cara hidup umat Islam. Aspek yang menjadi perhatian utama gerakan Islam yakni pembaharuan yang lebih menekankan aspek sosial politik yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan pemurnian ajaran Islam.

- c). Gerakan Ekonomi Islam

Gerakan ekonomi Islam adalah gerakan Islam yang menghendaki adanya perubahan sosial menjadi lebih baik (*transformatif*) dengan mendorong kemajuan ekonomi umat Islam serta mengubah pandangan ekonomi agar sesuai dengan syari'ah Islam.

d). **Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi adalah tekad serius untuk bertanggung jawab, mau mengembangkan dan memiliki obsesi masa depan terhadap kemajuan organisasi yang dituangkan dalam bentuk gagasan, konsep dan kebijakan.

e). **Komitmen Keumatan**

Komitmen keumatan adalah tekad serius terhadap penuntasan masalah sosial ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam gagasan, konsep dan kebijakan.

f). **Wilayah**

Daerah domisili responden yang dibagi atas wilayah Jogjakarta dan wilayah Jakarta.

2) **Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi : (1) Respon sosial ekonomi organisasi Muhammadiyah; (2) Sikap Muhammadiyah terhadap gerakan ekonomi Islam; (3) Perbedaan komitmen organisasi, keumatan dan sikap terhadap format gerakan ekonomi Islam dari para pemuka Muhammadiyah yang berdomisili di wilayah Yogyakarta dengan pemuka Muhammadiyah yang berdomisili di Jakarta.

D. Tujuan

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah menjelaskan secara umum komitmen organisasi, komitmen keumatan dan sikap Muhammadiyah terhadap format gerakan ekonomi Islam. Menguji perbedaan komitmen organisasi, komitmen keumatan serta sikap Muhammadiyah terhadap format gerakan ekonomi Islam berdasarkan domisili wilayah Jakarta dan Jogjakarta. yang direpresentasikan oleh pandangan tokohnya.

E. Mamfaat

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk :

- 1) Mengembangkan ekonomi keumatan melalui jaringan ekonomi yang kuat, di mana basis-basis massa Islam yang telah terorganisir dalam ormas-ormas besar dapat dimanfaatkan.
- 2) Membangun kerjasama ekonomi yang harmonis dalam rangka mewujudkan masyarakat madani dengan pengembangan infrastruktur, model dan nilai dalam sebuah sistem yang partisipatif, terbuka dan emansipatoris.

F. Metode Penelitian

1) Variabel penelitian

a). Sikap

Sikap adalah suatu respon evaluatif, setuju (*agree*) atau tidak setuju (*disagree*) terhadap suatu objek dan tindakan sosial.

b). **Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi adalah tekad serius untuk bertanggung jawab, mau mengembangkan dan memiliki obsesi masa depan terhadap kemajuan organisasi yang dituangkan dalam bentuk gagasan, konsep dan kebijakan.

c). **Komitmen Keumatan**

Komitmen keumatan adalah tekad serius terhadap penuntasan masalah sosial ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam gagasan, konsep dan kebijakan.

2) **Desain Penelitian**

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan desain penelitian eksploratif yakni mencari, menggali serta mengungkapkan data-data dari sumber-sumber yang kompeten.

3) **Populasi dan Sampel**

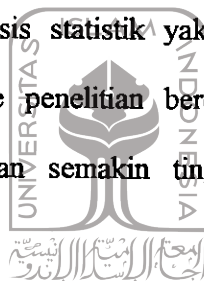
Populasi penelitian adalah warga Muhammadiyah di wilayah Jakarta dan Yogyakarta. Sampel penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yakni dengan mengambil sampel tokoh-tokoh Muhammadiyah di wilayah Yogyakarta dan Jakarta yang mengalami perjalanan keorganisasian Muhammadiyah dari bawah.

4) **Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Instrumen penelitian dengan menggunakan angket. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Untuk memperdalam dan melengkapi data maka dilakukan wawancara kepada beberapa responden yang telah ditetapkan.

2). Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian dan desain penelitian, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan teknik analisis statistik yakni analisis uji beda t-test. Penafsiran parameter score penelitian berdasarkan tingkat antusiasme responden dengan ketentuan semakin tinggi nilainya semakin besar antusiasmenya.



G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini meliputi :

Bab Pertama, membahas pendahuluan. Pendahuluan menguraikan tentang Latar Belakang timbulnya masalah penelitian, Rumusan Masalah, Definisi Istilah dan Batasan Masalah, Tujuan, Manfaat, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bab pertama menjadi landasan bab-bab berikutnya. Karena dalam bab pertama ini telah diuraikan permasalahan-permasalahan pokok dalam penelitian. Hubungan bab pertama dengan bab kedua adalah mencari rujukan kepustakaan yang berkaitan dengan respons sosial Islam, sikap Muhammadiyah atas realitas sosial dan ekonomi dan tipologi gerakan ekonomi Islam.

Bab Kedua membahas Dinamika Gerakan Islam dalam Realitas Sosial dan Ekonomi Nasional. Bab ini membahas: Pendahuluan; Islam dalam Lintas Sejarah, Gerakan Islam menuju Modernisasi dan Islamisasi, Strategi Gerakan Islam Nasional; Islam Transformatif dan Dinamika Politik dan Ekonomi Nasional; Tipologi Gerakan Ekonomi Islam; Muhammadiyah dalam Perubahan Sosial; Kaitan Bab kedua dengan bab berikutnya adalah bahwa respon sosial umat Islam sangat tergantung pada konteks dan latar belakang dinamika sosial yang sedang berkembang.

Bab Ketiga, membahas tentang Acuan Teoritik berisi Reaksi terhadap Barat dan Respons Sosial Nasional Gerakan Muhammadiyah dan Gerakan Ekonomi Islam, Mata Rantai gerakan Muhammadiyah dan Gerakan Ekonomi Islam, Respons Sosial Muhammadiyah Masa Kini, Reaksi Umat Islam terhadap Peminggiran Ekonominya dan Tinjauan Teoritis atas Sikap Manusia berdasarkan Keyakinannya .

Bab Keempat, adalah Hasil Penelitian yang terbagi dalam dua bagian. Pertama; Gambaran Umum dan Perkembangan Muhammadiyah dan Gerakan Ekonomi Islam. Bagian kedua; Muhammadiyah dan Gerakan Ekonomi Islam, Uji Perbedaan Sikap; Deskripsi Sikap Muhammadiyah terhadap Format Gerakan Ekonomi Islam, Generalisasi Sikap Muhammadiyah terhadap Format Gerakan Ekonomi Islam, Hasil dalam bab Keempat ini disimpulkan dalam bab Kelima.

Bab Kelima, adalah kesimpulan. Bab ini merupakan paparan Kesimpulan, Rekomendasi dan Saran Penelitian Lanjutan. Pembahasan untuk bab-bab berikutnya dikembangkan dari kerangka sistematika di atas.

BAB II DINAMIKA GERAKAN ISLAM DALAM REALITAS SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI NASIONAL

A. Pendahuluan

Pada awalnya Islam diamalkan dan diajarkan secara sangat sederhana. Dalam hadits Bukhari sebagaimana dikutip Abdullah dalam kitab Muhammad Al-Ghazali, *al-Janib al-'athify min al-Islam* diriwayatkan sebagai berikut: ada seorang datang kepada Rasulullah dan bertanya apa itu Islam. Nabi menjawab yang artinya:

“ Islam adalah kesaksian bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan Zakat, puasa ramadhan, melakukan ibadah haji jika mampu”.

Kemudian orang itu bertanya lagi tentang apa itu Iman. Rasul menjawab: *“Percaya kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, Hari akhir dan ketentuan-ketentuan baik dan buruk”.* Setelah itu, orang tersebut bertanya pula tentang apa itu Ihsan beliau menjawab: *“Hendaknya saudara menyembah Allah seperti melihat-Nya, dan jika saudara tidak melihat-Nya, yakinlah bahwa Allah selalu melihat saudara”.*¹⁴

Gerakan Islam adalah gerakan yang bertujuan memperbaharui cara berpikir dan cara hidup umat Islam sesuai dengan jiwa dan semangat ajaran Islam sebagaimana tersebut diatas. Aspek yang menjadi perhatian utama gerakan Islam yakni pembaharuan yang lebih menekankan pada aspek sosial politik yang

¹⁴M.Amin Abdullah, *“Studi Agama, Normativitas atau Historisitas ?”* (Yogyakarta, 1996), hal. 148-149.

disesuaikan dengan perkembangan zaman dan pemurnian ajaran Islam. Aktivitas gerakan Islam bisa berbentuk pengejawantahan dan atau refleksi ajaran agama, baik dalam bentuk iman, ilmu maupun amal. Aktivitas tersebut dijalankan dan dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh realitas lingkungan internal dan eksternal tempat dia tumbuh dan bergerak secara dinamis.

Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, hubungan eksistensi dua gerakan Islam yang fenomenal yakni gerakan Muhammadiyah yang terwadahi oleh organisasi massa modern berorientasi sosial dan Gerakan Ekonomi Islam yang merupakan fenomena pemikiran dan aktivitas Islam belakangan yang terwadahi oleh banyak kalangan muslim yang memperjuangkan syari'at Islam dan ekonomi umat yang terpinggirkan, utamanya lembaga swadaya masyarakat, individu dan perusahaan perusahaan yang berorientasi ekonomi sosial.

Bab II ini akan menguraikan rujukan-rujukan yang berhubungan dengan dinamika gerakan Islam dalam realitas sosial dan ekonomi nasional. Islam dalam lintas sejarah, gerakan Islam menuju modernisasi dan Islamisasi, strategi gerakan Islam Nasional, Islam transformatif dan dinamika politik dan ekonomi nasional, typologi gerakan ekonomi Islam, serta Muhammadiyah dan perubahan sosial.

B. Islam dalam Lintas Sejarah

Islam sebagai agama, tentunya memiliki pandangan dunia (world view) dan paradigma yang memberikan orientasi atau kerangka acuan normatif mengenai

bagaimana manusia bertindak dan memahami realitas kehidupannya.¹⁹ Meskipun secara universal semua sepakat bahwa prinsip Islam adalah berdasarkan tauhid dan bertujuan untuk kemaslahatan umat tapi bagaimana cara mewujudkan dan apa yang akan membawa kepada kemaslahatan menjadi pertikaian sepanjang masa.²⁰ Sumber-sumber Islam yang terdiri dari al-Quran, Sunnah, Ijtihad, Ijma' dan Qiyas selain merupakan sumber pedoman hidup juga menunjukkan bahwa dalam Islam, betapa aspek realitas (objektif) menjadi pertimbangan-pertimbangan penting dalam pemikiran dan amal Islam.

Berkaitan dengan perubahan peradaban manusia (era klasik ke era modern) secara umum Alfin Toffler²¹ menunjukkan ciri-ciri peradaban manusia tersebut yang telah melalui dua gelombang, masing-masing gelombang agrikultural (klasik) dan industri (modern). *Gelombang Pertama*, agrikultural dengan ciri-ciri masyarakat lebih mengutamakan kepentingan sosial, irrasional, magis dan menggunakan kekayaan alam dengan teknologi sederhana lebih pada kebutuhan sendiri. Respon tersebut merupakan paradigma masyarakat klasik yang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh kejayaan peradaban Yunani sebelum abad ke XV. Fritjof Capra menggambarkan fenomena kehidupan saat itu sebagai berikut

¹⁹ *Gerakan Keagamaan Dalam Pergulatan Civil Society, Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas berbasis Keagamaan* (Lembaga Studi Agama dan Filasafat (LSAF) & The Asia Foundation (TAF) 1999), hal. 13

²⁰ Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996), hal. 25

²¹ Lihat Alfin toffler, *Previews and Premises Alvin Toffler Kejutan dan Gelombang*, cet.II (Jakarta, PT.Pantja Simpati, 1987), 21-83

Sebelum tahun 1500 Masehi pandangan dunia yang dominan di Eropa dan sebagian besar peradaban lain bersipat organik. Manusia hidup dalam komunitas-komunitas kecil dan erat, dan menjalani kehidupan alam raya dalam pengertian hubungan yang organik, yang ditandai oleh saling ketergantungan antara fenomena spritual dengan fenomena material dan prinsip bahwa kebutuhan masyarakat umum lebih utama dari pada kepentingan pribadi²².

Dapat dikatakan bahwa umat manusia pada era agrikultural belum mempersoalkan aspek - aspek muamalah secara pragmatis dan objektif. Pada era tersebut yang lahir adalah ahli-ahli agama dan moral yang mencermati berbagai hubungan spiritual dan realitas sosial.

Gelombang Kedua, industri dengan ciri-ciri menonjol diri yang cerdas dan trampil. Masyarakat menjadi rasional, materialis dan empiris. Masa tersebut dalam tinjauan Capra telah dimulai sejak revolusi ilmiah yang merupakan bentuk perlawanan pemikir-pemikir rasional atas dominasi doktrin-doktri agama (Kristen ortodoks) yang dianggap berseberangan dengan akal sehat²³. Perubahan paradigma berpikir dari pengertian alam semesta sebagai sesuatu yang bersifat organik, hidup dan spiritual digantikan oleh pengertian bahwa dunia ini laksana sebuah mesin.²⁴ Momentum terbesar era modern adalah revolusi industri pada abad XVIII, ditandai oleh kejayaan peradaban Barat dengan keberhasilan mengasimilasi pengetahuan-pengetahuan masa lalu dengan nilai-nilai kepraktisan bagi kehidupan manusia

²² Lihat Fritjof Capra, *Titik Balik Peradaban, Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*, Cet.III (Yogyakarta, Bentang, 1999), hal. 51

²³ *ibid*

²⁴ *ibid* , hal. 52

.Sebuah perubahan dari rasional-filosofis ke rasional – empiris memberi ruang pada terciptanya teknologi. Toffler telah memprediksi peradaban masa depan yang kini sedang memasuki gelombang ketiga yakni era informasi dengan ciri-ciri masyarakat yang menggunakan teknologi tinggi, mengolah informasi sebagai sumber ekonomi, berpikir bijaksana, supra religius, mistis dan naturalis.

Islam dalam dimensi gerak dan perubahan peradaban, juga berkembang dengan variasi yang semakin lama semakin beragam. Perubahan dan perkembangan yang dimaksud adalah cara memahami Islam (normatif) dan cara bersikap atas realitas sosial, budaya dan politik (objektif). Pergumulan pemikiran dan amal Islam secara internal memunculkan kelompok eksoterik (*zhahiri*) dan esoterik (*bathini*)²⁵ sementara secara eksternal Islam berkembang bersama pengaruh kekuatan peradaban dan perubahan sosial dan budaya masyarakat. Sehingga dalam ruang dan kurung waktu tertentu melahirkan aliran-aliran yang secara garis besar dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yakni klasik dan modern, tentunya dengan berbagai ragam dinamikanya.

Seperti yang dinyatakan Campbell, peran Islam dalam perubahan peradaban manusia secara universal tersebut sangat besar karena Islam membawa obor kejayaan Yunani pada abad XI menuju kejayaan Barat.²⁶ Islam mengalami stagnasi bersama

²⁵ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung, Rosda,2000), hal. 200

²⁶ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, cet.IV (Jakarta, Paramadina, 2000), hal.xxxix

Kristen ortodoks ketika terjadi revolusi ilmiah.²⁷ Selanjutnya perubahan besar di masa modern memberi pengaruh yang kuat dalam perkembangan Islam selanjutnya.

Fazlur Rahman²⁸ melihat gerakan dan perubahan pemikiran Islam dalam empat kategori. *Pertama* adalah revivalisme pramodernis yang muncul pada abad ke-18 dan 19 di Arabia, India dan Afrika. Gerakan ini belum bersentuhan dengan Barat, memiliki ciri-ciri umum yakni imbauan untuk kembali kepada Islam sejati, mengenyahkan takhyul-takhyul, meninggalkan gagasan tentang kemapanan dan finalitas mazhab-mazhab hukum berusaha untuk melakukan ijtihad. *Kedua*, modernisme klasik muncul pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 bersentuhan dengan ide-ide barat. Perluasan terhadap “isi” ijtihad – seperti hubungan antara akal dan wahyu, pembaruan sosial, khususnya dalam bidang pendidikan dan status wanita, serta pembaruan politik dan bentuk-bentuk pemerintahan yang representatif serta konstitusional – lantaran kontaknya dengan pemikiran dan masyarakat barat. *Ketiga*, revivalisme pascamodernis mendukung gagasan demokrasi, pendidikan yang telah dimodernisasi, sama dengan kaum modernis klasik dalam pemikiran bahwa Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik individual maupun kolektif. Namun karena usahanya untuk membedakan diri dari Barat, maka revivalisme pascamodernis merupakan reaksi modernis klasik. *Keempat* adalah neomodernis bersikap kritis terhadap Barat, Islam klasik dan berusaha mengembangkan metodologi yang tepat

²⁷ Fritjof Capra, *Titik Balik.*, hal. 18

²⁸ Taufik Adnan Amal (ed), *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, cet.II (Bandung, Mizan, 1989), hal.18-19

dan logis untuk mempelajari Al-Qur'an guna mendapatkan petunjuk bagi masa depannya.

Memasuki abad 20 ketika Islam bersentuhan dengan Barat, oleh Seyyed Hossein Nasr kategori tersebut dibagi atas fundamentalis, modernis, Mahidiis, dan tradisional.²⁹ Dapat dikatakan bahwa meskipun tidak mengalami pemisahan secara tegas namun tendensi keberagamaan menunjukkan adanya dialektika yang dinamis faham-faham Islam yang nantinya menimbulkan ortodoksi dan gerakan sempalan.³⁰

C. Gerakan Islam menuju Modernisasi dan Islamisasi

Secara harfiah istilah modernisasi mengacu pada pengertian “sekarang ini”.³¹ Istilah ini dianggap sebagai lawan dari istilah *ancient* atau *traditional*. Modernisasi ditandai oleh kreatifitas manusia dalam mencari jalan mengatasi hidupnya di dunia ini.³² Modernisasi yang merupakan peradaban Barat diartikan oleh Max Weber sebagai “rasionalisasi pandangan atas dunia”. Stanislav menafsirkan pernyataan tersebut sebagai kebangkitan sains dan tinjauan ilmiah, atau kemajuan rasionalisme, dengan meyakini bahwa pengertian, persepsi dan penalaran (dan bukannya

²⁹ Lihat Seyyed Hossein Nasr, *Islam dalam Dunia Islam Dewasa Ini*, dalam Harun Nasution & Azyumardi Azra (ed), *Perkembangan Modern Dalam Islam*, cet.I (Jakarta, Yayasan Obor 1985) hal.19-45

³⁰ Lihat Martin van Bruinessen, *Gerakan.*, hal. 17

³¹ Judistira K. Gama, *Antropologi Agama, Tinjauan Agama dari Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung, Jurusan Antropologi Universitas Padjadjaran, 1997), hal. 4

³² Lihat, Nurcholis Madjid “*Mencari Akar-akar Islam bagi pluralitas modern :Pengalaman Indonesia*” dalam Mark R.Woord, *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, (Bandung, Mizan, 1998), hal. 107

kepercayaan) yang merupakan sumber pokok dari ilmu pengetahuan.³³ Abad 19 merupakan abad yang sangat dipengaruhi oleh filsafat positivisme, terutama di bidang ilmu pengetahuan, yang ditandai oleh peran yang menentukan dari cara berpikir ilmiah. Semangat keilmuan telah dimulai sejak abad ke 17 ketika August Comte (1798 – 1857), sebagai bapak positivisme dan sosiolog yang sangat terkenal saat itu, mengemukakan hukum tiga tahap dalam perkembangan pemikiran manusia. *Pertama*, manusia hidup dalam tahap teologis, yaitu pemikiran bahwa setiap persoalan hidup dipecahkan melalui kepercayaan akan kekuasaan Tuhan, mulai dari animisme, politeisme, dan monoteisme. *Kedua*, manusia hidup dalam tahap metafisik. Tahapan ini sebenarnya masih sama dengan yang pertama, hanya digantikan dengan kekuatan abstrak, pengertian, dan konsep abstrak. *Ketiga*, manusia hidup dalam tahapan positif yang bermakna nyata dan ilmiah.³⁴ Pandangan Comte tersebut selain terkesan sebagai perlawanan atas agama (Kristen ortodoks) juga merupakan titik awal bangkitnya era modern yang melahirkan dua revolusi masing-masing revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial di Perancis.

Pada kenyataannya agama telah dianggap menjadi antitesis modernisasi, di mana peristiwa – peristiwa eksekusi ilmuwan seperti Galileo berlangsung ironis dan merupakan klimaks lahirnya sebuah peradaban baru. Agama di era modernisasi tidak sepenuhnya mengalami degradasi peran. Agama sebagai sebuah wadah spritualisasi

³³ Stanislaw Andreski, *Max Weber; Kapitalisme, Birokrasi, dan Agama* (Yogyakarta, Tiara Wacana), hal. 7

³⁴ lihat Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung, Rosda, 2000), hal. 195

seperti Islam mampu berkembang pesat dalam situasi era modern, sebagaimana pengakuan Ernest Gellner seorang ilmuwan sosial termuka dari Barat.³⁵ Demikian juga dalam penelitian sosiologi Max Weber³⁶ justru melihat ada kontribusi motif-motif rasional agama pada terbentuknya modernisasi Barat. Munculnya Kapitalisme erat kaitannya dengan motif etika protestan.. Mungkin lebih tepat seperti prediksi John Naisbitt bahwa kebangkitan agama di era post-modernisme ini ialah agama dalam pengertian spritualitas. Dengan demikian modernisasi yang membawa aspek rasionalitas barat (kemajuan ilmu dan teknologi, pen.) tidak lepas dari dialektika rasional-spiritual dan ketersambungan sejarah tradisional dan modern.

Identitas gerakan Islam modern berlandaskan pada aspek rasional dan pemanfaatan teknologi, metodologi Barat dengan cakupan dan kedalamannya berbeda-beda. Dalam pandangan Rahman, Islam modernisme sebagai awal persentuhan Barat adalah perluasan terhadap “isi” *ijtihad* – seperti hubungan antara akal dan wahyu, pembaruan sosial, khususnya dalam bidang pendidikan dan status wanita, serta pembaharuan politik dan bentuk-bentuk pemerintahan yang representatif serta konstitusional – lantaran kontaknya dengan pemikiran dan masyarakat Barat. Ekspansi Barat dengan perkembangan hebat kapitalisme telah melalui dua tahapan sistem. Sistem teritorial politik-militer dan sistem oceanik ekonomi - perdagangan³⁷.

³⁵ Nurcholis Madjid “*Mencari*”, hal. 107

³⁶ Stanislav Andreski, *Max Weber*., hal.25.

³⁷ Richard Rosecrance, *Kebangkitan Dunia Dagang Perdagangan dan Penaklukan di Dunia Modern*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal.19

Reaksi umat Islam, generasi pertama dalam sistem teritorial tersebut melakukan perlawanan atas dominasi politik dan konstitusi kolonial dan bagaimana pengaruhnya terhadap upaya pencarian identitas muslim untuk mencapai kemerdekaan. Pada fase kedua, reaksi Islam dalam sistem oceanik atau perdagangan, perhatian utamanya bukan saja tertuju kepada sistem internasional yang dikuasai Barat, melainkan juga situasi dalam negeri dari masyarakat setelah kemerdekaan yang dipenuhi berbagai tantangan dalam hampir seluruh bidang kehidupan manusia.³⁸

Menurut Uka Tjandrasasmita, saluran-saluran Islamisasi pada periode awal Islam masuk Indonesia melalui saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian dan saluran politik.³⁹ Sebagaimana tahapan-tahapan kemajuan pengetahuan manusia seperti digambarkan August Comte, ajaran-ajaran Islam menurut Kuntowijoyo disiarkan sesuai dengan perkembangan kemajuan pengetahuan tersebut. Fase mitos dengan islamisasi sufistik, fase ideologi dengan islamisasi institusional, fase ilmu dengan islamisasi ilmu.⁴⁰

Hubungan modernisasi dan islamisasi terjalin kuat pada dataran ideologi dan keilmuan. Islamisasi pada dua fase tersebut merupakan gagasan balik atas

³⁸ Lihat, Chandra Muzaffar, *Kebangkitan Islam : Suatu Pandangan Global*, dalam Harun Nasution & Azyumardi Azra (ed), *Perkembangan Modern Dalam Islam*, cet.I (Jakarta, Yayasan Obor 1985) hal.19-45

³⁹ Uka Tjandrasasmita (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia III*, (Jakarta:PN Balai Pustaka, 1984), hlm.188-195

perkembangan ideologi kebangsaan dan perkembangan ilmu pengetahuan.. Islamisasi zaman kontemporer ini mengarah pada Islamisasi ilmu dan islamisasi ekonomi kapitalisme. Ungkapan Islamisasi ilmu pada awalnya dicetuskan oleh Syed Muhammad al-Naquib Alatas sejak tahun 1977 dan kelanjutan gagasan tersebut disebarluaskan Ismail R. Al-Farugi melalui lembaga yang didirikannya, yaitu Institute Pemikiran Islam Antarabangsa (IIT).

Perkembangan terakhir menunjukkan adanya gagasan-gagasan yang disosialisasikan ke dalam bentuk yang lebih pragmatis – konkrit seperti pendirian bank Islam, pengembangan *baitul maal*, pengelolaan *zakat*, pasar obligasi dan asuransi. Semua berkembang sebagai reaksi atas dampak negatif yang ditimbulkan kapitalisme sekaligus seiring dengan perubahan-perubahan wajah kapitalisme dalam berbagai bentuk yang lebih humanis dan demokratis. Dalam teori objektivikasi Kuntowijoyo sesungguhnya yang terjadi adalah proses Islamisasi yang humanis dan demokratis melalui tahapan internalisasi, eksternalisasi dan objektivikasi.⁴¹

D. Strategi Gerakan Islam Nasional

Strategi gerakan keagamaan merupakan suatu kebijakan (*policy*) pada level makro tentang cara atau langkah – langkah yang harus ditempuh oleh para eksponen

⁴⁰ Sebagai perbandingan situasi baca kedatangan Islam di Indoneisa dalam Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam : Dirasah Islamiyah II*, cet. X (Jakarta, Rajawali Pers, 2000), hal. 191 - 265

⁴¹ Lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, cet.II (Bandung,Mizan, 1997), hal. 65

gerakan keagamaan untuk mewujudkan cita – citanya.⁴² Secara sosiologis, strategi gerakan keagamaan pada dasarnya selalu menempuh dua cara: kultural dan struktural. Menurut pandangan Kuntowijoyo, dalam Islam selain kedua strategi tersebut juga telah muncul strategi inovasi baru yang diperkenalkan oleh ICMI yakni mobilitas sosial.⁴³ Kuntowijoyo kemudian menjelaskan ketiga strategi tersebut sebagai berikut: *Pertama*, Strategi struktural, bertujuan memobilisasi kolektivitas untuk keperluan jangka pendek. Metodenya ialah pemberdayaan dan aliansi. *Kedua*, Strategi kultural menitikberatkan pada individu untuk keperluan jangka panjang. Metode yang sering dipakai adalah penyadaran. *Ketiga*, Strategi mobilitas sosial berusaha secara kolektif dan individual untuk dapat naik dalam tangga sosial, jadi berjangka panjang. Metodenya ialah pendidikan SDM, yang secara sadar untuk mobilitas sosial, jadi tidak sekedar menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.⁴⁴

Perkembangan strategi sosial Islam terkait erat dengan kondisi sosial politik yang mempengaruhi perkembangan sistem pengetahuan masyarakat. Kuntowijoyo membagi perkembangan sistem pengetahuan masyarakat dalam tiga periode. *Periode pertama*, mitos. Ditandai oleh cara berpikir pra-logis (mistik) berbentuk magi, latar belakang ekonomi agrari, masyarakat petani, pergerakan politik (pemberontakan), solidaritas mekanis, dan kepemimpinan tokoh kharismatis. *Periode kedua*, Ideologi. Cara berpikir rasional, (rasional nilai) tetapi masih non – logis berbentuk

⁴² LSAF, *Gerakan*, hal. 13-14

⁴³ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, cet. II (Bandung, Mizan, 2001), hal. 112-113

⁴⁴ *ibid*, hal. 125

pengetahuan apriori tentang nilai-nilai abstrak, lokasi kota, perkumpulan bersifat nasional, ekonomi komersial dan industri kecil, masyarakat pedagang dan “partikelir”, solidaritas organis, dan kepemimpinan intelektual. *Periode ketiga*. Ilmu. Deideologisasi akibat tekanan politik yang kuat membawa pada dua hal yakni : (1) munculnya Islam sebagai ilmu dan (2) munculnya Islam inklusif.⁴⁵

Gerakan Muhammadiyah jika kita cermati sebenarnya masuk dalam periode transisi ideologi ke ilmu. Muhammadiyah telah memulai gerakan kultural dengan pilihan pada pendidikan, panti asuhan dan rumah sakit. Tentang terjadinya perubahan dari “Islam politik” ke “Islam kultural”, Taufik Abdullah, dalam wawancaranya pada tahun 1986 sebagaimana dikutip Syafi’i Anwar mengatakan,

*Sekarang Islam politik mulai ditinggalkan - dan karena harus meninggalkan- kemudian “Islam nasional yang kultural memerlukan bentuk . Karena itulah orang mulai mencari . Itu gejala menarik. Tak usah heran bila berbagai gedung yang merupakan simbol nasional sudah menjadi tempat aktivitas Islam. Bila berbagai universitas menjadi pusat kegiatan dakwah anak muda, bahkan praktis kantor-kantor mempunyai tempat shalat. Itu sebenarnya boleh kita anggap sebagai peralihan dari “Islam nasional yang politik” menjadi Islam nasional yang kultural”.*⁴⁶

Dalam momentum kebijakan pemerintah Orde Baru yang menerapkan depolitisasi atau deideologisasi Islam terjadi sebuah kristalisasi gerakan kultural Islam dengan munculnya generasi baru Islam terdidik yang lebih dikenal dengan cendekiawan muslim. Sejak era 80-an atau era gerakan ilmu atau gerakan kultural

⁴⁵ *ibid*, hal.312

⁴⁶ M.Syafi’i Anwar, *Pemikiran*, . hal. 133

kegiatan dan pemikiran cendekiawan muslim tersebut memiliki tipologi yang beragam. Oleh Syafi'i Anwar dibagai dalam enam jenis tipologi, yaitu :

- 1) *Formalistik*, menunjukkan suatu model pemikiran yang mengutamakan peneguhan dan ketaatan yang ketat pada format-format ajaran Islam
- 2) *Substantivistik*, dimaksudkan sebagai aksentuasi bahwa substansi atau makna iman dan peribadatan lebih penting daripada formalitas dan simbolisme keberagamaan serta ketaatan yang bersifat literal kepada teks wahyu Tuhan.
- 3) *Transformatik*, bertolak dari pandangan bahwa misi Islam yang utama adalah kemanusiaan. Untuk itu Islam harus menjadi kekuatan yang dapat memotivasi secara terus menerus, dan mentransformasikan masyarakat dengan berbagai aspeknya kedalam skala-skala besar yang bersipak praksis maupun teoritis.
- 4) *Totalistik*, ciri utama dari pemikiran totalistik adalah adanya sikap utama yang mendasar dengan menganggap bahwa doktrin Islam bersipat total (*kâffah*), serta mengandung wawasan-wawasan , nilai-nilai dan petunjuk yang bersifat langgeng dan komplit yang meliputi semua bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, serta melingkupi segi-segi baik individual, kolektif, maupun masyarakat kemanusiaan umumnya.
- 5) *Idealistik*, suatu pemikiran idealistik dalam konteks ini, adalah suatu pemikiran yang bertolak dari pandangan pentingnya perjuangan umat untuk berorientasi pada tahapan menuju "Islam cita-cita" (*ideal Islam*).

Islam cita-cita adalah Islam sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan sunnah yang otentik, tetapi yang belum tentu tercermin dalam tingkah laku sosio-politik umat Islam dalam realitas sejarah mereka

- 6) *Realistik*, ciri pokok pemikiran tipe realistik adalah melihat keterkaitan atau melakukan penghadapan anantara dimensi substantif dari ajaran atau pun doktrin agama, dengan konteks sosio-kultural masyarakat pemeluknya.

Sejak masa Orde Baru bentuk-bentuk strategi kultural lebih tampak mewarnai gerakan – gerakan islam modern. Proses benturan budaya dan bahkan peradaban manusia yang menempatkan upaya rasionalisasi, islamisasi dan pribumisasi menjadi sebuah dialektika dinamis dan konstruktif dalam wacana dan aktivitas nasional dalam rangka membentuk sistem berpikir yang baru bagi umat.

E. Islam Transformatif dalam Dinamika Politik dan Ekonomi Nasional

Salah satu tipologi pemikiran yang disebut M. Syafi'i Anwar adalah Islam transformatik. Pemikiran transformatik bertolak dari pandangan, sebagaimana dikatakannya :

...bahwa misi Islam yang utama adalah kemanusiaan. Untuk itu Islam harus menjadi kekuatan yang dapat memotivasi secara terus menerus, dan mentransformasikan masyarakat dengan berbagai aspeknya ke dalam skala-skala besar yang bersipaf fraksis maupun teoritis.⁴⁷

⁴⁷M.Syafi'i Anwar, *Pemikiran*., hal. 162.

Pada transformasi yang bersifat praksis Anwar melihat bahwa perhatian utamanya adalah pemecahan masalah bukan pada aspek-aspek doktrinal dari teologi Islam, tetapi pada pemecahan masalah-masalah empiris dalam bidang sosial ekonomi, pengembangan masyarakat, penyadaran hak-hak politik rakyat, orientasi keadilan sosial dan sebagainya.

Gerakan kultural Islam sebagai respons politik kehidupan agama, merupakan jawaban atas peminggiran Islam dalam wacana politik kebangsaan. Era Orde Baru dalam kurung waktu tertentu menekan aspirasi-aspirasi politik umat Islam. Setelah kegagalan kepemimpinan Soekarno tahun 1965, atau yang dikenal dengan era Orde Lama, yang mengedepankan visi politik disertai dengan dampak kebangkrutan ekonomi, maka kepemimpinan Soeharto memprioritaskan pembangunan ekonomi dan menekan tumbuhnya demokrasi politik dan bahkan nantinya demokrasi ekonomi.⁴⁸ Dampak tersebut justru mendapat respon positif dengan berkembangnya Islam kultural, termasuk di bidang ekonomi.

Dalam analisis Robert W.Hefner dapat disimpulkan bahwa pintu masuk gerakan ekonomi Islam di kancah ekonomi terjadi setelah Indonesia melewati tiga tahap dinamika pembangunan ekonomi. *Pertama*, tahap *booming* ekonomi yaitu eksplorasi sumber daya alam dan utang luar negeri terjadi pada tahun 1970-an dengan mengandalkan sumber migas, utamanya minyak bumi. *Kedua*, tahap deregulasi atau swastanisasi terjadi sejak tahun 1980-an yakni ekonomi berorientasi

⁴⁸ Lihat Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999, hal. 72 - 126

ekspor non migas melibatkan pihak swasta dengan pengembangan sektor keuangan. *Ketiga*, tahap penguatan konglomerasi bidang ekonomi yang melibatkan non pribumi, pejabat dan militer dengan cara-cara kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Pada tahun 1990-an, dengan bekal akomodasi politik Islam dan negara, gerakan ekonomi Islam menemukan momentumnya pada saat lahirnya ICMi yang kemudian mendapat restu mendirikan bank Islam pertama di Indonesia bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI).⁴⁹

Hefner,⁵⁰ sebagai seorang sosiolog dan pemerhati Indonesia, dalam karyanya *Islam, pasar, keadilan artikulasi lokal, kapitalisme dan demokrasi* melihat ada tiga aliran utama pemikiran ekonomi muslim (Islam). Aliran pertama adalah aliran nasionalis –statis, yang secara dekat diidentikkan dengan Habibie yang berorientasi pengembangan kelas bisnis, teknologi ilmiah, manajemen modern dan peningkatan kualitas pendidikan. Nasionalis statis cenderung setengah-setengah atau bahkan tidak menyukai detail-detail teknis “ekonomi Islam”. Aliran kedua, Ekonomi Islam Populis tetap mendukung intervensi pemerintah terhadap ekonomi Muslim (Islam) dengan cara distribusi yang lebih adil dan lebih terbuka, antusiasme terhadap ekonomi Islam, memberi alternatif ekonomi populis dengan penyebar luasan institusi keuangan syari’ah, pelatihan manajemen bagi para pengusaha kecil, penyaluran zakat kepada

⁴⁹ Lihat Robert W. Hefner, *Islamisasi Kapitalisme : Tentang Pembentukan Bank Islam Pertama Indonesia*, dalam Mark R. Woodward, Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia, cet. II (Bandung, Mizan, 1999), hal. 255-281

⁵⁰ Hefner, *Islam.*, hal.253-257

koperasi (BMT) untuk orang miskin. Tokoh yang termasuk dalam kategori pemikiran ini adalah Dawam Rahardjo, Adi Sasono, Amin Aziz . Ketiga, Pemikiran ekonomi Islam liberal, menyatakan bahwa selain semangat kejujuran dan keadilan sosial, tak ada lagi alternatif Islam untuk ekonomi pasar. Tokoh yang identik dengan pemikiran ini adalah Abdurrahman Wahib (Gus Dur). Gus Dur merasa tak ada hal secara eksplisit merupakan ekonomi Islam. Lebih lanjut dikatakan berpikir bahwa syari'ah memuat petunjuk-petunjuk sistematis mengenai urusan ekonomi adalah "suatu latihan menipu diri".

Berdasarkan analisis Hefner tentang aliran pemikiran ekonomi Islam di Indonesia, maka gerakan ekonomi Islam adalah gerakan ekonomi populis yang mempertemukan antara ideologi dan idealisasi terhadap realitas dan objektif sebagaimana harapan Kuntowijoyo.⁵¹ Mustafa Kamal mempertegas bahwa upaya menuju pada terbentuknya sistem dan teori-teori ekonomi Islam, dengan cara memperjelas arah gerakan kultural Islam khususnya gerakan ekonomi Islam adalah melakukan institusionalisasi gagasan-gagasan Islam.⁵² Kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Bank Muamalat Indonesia, BPRS, BMT, Asuransi Takafful, Reksa Dana Syari'ah, dan lembaga pendidikan adalah bagian dari upaya tersebut. Gerakan ekonomi Islam dapat memenuhi syarat rasional-objektif dan ideal-normatif mayoritas umat Islam sehingga gerakan ini tidak hanya

⁵¹ Lihat Kuntowijoyo, *Paradigma*., hal. 195-206

⁵² Mustafa Kamal (ed), *Wawasan Islam dan Ekonomi*, (Jakarta, LPFEUI, 1997), hal. vi

menjadi alat strategis aliran pemikiran Islam transformatik tapi menjadi alternatif yang telah teruji kemampuannya, baik di kalangan umat Islam maupun nonIslam.

Hal yang menarik dari gerakan ekonomi Islam adalah aktivitas aktivitas mereka tidak digerakkan secara langsung oleh organisasi-organisasi massa Islam. Pada satu sisi, Kuntowijoyo memandang gerakan baru Islam yang lahir tahun 80-an sebagai kekuatan yang berasal dari perubahan-perubahan yang muncul akibat kebijakan pemerintah Orde Baru di bidang pendidikan dengan penerapan kurikulum pendidikan agama di sekolah umum, dan terjadinya konvergensi kelompok santri dan abangan akibat perubahan-perubahan sosial.⁵³ Aksi-aksi pergerakan kampus bersama kegiatan-kegiatan lembaga swadaya masyarakat, melahirkan institusi ekonomi Islam di Bandung yang dikenal dengan Koperasi *Baitul Tanwil Teknosa Bandung* yang dikelola oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB). Demikian juga dengan pengelolaan Lembaga Zakat dan Infaq (LZI) yang didirikan oleh salah seorang dosen Universitas Brawijaya.⁵⁴ Puncak aksi generasi baru tersebut adalah lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia .

F. Tipologi Gerakan Ekonomi Islam

Tipologi gerakan ekonomi Islam adalah merupakan gerakan transformator masyarakat dengan berbagai aspek ke dalam skala-skala besar yang bersipat praktis

⁵³ Kuntowijoyo, *Paradigma*, hal. 182

⁵⁴ Iwan Triuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*, (Yogyakarta, LkiS, 2000), hal. 87

maupun teoritis sebagaimana pandangan M.Syafi'i Anwar. Sehingga dalam bidang ekonomi, menurut Hefner, mereka tergolong pendukung intervensi pemerintah terhadap ekonomi Muslim (Islam) dengan cara distribusi yang lebih adil dan lebih terbuka, antusiasme terhadap ekonomi Islam, memberi alternatif ekonomi populis dengan penyebarluasan institusi keuangan syari'ah, pelatihan manajemen bagi para pengusaha kecil, penyaluran zakat kepada koperasi (BMT) untuk orang miskin. Penggerak gerakan ini adalah ilmuan yang sekaligus aktivis kampus, utamanya jama'ah – jama'ah kampus di berbagai perguruan tinggi.

Dukungan perguruan tinggi yang dimulai dari Yogyakarta, pada awal tahun 1990-an pelatihan-pelatihan *short courses* dilakukan oleh Universitas Islam Indonesia, Syari'ah Banking Institute (SBI), Islamic Economic Development (ISED), Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Bank Syari'ah (LPPBS) Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sejak tahun 1997 kajian keilmuan yang lebih serius dilakukan oleh sekolah pertama yang khusus pengelola manajemen dan keuangan syari'ah (Islam) yakni STIS Yogyakarta, disusul kemudian PTAIS dan PTN seperti UII, UMY, UGM, UII, UNAIR, UNIBRAW dan lain-lain.

Dawam Rahardjo dalam akhir sebuah tulisannya berjudul perkembangan Islam di bidang ekonomi menyatakan bahwa :

Perkembangan Islam di bidang ekonomi akan diwarnai oleh tiga faktor. Pertama, perkembangan kajian teologi dan diskursus pembaharuan yang memperkenalkan nilai – nilai Islam. Kedua, keberhasilan usaha kecil, usaha rumah tangga dan sektor informal yang merupakan basis perekonomian kaum muslim di Indonesia dan dilain fihak berkembangnya usaha kaum muslim disektor modern berskala

besar. Dan ketiga, berkembangnya dan keberhasilan eksperimen sistem ekonomi Islam, terutama dibidang keuangan.⁵⁵

Dengan demikian ekonomi Islam berkembang dalam dua tataran, yakni tataran teoritis dan praktis. Pada tataran teoritis dikembangkan melalui pendidikan tinggi, kajian keilmuan dan pengembangan riset-riset Islamisasi ekonomi. Pada tataran praktis dikembangkan mulai dari sektor moneter; bank umum, BPRS, BMT, pengembangan pengelolaan zakat produktif, asuransi, dan bursa saham Islam kemudian menyusul pegadaian syariah.

Dengan intelektualisme yang kaya dan dinamis, gerakan ekonomi Islam yang dibawa generasi 1980-an berkembang dari kampus menuju ke praktisi bisnis dan kembali ke perguruan tinggi dengan penggalian dan sumber-sumber rujukan yang lebih banyak. Tanpa beban psikologis politis, gerakan ini berkembang di tengah masyarakat dengan keyakinan akan datangnya fajar baru Islam dari kekuatan ekonomi.

G. Muhammadiyah dan Perubahan Sosial

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Warga Muhammadiyah sering diidentikkan dengan kaum modernis untuk membedakan dengan organisasi besar lainnya, yakni Nahdhatul Ulama (NU), yang sering disebut kaum tradisional. Muhammadiyah yang lahir tahun 1912 memiliki sifat dan atribut dominan sebagai gerakan sosial – keagamaan modern yang bertujuan

⁵⁵ M.Dawam Rahardjo, *Islam*, hal.172

untuk mengadaptasikan ajaran-ajaran Islam yang murni ke dalam kehidupan dunia modern Indonesia. Ide – ide tersebut tidak lepas dari gerakan pembaharuan Syaikh Muhammad Abduh (Mesir 1849 – 1905) yang mengobarkan semangat pembaruan pemahaman dan pembersihan ajaran Islam dari daki – daki sejarah yang dianggap bagian tak terpisahkan dari Islam.⁵⁶

Pandangan beberapa peneliti tentang sifat dan karakter Muhammadiyah yang saling berbeda menunjukkan bahwa Muhammadiyah bergerak dalam multidimensi. Sebagaimana dikutip Alwi Shihab, Bernard Vlekke dan Werthein mengkategorikan Muhammadiyah sebagai gerakan puritan yang menjadi fokus utamanya “pemurnian atau pembersihan ajaran – ajaran Islam dari singkritisme dan belenggu formalisme”. George Kahin, Robert van Neil, Drewes, Deliar Noer, dan Alfian menempatkan Muhammadiyah sebagai “Pergerakan Islam Modern”. Raymond Kennedy, yang menekuni bobot serta pengaruh politik Muhammadiyah, teristimewa untuk perjuangan kemerdekaan dan penetrasi budaya asing mengklasifikasikan Muhammadiyah sebagai gerakan politik.⁵⁷

Peacock⁵⁸ melihat sebaliknya, bahwa alasan keberhasilan Muhammadiyah justru karena pernyataan pemisahan dari politik. Sehingga sebagaimana pandangan Robert W. Hefner, Muhammadiyah bergerak secara kultural - praktis pada kegiatan – kegiatan kemasyarakatan, dan sebagai sikap modernis Muhammadiyah *permissve*

⁵⁶ Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, cet. VII (Bandung, Mizan, 1999), hal.304

⁵⁷ *ibid*

terhadap pendidikan, teknologi dan ilmu pengetahuan barat, dan anti terhadap kepemimpinan agama yang kharismatik. Sebaliknya, ia mengembangkan model organisasi yang berdasarkan sistem birokrasi yang teratur rapi dan pemilihan yang terbuka.⁵⁹

Bagi kalangan internal Muhammadiyah, meyakini bahwa landasan perjuangan organisasinya adalah mengutip firman Allah SWT. Surat ke-3 ayat 104 yang intinya menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*). Muhammadiyah merumuskan maksud dan tujuannya dengan beberapa kali perubahan. Pada Mukhtamar ke 40 di Solo, rumusan maksud dan tujuan tersebut berbunyi “menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wata’ala⁶⁰”. Prinsip perjuangan Muhammadiyah adalah gerakan sosial keagamaan yang keseluruhan prinsip perjuangannya dapat dikelompokkan menjadi lima prinsip, yaitu (a)prinsip gerakan Islam; (b)prinsip gerakan sosial; (c) prinsip gerakan dakwah;(d) prinsip gerakan *tajdid*; (e) prinsip gerakan ilmu.⁶¹

Secara historis dan strategis, Muhammadiyah dibedakan dalam tiga tahap .
Pertama, Islam sejati Kiai Ahmad dahlan. *Kedua*, formalisasi syari’ah pada masa

⁵⁸ James L. Peacock, *Gerakan.*, hal. 163

⁵⁹ Hefner, *Islam.*, hal. 82

⁶⁰ Musthafa Kamal Pasha, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam, dalam Perspektif Historis dan Ideologis*, (Yogyakarta, LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2000), hal. 82

⁶¹ Abdul Munir Mulkhan, *Islam.*, *Menggugat Muhammadiyah*, (Yogyakarta, Fajar Pustaka, 2000), hal. 70

dominasi ahli syari'ah yang terlembaga dalam tarjih yang berfungsi sebagai lembaga fatwa syari'ah. *Ketiga*, era spritualisme syari'ah pada masa kepemimpinan generasi baru berpendidikan tinggi modern.⁶²

Dari segi kualitas, Kuntowijoyo sebagai salah seorang kader Muhammadiyah menkritisi aksi-aksi sosial Muhammadiyah yang telah kehilangan ruh zaman. Kuntowijoyo dalam karyanya *Paradigma Islam, Intrepretasi untuk aksi* menyatakan bahwa :

..... perspektif transformasi sosial, Muhammadiyah sesungguhnya belum memiliki konsep gerakan sosial yang jelas . Selama ini kegiatan pembinaan warga Muhammadiyah lebih diorientasikan kepada kegiatan untuk mengelola pengelompokan-pengelompokan yang didasarkan pada diferensiasi jenis kelamin dan usia .⁶³

Dampak dari tindakan seperti itu, selanjutnya dikatakan :

..... justru bersipat anti sosial , karena pengelompokan berdasarkan usia dan jenis kelamin cenderung mengabaikan adanya realitas stratifikasi dan diferensiasis sosial –sesuatu yang kini justru perlu mendapat lebih banyak perhatian dari Muhammadiyah.⁶⁴

Muhammadiyah sebagai gerakan pemurnian agama, rasionalisasi, dan perubahan sosial dipertanyakan oleh Kuntowijoyo peran sosialnya. Sebagaimana dalam kutipan berikut ini :

..... Sesudah berkiprah selama lebih dari 75 tahun sejak berdirinya pada 1912, ada sesuatu gejala yang tidak berubah dari basis sosial gerakan Muhammadiyah, yakni bahwa ia masih berada di desa-desa, kota-kota kecil,

⁶² Abdul Munir Mulkan, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*, (Yogyakarta, Benteng, 2000), hal.44

⁶³ Kuntowijoyo, *Paradigma.*, Hal. 265

⁶⁴ *Ibid*, hal.266

dan kampung-kampung di dalam kota. Dengan kata lain, kita dapat bertanya , mengapa selama ini Muhammadiyah belum sungguh-sungguh menguasai kota; atau mengapa Muhammadiyah belum menyentuh dinamika sosial dan budaya metropolitan ?.⁶⁵

Secara aktual Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan memiliki kurang lebih 30 juta anggota dan simpatisan, telah mendirikan 13108 lembaga pendidikan mulai TK sampai Perguruan Tinggi⁶⁶ , 250 pelayanan kesehatan, 29 di antaranya berupa rumah sakit. Dawam Rahardjo yang berlatar belakang pemikir Islam transformatif dan sepaham dengan Kuntowijoyo memanfaatkan kedudukannya di Muhammadiyah sebagai Pimpinan Pusat Pembina Majelis Ekonomi Muhammadiyah untuk memperkuat gerakan ekonomi Islam.

Sejak Muktamar Muhammadiyah ke 43 di Aceh Muhammadiyah mempertegas komitmennya pada pengembangan ekonomi. Dawam selanjutnya mengatakan dalam salah satu makalahnya pada Seminar Sehari Potensi Ekonomi Muhammadiyah di Yogyakarta bahwa :

Baru dalam muktamar ke 41 di Solo tahun 1985, dibentuk Majelis Ekonomi Muhammadiyah. Tapi agaknya, Majelis tersebut hanyalah bertugas untuk menanggapi masalah-masalah ekonomi nasional sebagai pandangan Muhammadiyah. Dengan kata lain , tugasnya lebih menjurus pada advokasi. Pada hal dalam Muktamar itulah , dari penemuan survei yang diadakan oleh LSP diketahui bahwa sebagian besar pengurus Muhammadiyah adalah pegawai negeri,. Selama 10 tahun, Majelis Ekonomi Muhammadiyah tidak memiliki kegiatan yang nyata dalam pembinaan ekonomi umat, walaupun mengarah ke itu. Agaknya menyadari hal itu , maka Muktamar ke 43 di Banda Aceh nama Majelis Ekonomi dipertegas menjadi Majelis Pembina

⁶⁵ *Ibid*, hal. 267

⁶⁶ Said Tuhuleley, “ *Masa Depan Muhammadiyah: Kualitas Versus Kuantitas*”, Media Inovasi No.2 TH. X / 2000, hal. 5

*Ekonomi. Dari nama tersebut tersimpul bahwa Muhammadiyah mulai mengembang misi membina ekonomi umat.*⁶⁷

Bagaimana sikap Muhammadiyah, baik sebagai organisasi maupun sebagai warga, atas keberadaan institusi ekonomi Islam dan konsep Dawam Rahardjo sebagai Pimpinan Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah dalam menggerakkan ekonomi Muhammadiyah, menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

Hubungan Muhammadiyah dengan dinamika gerakan ekonomi Islam menjadi penting karena tiga hal. *Pertama* bahwa sebagai kaum modernis, Muhammadiyah mempunyai peran penting atas lahirnya generasi baru pemikir dan aktivis sosial sejak dasa warsa 1970-an.⁶⁸ Mereka, seperti disebut diatas, menjalankan Islam kultural dalam ragam pemikiran dan aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. *Kedua*, sebagaimana yang disebut Kuntowijoyo bahwa kecenderungan warga Muhammadiyah bersikap rasional yang menjurus pada terbentuknya karakter individualistis, sehingga dalam masalah ekonomi lebih cenderung pada bentuk – bentuk ekonomi sistem kapitalis atau bisnis-bisnis personal. *Ketiga*, Muhammadiyah secara teologis memiliki konsep tanggung jawab sosial dan institusional namun

⁶⁷ Dawam Rahardjo, “ *format dan Strategi Pengembangan Ekonomi Muhammadiyah dalam Milleium Ketiga*”, Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Format dan Strategi Pengembangan Gerakan Ekonomi Muhammadiyah, diselenggarakan oleh Majelis Ekonomi Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 24 Maret 200, Hotel Garuda Natour

⁶⁸ Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan; Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos Kewirausahaan*, (Yogyakarta, Galang Press, 2001), hal. 106

secara sosiologis belum memiliki kerangka kerja yang strategis dalam bentuk pemberdayaan ekonomi produktif.⁶⁹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁶⁹ Lihat Dawam Rahardjo, *Islam*, hal.356

BAB III ACUAN TEORI

Benturan Islam dan Barat menimbulkan perubahan reaksi pada pergerakan Islam yang mencapai titik puncaknya pada abad ke-19 Masehi. Reaksi tersebut muncul dalam dua arah, yakni gerakan modernisasi dan gerakan Islamisasi. Dalam konsep Weber, modernisasi memiliki ciri – ciri sistematisasi, rasional, sains modern, pertumbuhan birokrasi dan sentralisasi politik. Modernisasi memberi kontribusi terhadap manajemen organisasi dan rasionalitas umat. Islamisasi dalam proses sejarah adalah misi Islam itu sendiri yang telah melalui tahapan-tahapan mitos dengan proses sufistik, ideologi dengan proses institusionalisasi, ilmu dengan proses Islamisasi ilmu. Sebagai suatu reaksi, Islamisasi merupakan jawaban atas kegagalan – kegagalan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh modernisasi utamanya pada tahap pertumbuhan ekonomi kapitalis yang pesat.

Pola-pola perubahan sikap manusia tidak lepas dari *setting* budaya dan tingkat pengetahuannya. Sebagaimana dalam teori August Comte, bahwa perkembangan pemikiran manusia melalui tahapan teologis, metafisik dan positivis. Berkaitan dengan *setting* budaya nasional, tahapan – tahapan perkembangan pemikiran manusia tersebut oleh Kuntowijoyo dibagi atas tahapan mitos, ideologi dan ilmu. Alvin Toffler dalam pandangan-pandangan empiris-teknologi, melihat bahwa manusia melakukan eksploitasi dan eksplorasi alam sebagai tujuan dan alat melalui tahap agraris, industri dan telekomunikasi.

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis yang tidak lepas dari pengaruh gerakan pembaharuan Syaikh Muhammad Abduh (Mesir 1849 – 1905), berkembang di Indonesia pada tahapan ideologi dengan basis masyarakat agraris – urban. Muhammadiyah menjalankan misi ajaran Islam, selain untuk Islamisasi masyarakat mitos, juga rasionalisasi Islam tradisional yang perpaduan keduanya menimbulkan Islam sinkretis. Muhammadiyah menjalankan syari'at Islam menurut pedoman Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Upaya-upaya institusionalisasi sosial dan ekonomis yang dilakukan Muhammadiyah adalah refleksi teologi yang diwujudkan dalam bentuk pendidikan, rumah sakit dan panti Asuhan.

Muhammadiyah dengan generasi baru Islam pada tahun 1970-an dan 1980-an, menurut Bahtiar Efendy, memiliki hubungan yang erat. Sejak depolitisasi yang memunculkan gerakan kutural Islam, perkembangan Islam menjadi lebih beragam dan aktual secara peran dan fungsional yang sebenarnya merupakan kader-kader organisasi modernis pra Orde Baru. Gerakan ekonomi Islam adalah bagian dari pemikiran intelektual dan aktivis dasawarsa 1970-an tersebut.

Generasi baru Islam berada pada tahap ilmu atau lebih jauh lagi tahap empiris. Reaksi gerakan baru Islam tersebut berubah dari sebatas refleksi teologi – seperti yang dijalankan organisasi Muhammadiyah - ke refleksi sosiologi. Upaya – upaya pribumisasi, perkembangan sosiologi agama merupakan perkembangan baru yang dibawa oleh gerakan-gerakan Islam sejak dasawarsa 1970-an. Intelektual dan aktivis Islam tidak hanya memberi reaksi pada ideologi semata, sebagaimana teori Hefner tentang reaksi umat islam atas peminggiran ekonominya, tapi lebih aktif pada

kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat . Gerakan Muhammadiyah dan gerakan ekonomi Islam sebagai institusi sosial agama memiliki mata rantai pada kemajuan pendidikan.

Muhammadiyah yang lahir pada masa tahap ideologi, melakukan proses Islamisasi sekaligus modernisasi terhadap kepribadian, manajemen dan institusi. Reaksi atas kenyataan hidup masyarakat yang sedang mengalami keterbelakangan dijawab berdasarkan refleksi teologi dengan melakukan proses institusionalisasi sekolah, panti asuhan dan rumah sakit. Sebagai gerakan pemurnian agama, Muhammadiyah melakukan purifikasi atas apa yang dinamakan *takhayul, bid'ah dan khurafat* (TBC).

Gerakan ekonomi Islam yang lahir pada masa tahap ilmu, melakukan proses Islamisasi dan modernisasi terhadap ilmu dan manajemen umat. Reaksi atas kenyataan hidup masyarakat yang sedang mengalami peminggiran ekonomi umat akibat ketidakadilan ekonomi dan ekonomi yang tidak didukung oleh partisipasi masyarakat dijawab dengan refleksi sosiologi dengan melakukan proses institusionalisasi ekonomi Islam dalam bentuk lembaga keuangan, lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga penunjang ekonomi lainnya. Gerakan ekonomi Islam yakin terhadap terjadinya proses transaksi ekonomi yang mengandung unsur riba maka perlu dilakukan purifikasi.

Terhadap masalah ekonomi, menurut Hefner, reaksi umat Islam atas peminggiran ekonominya, terbagi pada tiga kategori, *Pertama*, nasional–statis, yang tujuan utamanya mengambil peran besar pada industri dan proyek strategis

pemerintah, prinsip pokok pemikirannya adalah revitalisasi Islam terletak di dalam kemajuan umat Islam di bidang pendidikan, teknologi ilmiah dan manajemen modern. *Kedua*, gerakan ekonomi populis yang menekankan pada kemandirian dan penegakan prinsip-prinsip syari'ah, sementara gerakan ekonomi diwujudkan dengan perluasan bank Islam dengan bentuk lembaga keuangan lainnya, pengelolaan zakat beserta pendidikan dan pelatihan. *Ketiga*, kerjasama, Bagi aliran ini yang penting adalah semangat kejujuran dan keadilan. Kegiatan ekonomi tidak perlu diintervensi secara sistematis dan teoritis oleh agama. Nilai-nilai rasional dalam bisnis adalah prinsip utama dalam hubungan ekonomi dengan siapa saja

Di dalam organisasi Muhammadiyah sendiri ternyata juga mengalami perkembangan dan perubahan sikap terhadap kondisi sosial. Munir Mulkan membagi bentuk pemikiran dan aktivitas Muhammadiyah melalui tiga tahapan. *Pertama*, Islam sejati Kiai Ahmad dahlan. *Kedua*, formalisasi syari'ah pada masa dominasi ahli syari'ah yang terlembaga dalam tarjih yang berfungsi sebagai lembaga fatwa syari'ah. *Ketiga*, era spiritualisme syari'ah pada masa kepemimpinan generasi baru berpendidikan tinggi modern.

Gerakan Muhammadiyah dan gerakan ekonomi Islam selain merupakan sebuah mata rantai pergerakan Islam yang muncul akibatkan kemajuan pendidikan, dapat juga dilihat dari sikap dan tingkah laku yang mendasarinya, yakni berdasarkan rasional nilai. Sebagaimana konsep *Tipe Ideal* Max Weber dalam Protestanisme-nya, tipe ideal tingkah laku manusia sebagaimana dikutip Dadang Kahmad seperti berikut ini.

- 1) Tingkah laku manusia *zweckra-tional* atau rasional tujuan; yaitu tingkah laku manusia cita-cita rasional. Bentuk orientasi ini mencakup perhitungan yang tepat dan pengambilan sarana-sarana yang paling efektif untuk tujuan-tujuan yang dipilih dan dipertimbangkan dengan jelas, atau sasaran. Pandangan ini merupakan kerangka pikir yang sangat *utilitarian* atau *instrumentalis*. Kerangka pikir ini logis, ilmiah, dan ekonomis.
- 2) Bagian kedua dari jenis tindakan manusia (sosial) adalah tingkah laku *wertrational* atau rasional nilai. Menurut model ini, seorang pelaku terlibat dalam nilai penting yang mutlak atau nilai kegiatan yang bersangkutan. Dia lebih mengejar nilai-nilai daripada memperhitungkan sarana-sarana dengan cara yang *evaluatif netral*. Manusia yang menyatakan kebenaran apa adanya, jelas bertindak secara rasional nilai. Juga semua tingkah laku manusia yang rasional mengandung semua unsur rasionalitas nilai, karena pencarian tujuan-tujuan secara logis dalam segala bentuk mengandaikan bahwa tujuan-tujuan itu dinilai oleh si pelaku
- 3) Jenis yang ketiga adalah *tipe ideal* untuk tindakan afektif atau emosional; yaitu tingkah laku yang berada di bawah dominasi perasaan secara langsung. Disini tidak ada rumusan sadar, nilai-nilai, atau kalkulasi sarana-sarana yang cocok. Tindakan ini sama sekali emosional dan , karena itu, tidak rasional.

- 4) Kategori selanjutnya adalah tindakan manusia yang ia beri nama tradisional. Kategori ini mencakup tingkah laku yang “dimaksudkan” dan sebagai “tindakan sejati”.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV. SIKAP MUHAMMADIYAH TERHADAP FORMAT GERAKAN EKONOMI ISLAM

A. Gambaran Umum

A.1.1. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al Qur'an dan Sunnah. Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1912 M di Yogyakarta. Secara etimologis Kata Muhammadiyah berasal kata "*Muhammad*", yaitu nama Rasulullah SAW. Yang diberi tambahan *ya nisbah* dan *ta marbutah*. Artinya bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang dinamakan kepada Muhammad, karena mengikuti jejak perjuangan nabi.

Secara terminologis Muhammadiyah adalah gerakan Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, berasas Islam dan bersumber Al-Qur'an dan Sunnah. Gerakan Muhammadiyah bermaksud untuk *bertafa'ul-* (berpengharapan baik) dapat mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad saw dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya '*Izzul Islām wal Muslimīn*, kejayaan Islam sebagai idealita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita.⁶⁵

⁶⁵ Pasha, Musthafa Kamal dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah.*, hal.69

Ada sejumlah alasan yang dikemukakan K.H. Ahmad Dahlan ketika mendirikan organisasi ini. *Pertama*, sebagian umat Islam tidak memegang teguh Al-Qur'an dan Sunah dalam beramal, sehingga takhayul dan syirik merajalela. Akibatnya, amalan-amalan sebagian dari mereka merupakan campuran antara tradisi agama Hindu, Budha, dan Islam. *Kedua*, lembaga pendidikan agama yang ada pada waktu itu dinilai tidak efisien. Pesantren, yang menjadi lembaga pendidikan kalangan bawah bumi putera, pada masa itu sudah dinilai tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, kemiskinan menimpa rakyat Indonesia, terutama umat Islam, yang sebagian besar adalah petani dan buruh. Orang muslim yang kaya hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka sering lupa menunaikan kewajiban membayar zakat. Akibatnya, hak-hak orang miskin terabaikan. *Keempat*, kebanyakan umat Islam hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta, serta berfikir secara dogmatis. Kehidupan umat Islam diwarnai konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme.⁶⁶

Muhammadiyah berusaha menyadarkan soal beragama, dan berusaha memperbaiki kehidupan umat. Ini agar benteng umat –tak terkecuali semua lapisan masyarakat, pemuda, wanita, pelajar, dan rakyat biasa—menjadi kukuh. Untuk mencapai cita-citanya, organisasi ini mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan rapat-rapat dan tabligh untuk membicarakan masalah-masalah Islam. Organisasi ini pun mendirikan wakaf dan masjid, menerbitkan buku, brosur, surat

⁶⁶ LSAF, *Gerakan.*, hal.47-48

kabar, dan majalah. Dalam mengarahkan kegiatannya, pada masa awalnya organisasi ini tidak mengadakan pembagian tugas yang jelas antara anggota dan pengurus. Hal ini semata-mata karena keterbatasan gerak yang dimiliki Muhammadiyah.⁶⁷

Daerah persebaran Muhammadiyah mulai diperluas setelah tahun 1917. Tahun itu Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta, tepatnya di rumah K.H. Ahmad Dahlan. Saat itu, K.H. Ahmad Dahlan bisa meyakinkan peserta kongres. Sehingga, cabang-cabang Muhammadiyah di Jawa dapat diterima keberadaannya. Tahun 1920, untuk pertama kalinya, Muhammadiyah menyempurnakan anggaran dasar organisasinya. Ini dilakukan untuk menunjang kegiatan perluasan jangkauan organisasi dan kegiatan Muhammadiyah. Tahun 1920-an merupakan masa perluasan Muhammadiyah ke luar pulau Jawa. Dengan upaya yang serius, penyebaran organisasi Muhammadiyah berkembang pesat. Pada tahun 1925, organisasi ini telah memiliki 29 cabang dengan 4.000 anggota, memiliki delapan Holands Indische School (HIS, setaraf sekolah dasar), satu sekolah guru di Yogyakarta, 32 sekolah dasar lima tahun, satu Schakelschool, 14 madrasah dengan 119 guru dan sekitar 4.000 murid.⁶⁸

⁶⁷ Peacock, James L., *Gerakan*, hal. 57

⁶⁸ *ibid*, hal.59

Tahun 1927, Muhammadiyah mendirikan cabang-cabangnya di Bengkulu, Banjarmasin, dan Amuntai. Sementara itu, pada tahun 1929, pengaruh Muhammadiyah mulai tersebar di Aceh dan Makasar, dan memiliki 19.000 anggota. Meski Muhammadiyah mendapatkan pengakuan hukum dari pemerintah kolonial Belanda, tidak berarti Belanda menyenangi organisasi ini. Bahkan, sifat gerakan Muhammadiyah dicurigai bisa membangkitkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Karena itu, pemerintah Belanda merasa perlu berhati-hati terhadap gerakan kultural ini. Subsidi yang diberikan pemerintah Belanda tidak membuat Muhammadiyah selalu patuh. Hal ini antara lain terbukti dari sikap Muhammadiyah yang menentang keras undang-undang larangan sekolah liar yang dikeluarkan Belanda (*Wilde School Ordonantie*).⁶⁹

Meski menyatakan diri sebagai organisasi non-politik, Muhammadiyah tidak sama sekali menyeterilkan diri aktivitas politik. Muhammadiyah tidak melarang anggotanya untuk masuk partai politik –K.H. Ahmad Dahlan sendiri adalah anggota Syarekat Islam. Selama kurun 1945-1959, Muhammadiyah ikut mengggagas pendirian dan menjadi anggota istimewa Partai Masyumi. Pada tahun 1968, Muhammadiyah kembali memfasilitasi pendirian Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Hiruk-pikuk perpolitikan tahun 1998, menjadi perhatian Muhammadiyah. Sidang Tanwir 1998 di Semarang oleh beberapa tokoh menganjurkan kepada PP

⁶⁹ *ibid*, hal. 63

Muhammadiyah agar melakukan *ijtihad* (terobosan) politik untuk mendirikan partai politik. Sidang pleno Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada 22 Agustus 1998 memberikan izin kepada M. Amien Rais untuk melepaskan jabatan sebagai ketua PP Muhammadiyah dan selanjutnya memimpin Partai Amanat Nasional (PAN).⁷⁰ Dapat disimpulkan bahwa dalam organisasi Muhammadiyah terdapat kebebasan individu untuk tetap memilih bentuk-bentuk ekspresi sosial-politik dan pengejawantahan aktualisasi diri sepanjang memiliki argumentasi intelektual-Islami yang kuat.

A.1.2. Visi dan Misi Muhammadiyah

Landasan teologis pendirian Muhammadiyah didasarkan pada ayat yang artinya :

" Adakah di antaramu sekalian golongan-umat yang mengajak kepada Islam, memerintahkan kebajikan dan mencegah kemunkaran. Dan mereka itulah orang-orang mendapat kebahagiaan".⁷¹

Atas dasar pendalaman pada ayat tersebut, KH.Ahmad Dahlan berpandangan bahwa umat Islam harus digerakkan untuk berjuang dan beramal dengan suatu kekuatan organisasi. Sebagai gerakan keagamaan, Muhammadiyah memiliki maksud dan tujuan yang mengarahkan gerak perjuangan , menentukan besar kecilnya kegiatan serta macam-macam amal usaha Muhammadiyah. Rumusan maksud dan tujuan tersebut sejak berdirinya sampai sekarang mengalami beberapa perubahan

⁷⁰ [http// www.tempo.co.id/harian/fokus/31/2,1,9,id.html](http://www.tempo.co.id/harian/fokus/31/2,1,9,id.html) - 25k

⁷¹ QS. Ali Imran (3) : 114

redaksional, perubahan susunan bahasa, dan istilah. Sungguhpun begitu, tidak mengubah isi dan jiwanya, karena hakikatnya yang lama dan baru tetap sama.

Pertama :

Pada waktu permulaan berdirinya dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad saw kepada penduduk bumi-putra, di dalam residensi Yogyakarta.
- 2) Memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya

Kedua :

Sesudah Muhammadiyah meluas ke luar daerah Yogyakarta dan berdirinya cabang di beberapa tempat di wilayah Hindia Belanda (Indonesia), maka rumusannya disempurnakan menjadi :

- 1) Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda, dan
- 2) Memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada sekutu-sekutunya

Ketiga :

Sewaktu pemerintahan dan pendudukan facis Jepang (1942-1945), dimana segala macam dan bentuk pergerakan mendapat pengawasan yang sangat keras tak terkecuali Muhammadiyah, maka pada masa itu Jepang ikut berusaha mendikte rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah, sehingga rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah menjadi :” Sesuai dengan kepercayaan untuk mendirikan

kemakmuran bersama seluruh Asia Timur Raya di bawah pimpinan Dai Nippon, dan memang diperintahkan oleh Tuhan Allah, maka perkumpulan ini :

- 1) Hendak menyiarkan agama Islam, serta melatih hidup yang selaras dengan tuntunannya;
- 2) Hendak melakukan pekerjaan kebaikan umum;
- 3) Hendak memajukan pengetahuan dan kepandaian serta budi pekerti yang baik kepada anggota-anggotanya;

Kesemuanya itu ditujukan untuk berjaya mendidik masyarakat ramai.

Keempat

Setelah masa kemerdekaan, dalam Muktamar Muhammadiyah ke 31 di Yogyakarta tahun 1950, rumusan maksud dan tujuan dirubah dan disempurnakan sehingga lebih mendekati jiwa dan gerak yang sesungguhnya dari Muhammadiyah. Rumusan berbunyi “ Maksud dan tujuan Persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.

Kelima

Pada waktu Muktamar Muhammadiyah ke 34 yang berlangsung pada tahun 1959 di Yogyakarta rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah hasil rumusan Muktamar Muhammadiyah ke 31 disempurnakan redaksionalnya. Terhadap ‘dua kata’ yang terdapat dalam rumusan yang terdahulu, yaitu kata-kata ‘dapat mewujudkan’ diubah

menjadi 'terwujud'. Dengan perubahan tersebut akhirnya rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah yang kelima adalah sebagai berikut:

“Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.

Keenam

Muktamar Muhammadiyah ke-41 yang diselenggarakan di Kota Surakarta pada tahun 1985 tercatat sebagai Muktamar Muhammadiyah yang sangat bersejarah. Karena sesuai dengan UU Pokok Keormasmasan no. 8 tahun 1985 yang menegaskan bahwa seluruh organisasi massa (sosial) harus mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya azas organisasi. Muhammadiyah harus dengan terpaksa merubah anggaran dasarnya. Rumusan maksud dan tujuan Persyarikatan hasil Muktamar ke-41 adalah sebagai berikut: “ Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Allah Subhanahuwata’ala.

Ketujuh :

Muktamar Muhammadiyah ke 44 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 7 sampai 11 Juli 2000 dalam keputusannya telah mengembalikan Islam sebagai asas persyarikatan yang secara implisit dituangkan dalam anggaran dasar pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar, berasaskan Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan as-Sunnah”. Adapun landasan yang dipergunakan dalam mengubah asas tersebut didasarkan pada hasil sidang istimewa MPR tahun 1998 yang dalam salah satu hasil ketetapannya,

yaitu TAP MPR No.XVIII/MPR/1998 yang intinya mengembalikan fungsi pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Berarti setiap organisasi dapat dengan bebas menentukan asasnya sepanjang tidak bertentangan dengan asas atau dasar negara. Pada Muktamar Muhammadiyah yang ke-44 ini, rumusan maksud dan tujuan tidak mengalami perubahan sesuai dengan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta.

Maksud dan tujuan Muhammadiyah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Menegakkan, berarti membuat dan mengupayakan agar tetap tegak dan tidak condong apalagi roboh; yang semua itu dapat terealisasikan manakala sesuatu yang ditegakkan tersebut terletak diatas fondasi, landasan, atau asas yang kokoh dan solid, dipegang erat-erat, dipertahankan , dibela serta diperjuangkan dengan penuh konsekuen.
- 2) Menjunjung Tinggi, berarti membawa atau menjunjung di atas segala-galanya, mengindahkan serta menghormatinya.
- 3) Agama islam, yaitu Agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul-Nya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa sampai kepada Nabi penutup Muhammad saw sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang zaman, serta menjamin kesejahteraan hakiki dunia maupun ukhrawi.

- 4) Terwujudnya berarti menjadi satu kenyataan akan adanya atau akan wujudnya.
- 5) Masyarakat utama, yaitu masyarakat yang senantiasa mengejar keutamaan dan kemaslahatan untuk kepentingan hidup umat manusia, masyarakat yang selalu bersikap takzim terhadap Allah, Tuhan Yang maha Kuasa, mengindahkan dengan penuh keikhlasan terhadap ajaran-ajaran-Nya, serta menaruh hormat terhadap sesama manusia selaku mahluk Allah yang memiliki martabat ahsanu taqwin.
- 6) Adil dan Makmur, yaitu suatu kondisi masyarakat yang didalamnya terpenuhi dua kebutuhan hidup yang pokok, yaitu:
 - a) Adil suatu kondisi masyarakat yang positif dari aspek batiniah, dimana keadaan ini bilamana dapat diwujudkan secara konkret, riil atau nyata maka akan terciptalah masyarakat yang damai, aman dan tentram, sepi dari perasaan terancam dan ketakutan
 - b) Makmur, yaitu suatu kondisi masyarakat yang positif dari aspek lahiriyah, yang sering digambarkan secara sederhana dengan rumusan terpenuhinya sandang, papan, dan kesehatan. Suatu keadaan masyarakat yang makmur sejahtera, melimpah-ruah segala kebutuhan aspek materiilnya, dan sepi dari jerit tangisnya orang yang kelaparan dan kesusahan.

c) Yang diridloi Allah Subhanahu Wata'ala, artinya dalam rangka mengupayakan terciptanya keadilan dan kemakmuran masyarakat maka jalan dan cara yang ditempuh haruslah selalu bermotifkan semata-mata keridlaanAllah belaka. Membangun , memelihara dan memegang teguh agama Islam dengan rasa ketaatan melebihi ajaran dan faham-faham lainnya, untuk mendapatkan suatu kehidupan dalam diri, keluarga dan masyarakat yang sungguh adil, makmur, bahagia-sejahtera, aman-sejahtera, lahir dan batin dalam naungan dan ridla Allah SWT⁷².

A.1.3. Jaringan Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah

Jaringan organisasi muhammadiyah meliputi seluruh kepulauan Nusantara sampai mencapai luar negeri seperti Singapura, Malaysia dll. Muhammadiyah memiliki tingkatan struktural area kepengurusannya. Mulai dari tingkat wilayah, daerah, cabang sampai ke ranting. Jaringan organisasi tersebut dan jumlahnya seperti dalam tabel 1.A.1.3 berikut ini :

Tabel 1.A.1.3. Jaringan Organisasi Muhammadiyah


Tingkat Struktur	Jumlah
Pimpinan Wilayah (PW)	26
Pimpinan Daerah (PD)	295
Pimpinan Cabang (PC)	2.461
Pimpinan Ranting (PR)	6.098

Sumber : [http:// www.muhammadiyah.or.id/indonesia/amal.php](http://www.muhammadiyah.or.id/indonesia/amal.php) - 9k

⁷² Pasha, Mustafa Kamal dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah*, hal. 80-84

Selain jaringan organisasi dengan tingkat struktur kepengurusan seperti tersebut di atas, Muhammadiyah juga memiliki sejumlah organisasi otonom yang merupakan wadah yang menghimpun anggota berdasarkan tipolgi tingkat pendidikan, jenis kelamin dan jenis kegiatan. Organisasi otonom tersebut seperti berikut ini⁷³ :

Tabel.2.A.1.3.Organisasi Otonom Muhammadiyah

Organisasi	
Pemuda Muhammadiyah	
Aisyiyah	
Nasyiatul Aisyiyah	
Hizbul Wathan	
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah	
Ikatan Remaja Muhammadiyah	
Tapak Suci	

Sumber: [http// www.muhammadiyah.or.id/indonesia/amal.php](http://www.muhammadiyah.or.id/indonesia/amal.php) - 9k

Potensi amal usaha Muhammadiyah meliputi pendidikan, Rumah Sakit, Lembaga Keuangan, Koperasi dan Panti Asuhan. Uraian secara terinci, sebagaimana dalam tabel.3.A.3. berikut ini :

**Tabel.3. A.1.3. Amal Usaha Muhammadiyah
Bidang Pendidikan Dasar & Menengah**

Jenis Pendidikan	Jumlah
Taman Kanak-kanak	3.962 buah
Sekolah Dasar	940 buah
Madrasah Diniyah & Ibtidaiyah	1.332 buah
Sekolah Menengah Pertama & yang sederajat	2.143 buah
Sekolah Menengah Umum & yang sederajat	979 buah
Sekolah Kejuruan & yang sederajat	101 buah
Muallimin/ Muallimat	13 buah
Pondok Pesantren	64 buah

Sumber : [http// www.muhammadiyah.or.id/indonesia/amal.php](http://www.muhammadiyah.or.id/indonesia/amal.php) - 9k

⁷³ [http// www.muhammadiyah.or.id/indonesia/amal.php](http://www.muhammadiyah.or.id/indonesia/amal.php) - 9k

**Tabel.4. A.1.3. Amal Usaha Muhammadiyah
Bidang Pendidikan Tinggi**

Jenis	Jumlah
Universitas	26 buah
Sekolah Tinggi & yang sederajat	50 buah
Akademi & sederajat	57 buah

Sumber : [http:// www.muhammadiyah.or.id/indonesia/amal.php](http://www.muhammadiyah.or.id/indonesia/amal.php) - 9k

**Tabel.5. A.1.3. Amal Usaha Muhammadiyah
Bidang Kesehatan**

Jenis	Jumlah
RS Muhammadiyah	22 buah
RSB Muhammadiyah	10 buah
Rumah Bersalin	69 buah
BKIA – Poliklinik & sejenisnya	174 buah
Institusi Pendidikan Kesehatan (AKPER, AKZI, SPK, Farmasi, Bidan, dll.)	70 buah

Sumber : [http:// www.muhammadiyah.or.id/indonesia/amal.php](http://www.muhammadiyah.or.id/indonesia/amal.php) - 9k

Tabel.6. A.1.3. Amal Usaha Bidang Kesejahteraan Sosial

Jenis	Jumlah
Panti Asuhan Yatim	198 buah
Panti Jompo	18 buah
Bakesos	22 buah
Santunan Keluarga dan sejenisnya	207 buah

Sumber : [http:// www.muhammadiyah.or.id/indonesia/amal.php](http://www.muhammadiyah.or.id/indonesia/amal.php) - 9k

**Tabel.7 A.I.3. Amal Usaha Muhammadiyah
Bidang Ekonomi**

Jenis	Jumlah
Bank Perkreditan Rakyat	5 buah
Biro Perjalanan	2 buah
BMT	190 buah
Koperasi	808 buah
Retail & KATAM, Distribusi, Permodalan	

Sumber : [http:// www.muhammadiyah.or.id/indonesia/amal.php](http://www.muhammadiyah.or.id/indonesia/amal.php) - 9k

A.1.4. Struktur Organisasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2000-2005

Struktur organisasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam kepengurusan periode 2000-2005 berdasarkan sidang pleno tanggal 24 Juli 2000 yang gambarannya seperti berikut ini⁷⁴ :

Tabel.1.A.1.4
Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Periode 2000-2005

Jabatan	Nama
Ketua:	Prof. Dr. H. A. Syafii Marif
Wakil Ketua:	Prof. Drs. H.A. Malik Fadjar, MSc Dr. H.M. Dien Syamsuddin Drs. H.A. Rosyad Saleh Prof. DR. H.M. Amin Abdullah
Sekretaris:	Drs. H. Haedar Nashir, MSi Drs. H. M. Goodwill Zubir
Wakil Sekretaris:	Dr. H.A. Munir Mulkhan Drs. H. Hadjiyanto Y.Thohari, MA
Bendahara:	Drs. H. M. Syukriyanto AR, Mhum Drs. H. M. Husni Thohyar, MAg.
Pembina Bidang Pendidikan dan Kebudayaan :	Dr. H. Yahya Muhaimin
Pembina Bidang Politik , HAM dan Hubungan Internasional:	Prof. Dr. H. Ismail Sunny, MCL
Pembina Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat :	Prof. Drs. H. M. Dawam Rahardjo
Pembina Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat:	-Dr. H.A. Watik Pratiknya
Pembina Bidang Organisasi dan Manajemen Persyarikatan:	-H.M. Muchlas Abror

⁷⁴ "Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2000-2005", *Suara Muhammadiyah*, No. 12/TH. Ke 85. (2000) hal.1-7

Pembina Bidang Tarjih dan Tajdid :	-Prof Drs H Asjmuni Abdurrahman
Pembina Bidang Kaderisasi dan Organisasi Otonom:	-Ir. H.M. Dasron Hamid, MSc.
Pembina Bidang Tabligh dan Kehidupan Islami :	-Drs. H. Muh. Muqoddas, Lc, MAG.

Suara Muhammadiyah, No. 12/TH.Ke 85. (2000) hal.1-7

Tabel 2.A.1.3
Pengurus Majelis/Lembaga Pembantu
PP Muhammadiyah Periode 2000-2005

Majelis/Lembaga	Nama Ketua
Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam :	Drs. H. Syamsul Anwar, MA
Majelis Tabligh & Da'wah :	Drs.H.Yunahar Ilyas, Lc Mag
Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan :	Dr. H. Zamroni
Majelis Pendidikan Dasar Menefngah :	Prof. Dr. H. Yunan Yusuf
Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat :	Dr. H. Sudibjo Markus
Majelis Wakaf & Kehartabendaan:	H. Ghufron Hamal, SH
Majelis Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani :	Drs. Khoiruddin Bashori, MSi
Majelis Pengembangan Ekonomi Rakyat:	Dr. H. Amin Azis
Lembaga Hikmah:	Dr. H. Bachtiar Effendy
Lembaga Hubungan Luar Negeri:	Drs. Imam Addaruqutni, MA
Lembaga Seni dan Budaya:	Drs. H. Choirul Umam
Lembaga Penegakan Supermasi Hukum dan Hak Asasi Manusia :	Firman Noor, SH
Lembaga Pemberdayaan Buruh, Tani, dan Nelayan :	Dr. H. Moeslim Abdurrahman, MA
Lembaga Pengembangan Tenaga Profesi:	Prof. Dr. H. Syafri Sairin

Suara Muhammadiyah. No. 12/TH.Ke 85. (2000) hal.1-7

A.1.5. Program Kerja Muhammadiyah 2000-2005

Perhatian Muhammadiyah pada masalah ekonomi mulai serius sejak periode kepemimpinan Ashar Basyir dengan program pengembangan kewiraswastaan, selanjutnya program tersebut semakin mendapat perhatian pada periode kepemimpinan Amien Rais. Pada periode tersebut Amien Rais didampingi oleh ekonom Dawam Rahardjo memprogramkan pengembangan basis ekonomi dan pada masa kepemimpinan Syafi'i Maarif program tersebut semakin fokus dan tegas melalui SK dimana Badan Usaha Milik Muhammadiyah didirikan dengan resmi melalui majelis ekonomi Muhammadiyah. Perusahaan tersebut dikelola secara profesional dengan nama PT.Solar Internasional.

Program kerja Muhammadiyah memasuki masa kepemimpinan periode sekarang dapat dilihat dari konsep program yang telah dirumuskan oleh tim penyusun pada sidang tanwir di Bandung pada bulan Desember 1999. Program Muhammadiyah periode 2000-2005 menunjukkan beberapa perhatian pada hal-hal yang belum disentuh sebelumnya seperti pada pengelolaan bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat marjinal (miskin), dan Her-inventarisasi wakaf dalam rangka produktivitas dan kordinasi yang baik. Perhatian pada hal-hal tersebut diatas menunjukkan bahwa Muhammadiyah senantiasa mengikuti perkembangan.

Beberapa point penting dalam uraian naskah/konsep program periode 2000-2005 yang disusun oleh suatu tim yang telah disidangkan pada sidang Tanwir di Bandung bulan November 1999 seperti berikut ini.

1). Program Konsolidasi Gerakan

a). Pelembagaan Visi dan Misi Gerakan

- (a). Melembagakan (institusionalisasi) visi dan misi Muhammadiyah sebagai perwujudan penerapan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dalam seluruh proses dan sistem penyelenggaraan dakwah, pengelolaan organisasi dan amal usaha Persyarikatan di berbagai tingkatan (struktur) melalui perencanaan – perencanaan strategis
- (b). Memasyarakatkan visi dan misi Muhammadiyah di kalangan warga dan pimpinan Persyarikatan di berbagai tingkatan (Pimpinan Persyarikatan, Majelis, Badan, Lembaga, Organisasi Otonom, dan Lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah) melalui berbagai media dan kegiatan yang terpadu dengan konsolidasi organisasi dan kaderisasi dalam Muhammadiyah.
- (c). Meningkatkan keteladanan para pimpinan Persyarikatan dan Amal Usaha di berbagai tingkatan sebagai wujud integritas dalam mengembangkan dan mengamalkan visi dan misi Muhammadiyah di lingkungan masing-masing.

- (d). Menyusun dan menerapkan konsep Pedoman Kehidupan Islami dalam Muhammadiyah yang di amanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memimpin pelaksanaannya
- (e). Melaksanakan pembinaan visi dan misi Muhammadiyah melalui pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan program-program /paket-paket dan metode yang sistematis dan berkualitas di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah.

2). Konsolidasi Organisasi

- (a). Meningkatkan dan menggerakkan fungsi dan keberadaan Pimpinan Ranting Muhammadiyah sebagai basis dan ujung tombak gerakan di tingkat massa/umat dibawah koordinasi kepemimpinan Cabang, Daerah, dan Wilayah secara terpadu dan dinamis dalam menyongsong tantangan-tantangan baru dalam kehidupan nasional dan global
- (b). Meningkatkan kemandirian dan inisiatif Pimpinan Muhammadiyah di tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting dalam mengantisipasi /menghadapi era otonomi pemerintah daerah sehingga Muhammadiyah di tempat masing-masing dapat mengambil peranan positif dan aktif dalam percaturan reformasi dan pembangunan daerah.

- (c). Memperkuat kinerja, efektivitas, dan efisiensi kepemimpinan dan pengelolaan organisasi di seluruh tingkatan pimpinan Persyarikatan melalui berbagai pembenahan, perbaikan, dan penyempurnaan yang benar-benar dirasakan hasil dan manfaatnya untuk mendinamisasi gerakan Muhammadiyah antara lain pembenahan posisi dan fungsi sekretariat yang profesional dan efektif dalam mendukung keberhasilan gerakan dan program persyarikatan.
- (d). Mengembangkan efektifitas, efisiensi dalam pembentukan Majelis, Badan, Lembaga, dan unit-unit dalam persyarikatan dengan prinsip melibatkan personil yang benar-benar memiliki komitmen, idealisme, kesediaan untuk berkorban, wawasan, dan kemampuan secara lebih selektif.
- (e). Mengembangkan fungsi - fungsi manajemen organisasi secara makin efektif dan efisien seperti perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian termasuk dalam kordinasi antar Majelis, Badan, Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha disertai dengan penataan organisasi diberbagai lini yang benar-benar menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan yang dinamik dan produktif dalam mencapai tujuannya.

- (f) Meningkatkan kualitas anggota pimpinan Persyarikatan dalam pemahaman keislaman, wawasan pemikiran, keteladanan dan komitmen, dan kemampuan profesional di berbagai unit dan tingkatan melalui refreshing, up-grading, job training, dialog dan forum, pengajian-pengajian, dan kegiatan sejenis yang pelaksanaannya dikordinasikan dibawah tanggung jawab badan yang menangani perkaderan .
- (g) Melaksanakan penyegaran (regenerasi) kepemimpinan di setiap tingkatan yang mampu memadukan komitmen pada visi dan misi , *al-akhlak al-karimah*, pengalaman berorganisasi di lingkungan Muhammadiyah, kaderisasi dan keteladanan diri, wawasan dan pikiran, keahlian, ketulusan dan tanggung jawab serta kemauan berkorban (*jihad fi sabilillah*), dan faktor-faktor kepentingan organisasi guna membangun kepemimpinan yang stabil dan produktif dalam Muhammadiyah.
- (h) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi komunikasi dan pelayanan informasi di seluruh jajaran Persyarikatan sebagai bagian penting dalam pengelolaan organisasi dan mengembangkan gerakan Muhammadiyah.
- (i) Meningkatkan fungsi-fungsi dan kelengkapan pengadaan data dan informasi mengenai berbagai aspek dan kepentingan

Muhammadiyah melalui bank data yang dikelola oleh Lembaga Pengkajian dan Penelitian bekerjasama dengan berbagai fihak di dalam maupun diluar persyarikatan.

- (j) Meningkatkan pemberdayaan organisasi dan gerakan sehingga mampu membangun kemandirian dengan tetap menggalang kerjasama kesetaraan.

3). Organisasi Otonom Muhammadiyah

- (a) Meningkatkan fungsi organisasi otonom Muhammadiyah sebagai wahana perkaderan, efektivitas dan efisiensi kegiatan persyarikatan, dinamika dan pengembangan serta pelaksana dan pelangsung amal usaha Muhammadiyah melalui berbagai saluran sehingga kehadiran dan keberadaannya benar-benar menjadi pilar gerakan Muhammadiyah⁷⁵.
- (b) Memperkuat posisi dan peran Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) di sekolah-sekolah Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan kewajiban bagi para pimpinan perguruan Muhammadiyah tersebut untuk membinanya sehingga menjadi media perkaderan Muhammadiyah yang efektif dan strategis

⁷⁵ "Konsep Program Muhammadiyah Periode 2000-2005 (4)", *Suara Muhammadiyah*, No. 10/TH.Ke 85. (2000) hal.28-29

- (c) Memberikan prioritas dan peluang yang terbuka bagi kader-kader dari organisasi otonom untuk berkiprah dan meningkatkan posisi serta peran dalam berbagai struktur kepemimpinan persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah sebagai faktor pengembangan misi dan kelangsungan hidup gerakan yang didukung oleh kemampuan-kemampuan objektif di berbagai bidang kehidupan
 - (d) Meningkatkan dukungan dana dan fasilitas bagi organisasi otonom Muhammadiyah untuk mengembangkan aktivitasnya dalam melaksanakan misi persyarikatan
 - (e) Mendorong organisasi-organisasi otonom Muhammadiyah untuk mengembangkan kemandirian sehingga mampu mengelola dan meningkatkan posisi dan perannya dalam kehidupan umat dan masyarakat yang semakin dinamik dan kompetitif.
4. Kerjasama Kelembagaan
- (a) Pimpinan Persyarikatan dengan Majelis, Badan, Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha di berbagai tingkatan mengembangkan inisiatif dan meningkatkan peran aktif dalam membangun jaringan kerja (net work) dan kerjasama di bidang pengembangan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pengembangan masyarakat dan program-program lainnya dengan pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), lembaga-

lembaga pendidikan dan kemasyarakatan, dan berbagai filial luar sesuai dengan kepentingan dan prinsip organisasi.

- (b) Mengambil prakarsa untuk mengembangkan komunikasi dan kerja sama khusus dengan organisasi – organisasi Islam seperti Nahdhatul Ulama, Al-Washliyah, Al-Khairat, Hidayatullah, Persatuan Islam, Dewan Islamiyah Indonesia (DII) , dan lain-lain yang diarahkan pada penciptaan ukhuwah yang makin kokoh dan produktif dalam berbagai bentuk program bersama yang bersifat praksis (ide dan aksi) untuk kejayaan Islam kaum muslimin serta kemaslahatan bangsa.

5. Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri

- (a) Membuka hubungan kerjasama secara aktif dengan lembaga-lembaga dan pemerintah di Timur Tengah untuk pengembangan program-program sosial-ekonomi, pendidikan, dan kemasyarakatan selain kerjasama dalam program yang selama ini dikembangkan.
- (b) Mengembangkan/meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dan luar negeri untuk program-program pengembangan kualitas sumberdaya manusia seperti untuk studi di luar negeri (pendidikan), kesehatan, dan pengembangan masyarakat sesuai dengan prinsip persyarikatan

- (c) Mengembangkan dan memperluas kerjasama dan peningkatan keberadaan jamaah Muhammadiyah di luar negeri dalam berbagai bentuk program yang produktif.

6. Dana Persyarikatan

- (a) Pimpinan Persyarikatan di setiap tingkatan meningkatkan usaha – usaha penggalan dana yang lebih produktif seperti melalui bermacam-macam Badan Usaha Milik Muhammadiyah yang bergerak di berbagai bidang kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan secara langsung, selain melalui usaha-usaha yang selama ini telah dilakukan sehingga aliran dana makin besar untuk membiayai program dan gerakan persyarikatan
- (b) Pimpinan persyarikatan lebih terpadu dan efektif dalam menggerakkan iuran anggota, pengumpulan dana zakat/infaq/shadaqah, mobilisasi dana abadi, dan penarikan dana sejenis lainnya yang selama ini ditempuh untuk kepentingan pendanaan kegiatan-kegiatan persyarikatan.
- (c) Pimpinan Persyarikatan di bawah koordinasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dituntut melakukan perencanaan yang matang pada lima tahun periode ini dalam menyusun usaha-usaha penggalan dan pemanfaatan dana secara terprogram sehingga

dapat memberikan dukungan bagi keberhasilan gerakan dan pelaksanaan program persyarikatan.

2). Program per Bidang

a). Pembinaan Keagamaan dan Pengembangan Pemikiran Islam

(a) Mengintensifkan pembinaan aqidah , ibadah, dan akhlaq dikalangan warga Muhammadiyah dan kaum muslimin sesuai dengan Tuntunan Tarjih melalui pengajian-pengajian, kegiatan-kegiatan takhasus, kursus-kursus, buku-buku paket, siaran-siaran media elektronik dan cetak, dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan tepat sasaran

(b) Majelis Tarjih menyusun buku-buku pedoman /paket tuntutan ibadah, do'a-do'a, dan aspek-aspek pembinaan ajaran Islam yang lainnya yang bersipat praktis dan mudah dipahami oleh masyarakat awam sebagai media memperluas jangkauan pengamalan Islam dalam kehidupan umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya

(c) Menyusun Tafsir Al-Qur'an dan konsep ad-Dienul Islam yang komprehensif yang dapat menjadi pedoman bagi pemahaman anggota Muhammadiyah dan rujukan bagi masyarakat luas mengenai aspek-aspek ajaran Islam yang menyeluruh.

- (d) Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih secara aktif dan sistematis melaksanakan pembahasan-pembahasan masalah-masalah keagamaan (bahtsul masail) dalam berbagai aspek terutama yang terkait dengan masalah-masalah aktual sebagai pedoman pemahaman dan pengamalan Islam bagi warga Muhammadiyah maupun kaum muslimin.
- (e) Dalam upaya meningkatkan peran Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid maka Pimpinan Persyarikatan dibawah tanggung jawab Majelis Tarjih dengan melibatkan berbagai Majelis, Badan, Lembaga, dan institusi-institusi yang terkait yang terkait dituntut untuk memberikan masukan-masukan pemikiran dan pedoman – pedoman , keagamaan dalam menyikapi dan menghadapi tuntutan-tuntutan perkembangan zaman.
- b). Tabligh dan Penyiaran Islam
- (a) Pemanfaatan saluran-saluran non-konvensional seperti televisi, radio, dan berbagai jenis media cetak secara profesional untuk memperluas jaringan dan jangkauan tabligh ke berbagai lapisan sosial di seluruh penjuru wilayah dengan dukungan para muballigh yang berkualitas.
- (b) Mengintensifkan pembinaan aqidah , ibadah, dan akhlaq dikalangan warga Muhammadiyah dan kaum muslimin sesuai

dengan Tuntunan Tarjih melalui pengajian-pengajian, kegiatan-kegiatan takhasus, kursus-kursus, buku-buku paket, siaran-siaran media elektronik dan cetak, dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan tepat sasaran

c). Pengkaderan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Menyusun konsep pengkaderan, prioritas pengembangan studi lanjut Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendidikan secara terpadu dalam lingkungan persyarikatan termasuk amal usaha yang sesuai dengan sasaran, Proses seleksi yang memprioritas penempatan kader dalam aktivitas Muhammadiyah yang disesuaikan dengan kemampuan objektif, Penerbitan publikasi, pedoman-pedoman, penyelenggaraan forum Ideopolitor, pengembangan pusat studi , pendidikan dan pelatihan Muhammadiyah yang dilaksanakan secara sistematis⁷⁶.

d). Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan

Mengkaji masalah-masalah/ isu-isu strategis dan aktual, melaksanakan penelitian-penelitian strategis dan menyusun dan

⁷⁶ "Konsep Program Muhammadiyah Periode 2000-2005 (5)", *Suara Muhammadiyah*, No. 11/TH.Ke 85. (2000) hal.28-29

mengembangkan data base mengenai anggota,pimpinan dan amal usaha persyarikatan secara menyeluruh.

e). Pengembangan Kepustakaan, Informasi, dan Publikasi

Mengadakan perpustakaan Muhammadiyah yang representatif, menerbitkan almanak, leaflet, dan berbagai media lainnya.

f). Pendidikan

Meliputi pengembangan pendidikan secara umum dari segi kualitas, kaderisasi , keunggulan masa depan serta antisipasi persiangan yang keras. Pengembangan pendidikan dasar dan menengah, meliputi kualitas, kesejahteraan guru, memperkuat peran Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), mengembangkan jaringan untuk mengatasi kesenjangan sekolah unggul dan non unggul. Pendidikan tinggi meliputi hal yang hampir sama dengan program pendidikan dasar dan menengah. Pada pendidikan tinggi akan diupayakan kerjasama yang kuat dengan luar negeri untuk tujuan pengembangan studi lanjut dosen pada khususnya dan pengembangan kualitas PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah) secara keseluruhan⁷⁷.

g). Pengembangan Sosial-Budaya dan Peradaban Islam

⁷⁷ "Konsep Program Muhammadiyah Periode 2000-2005 (6)", *Suara Muhammadiyah*, No. 12/TH.Ke 85. (2000) hal.28-29

Pengembangan apresiasi sosial-budaya dalam cakupan khusus seperti kesenian, kesusastraan, dan pariwisata. Untuk tujuan tersebut akan diupayakan produksi film, buku, dan seni pertunjukan yang membawa pesan profetik (risalah) dalam setting kebudayaan Islam ditengah kehidupan masyarakat modern yang penuh tantangan, kekerasan dan krisis ruhaniah.

h) Kesehatan dan Kualitas Hidup

Mengembangkan pendidikan tenaga kesehatan baik jumlahnya maupun mutu sesuai dengan kebutuhan dalam sistem perencanaan yang menyeluruh. Mengembangkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) dan pembinaan kesehatan umat yang diarsakan langsung oleh masyarakat luas. Meningkatkan penyuluhan-penyuluhan untuk kesehatan masyarakat seperti penanggulangan HIV/AIDS, bahaya merokok, pemberantasan kecanduan miras (minuman keras), peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas gizi masyarakat, dan sebagainya yang pelaksanaannya dapat bekerjasama secara terpadu dengan Majelis tabligh dan Aisyiyah.

i). Pengembangan Masyarakat

Meningkatkan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan hukum meliputi segemn sosial yang beragam (buruh, nelayan, tani, suku terasing, cacat mental dan fisik, Jompo, anak

terlantar dan lain-lain. Mengembangkan program unggulan Bina Masyarakat Sejahtera (Qoryah Thoyyibah), Balai Pendidikan Keterampilan (BPKM), Bantuan Penanggulangan Bencana Alam, pusat-pusat Rehabiliatsi. Melaksanakan pelatihan-pelatihan Motivator untuk pengembangan Masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial di berbagai tingkatan.

j). Ekonomi dan Kewiraswastaan

Mengembangkan pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep pengembangan ekonomi yang berorientasi kerakyatan dan keislaman seperti mengenal etos kerja, etos kewiraswastaan, etika bisnis, etika manajemen, masalah monopoli-ologopoli-kartel, keuangan dan permodalan, teori ekonomi Islam, etika profesi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan aktual yang terjadi dalam dunia ekonomi. Pengembangan program pemberdayaan ekonomi rakyat, pengembangan bank sosial Muhammadiyah, koperasi dan Badan usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) yang konkrit dan produktif. Intensifikasi pusat data ekonomi dan pengusaha Muhammadiyah yang dapat mendukung pengembangan program-program ekonomi. Menggalang kerjasama dan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan program ekonomi Muhammadiyah.

k). Pengembangan Peran Politik

Melaksanakan kajian-kajian intensif dan sistematis terhadap perkembangan aktual sebagai masukan untuk mengantisipasi dan pengambilan sikap/kebijakan dalam menghadapi masalah-masalah bangsa dan negara. Menyusun konsep etika politik bekerja sama dengan Lembaga Hikmah dan Kemasyarakatan dengan Majelis tarjih. Melaksanakan pendidikan politik bekerjasama dengan lembaga hikmah dan Kemasyarakatan dengan Majelis/Badan Pendidikan Kader Muhammadiyah. Melakukan Advokasi terhadap ketidakadilan dan kekerasan politik. Meningkatkan pemanfaatan media massa cetak dan elektronik sebagai media komunikasi politik yang terbuka dan mengartikulasikan aspirasi politik Muhammadiyah, umat Islam, dan masyarakat luas yang mengarah pada penciptaan kondisi politik yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemaslahatan hajat hidup publik.

l). Peningkatan Peran Perempuan dan Keluarga

Membuat proyek-proyek percontohan Keluarga sakinah di berbagai lingkungan cabang/ranting. Pembinaan keluarga-keluarga dhu'afa, mu'allaf dan keluarga-keluarga yang membutuhkan santunan sosial ekonomi dan nilai-nilai keislaman. Pendidikan keluarga yang mengarah pada peningkatan penghargaan dan penghormatan

terhadap harkat martabat dan hak-hak kaum perempuan yang didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adālah*), kesetaraan (*al'musawah*), harmoni dan keseimbangan (*tawāzun*), toleransi (*tasāmuh*), kemuliaan, kehormatan dan kasih sayang (*tarahum*), dan nilai-nilai *al-akhlaq al-karimah* dalam satu kesatuan hidup untuk tegaknya Keluarga Sakinah dan Masyarakat Utama yang membawa *rahmatan lil-'alamin*.

m). Peningkatan Kualitas Guru

Mengembangkan program balai latihan kerja, kewiraswastaan, dan pengembangan masyarakat untuk ikut serta memecahkan masalah pengangguran dan pemenuhan lapangan pekerjaan di kalangan generasi muda baik yang dikembangkan oleh Majelis/Badan/Lembaga/Organisasi Otonom terkait maupun kerjasama dengan berbagai pihak diluar persyarikatan. Mengembangkan usaha-usaha pembinaan dan resosialisasi bagi kalangan generasi muda yang menghadapi masalah – masalah mental dan sosial baik preventif (pencegahan) maupun kuratif (tindakan perbaikan) melalui Majelis/Badan/Lembaga/Organisasi Otonom yang terkait.

o). Pembinaan Supremasi Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia

Selain mendukung berbagai upaya penegakan supremasi hukum juga melakukan advokasi-advokasi hukum terhadap kasus-kasus yang

dialami oleh masyarakat bawah dan memerlukan perlindungan hukum. Memasyarakatkan budaya taat hukum melalui sosialisasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk tegaknya supremasi dan budaya hukum.

p). Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kelautan

Memasyarakatkan gerakan hidup sehat dan sadar lingkungan. Melaksanakan dan mengambil peran aktif dalam gerakan-gerakan dan pengembangan program/kegiatan pelestarian lingkungan hidup baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pemerintah dan LSM(Lembaga Swadaya masyarakat) yang bergerak dalam pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup.

q). Pengelolaan Wakaf dan Harta Benda

Melaksanakan pendataan kembali (Her-Inventarisasi) dan sertifikasi seluruh tanah milik persyarikatan baik tanah wakaf maupun non wakaf secara sistematis dengan sistem “estafet” dan prosedur hukum yang berlaku. Koordinasi dilakukan dari Pimpinan Pusat sampai ke Pimpinan Ranting. Melaksanakan penyuluhan, bimbingan, pembinaan dan pelatihan mengenai sistem inventarisasi dan sertifikasi tanah wakaf dan non wakaf milik persyarikatan secara terprogram dan terkoordinasi. Menyusun data base dan “peta tanah” serta harta benda milik persyarikatan di setiap tingkatan pimpinan.

Menyusun konsep dan pelaksanaan mekanisme distribusi dan pemanfaatan tanah dan aset kehartabendaan milik Persyarikatan secara terkordinasi⁷⁸.

A.1.6. Konsep Gerakan Pengembangan Ekonomi Muhammadiyah

Beberapa Persoalan internal yang dihadapi organisasi Muhammadiyah menjadi latar belakang untuk mewujudkan konsep ekonominya. Persoalan – persoalan yang dihadapi oleh Muhammadiyah sebagai lembaga yang memiliki aset besar saat ini seperti dalam tabel 1.A.1.6 berikut ini

Tabel. 1.A.1.6
Latar Belakang Persoalan Internal Muhammadiyah
Membangun Ekonomi Persyarikatan

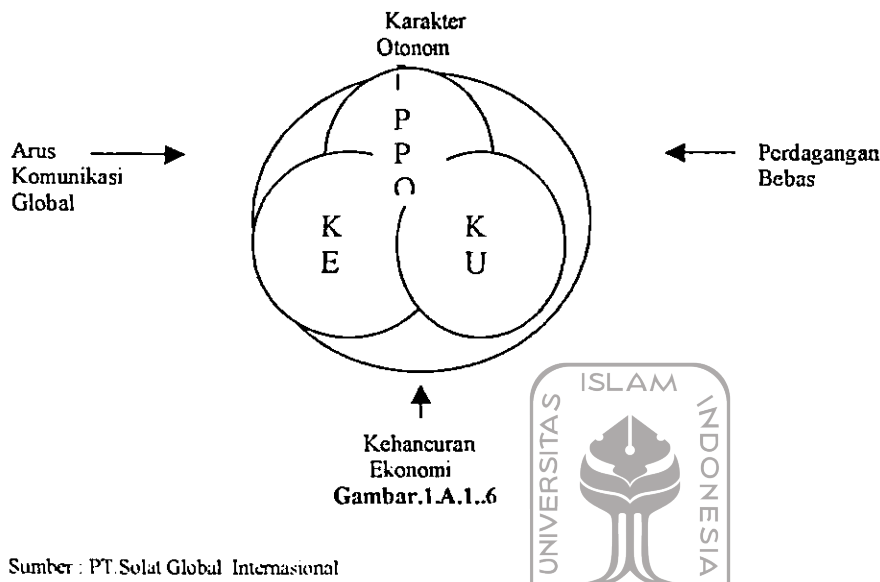
Tantangan	Persoalan
Sebagai Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Iuran Tidak Jalan • Data anggota tidak ada • Hubungan Komunikasi dan informasi tidak berjalan efektif • Pelayanan untuk anggota tidak efektif
Sebagai Produsen	<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan Modal • Kekurangan pasar
Sebagai Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> • Membeli harga yang sama dengan di pasar • Tidak mempunyai daya tawar yang dahsyat (bargaining position)

Sumber : PT.Solat Global Internasional

Berpijak dari tantangan internal dan kalkulasi ekonomis, Muhammadiyah membuat konsep untuk menggali potensi ekonomi warganya. Gambaran pemahaman

⁷⁸ “Konsep Program Muhammadiyah Periode 2000-2005 (7)”, *Suara Muhammadiyah*, No. 10/TH.Ke 85. (2000) hal.28-29

Muhammadiyah terhadap masalah-masalah ekonomi dapat dilihat seperti gambar berikut ini :



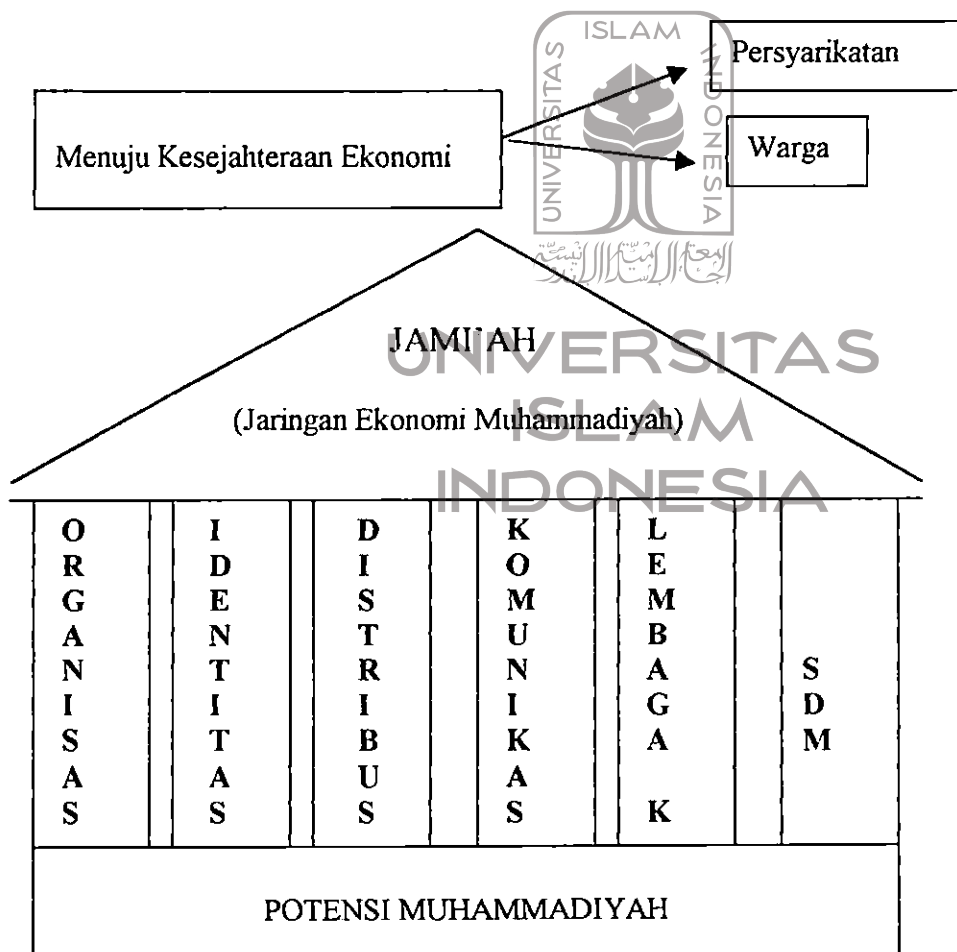
Sumber : PT.Solat Global Internasional

Karakter otonom, arus komunikasi global, perdagangan bebas dan kehancuran ekonomi merupakan masalah dan ancaman yang serius terhadap organisasi, umat, dan bangsa secara keseluruhan. Melalui sinergi dan produktivitas yang dihasilkan sebuah jaringan ekonomi akan mampu menggalang segenap potensi yang dimiliki Muhammadiyah dan memanfaatkan peluang dari perubahan yang dihadapi, sehingga pada akhirnya jaringan akan memberikan dampak kekuatan pembiayaan organisasi (PPO), kesejahteraan umat (KU), dan kekuatan ekonomi bangsa (KE).

Untuk menuju kesejahteraan ekonomi dan pemberdayaan umat Muhammadiyah memulai dari menggali dan menggalang potensi ekonomi warganya. Dukungan manajemen organisasi yang telah berjalan yang tentunya akan diperkuat oleh identitas resmi (access card) akan dibangun jalur distribusi dan komunikasi yang

terpadu. Muhammadiyah sadar bahwa untuk mengembangkan ssektor ril (bisnis) dengan baik maka peran lembaga keuangan menjadi mutlak diperlukan. Tentunya dengan tingkat kesiapan SDM yang baik. Melalui tingkat kesiapan variabel tersebut jaringan ekonomi Muhammadiyah (Jami'ah) diharapkan dapat menciptakan tingkat kesejahteraan persyarikatan dan warga sebagai dalam gambar 2.A.1.6 berikut ini :

Gambar 2.A.1.6
Potensi Muhammadiyah dalam
Pemberdayaan Ekonomi Ummat



Sumber : PT.Solat Global Internasional

Berdasarkan SK PP Muhammadiyah No. 80/SK-PP/IV/1.b/1999 tentang pembentukan PT. Solar Global Internasional dan SK PP Muhammadiyah No. 36/SK-PP/IV-C/1.c/2000 tentang pelaksanaan program KATAM (Kartu anggota Muhammadiyah) Muhammadiyah berihktiar untuk membangun ekonominya dengan mendirikan badan usaha milik Muhammadiyah (BUMM)⁷⁹.

Melalui badan ini yang ditangani langsung oleh Majelis Ekonomi Muhammadiyah diharapkan bahwa secara eksternal Muhammadiyah berperan aktif terhadap pemberdayaan ekonomi khususnya warganya sendiri dan masyarakat pada umumnya. Kemudian secara internal, Muhammadiyah berkeinginan kuat membiayai berbagai aktivitas organisasi secara mandiri dan terkordinir dengan lebih baik. Tugas-tugas yang diembang oleh badan ini adalah menghimpun modal, menggalang peluang-peluang usaha, mensinergikan BUMM yang ada baik yang berbentuk Koperasi, Yayasan maupun perseroan, dan mewakili Muhammadiyah dalam negosiasi bisnis serta memikirkan sumber daya manusia.

Melalui kerjasama bank BNI⁴⁶ Muhammadiyah mewujudkan kartu anggota multiguna yang diberi nama KATAM (kartu anggota Muhammadiyah). Fungsi kartu ini membangun data base, alat pengenalan keanggotaan dan alat pembayaran. Manfaat KATAM dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

⁷⁹Presentasi disampaikan dalam acara Seminar Sehari Potensi Ekonomi Muhammadiyah, diselenggarakan oleh Majelis Ekonomi Muhammadiyah Yogyakarta, di Yogyakarta, tanggal 29 Mei 2000

Tabel 2.A.1.6
Manfaat KATAM bagi Organisasi & Anggota

Bagi/ Jangka	Pendek (1-3 tahun)	Menengah (3-5 tahun)	Panjang (5 tahun keatas)
Pemegang KATAM	<ul style="list-style-type: none"> • Kartu tanda anggota Muhammadiyah • Kartu ATM • Kartu untuk bayar Listrik, Telepon, Transper (phoneplus) • Kartu untuk discount • Santunan Rawat Inap • Santunan Kematian • Santunan Kecelakaam 	<ul style="list-style-type: none"> • Turut serta membangun jaringan ekonomi Muhammadiyah • Akan mendapatkan harga spesial pada Toko berlogo KATAM (MARKAZ) • Tabungan Haji, santunan hari tua, santunan pendidikan • Dapat memasarkan barang produksi melalui jaringan KATAM dan Jami'ah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kredit usaha • Fasilitas-fasilitas non finansial seperti sebagai kartu absensi, tandu tanda masuk (aces door)
Persyarikatan Muhammadiyah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan anggota • Iuran anggota bisa masuk dengan teratus 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Program distribusi (MARKAZ) • Memangun jaringan ekonomi Muhammadiyah • Membangun Bargaining Position dengan perusahaan lokal dan asing 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan dirinya sebagai kekuatan ekonomi Indonesia • Pembiayaan organisasi untuk kegiatannya • Program kredit usaha • Berkembangnya badan usaha Muhammadiyah
Pengurus Wilayah & Amal Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Iuran • Aktifitas Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kredit pengembangan usaha • Pengembangan kegiatan ekonomi wilayah & amal usaha • Menciptakan lapangan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Kredit pengembangan usaha yang lebih luas

Sumber : PT.Solat Global Internasional

Peluang pengembangan jaringan ekonomi ini, didasarkan pada perkembangan aset Muhammadiyah dari sejak berdirinya hingga tahun 2000 telah memiliki aset organisasi sebanyak 8.881, aset pendidikan 7.637, aset kesehatan 305, aset kesejahteraan 501, aset bidang ekonomi 10.17 dan aset tanah wakaf seluas

29.808.165 ha. Dengan latar belakang seperti itu Muhammadiyah mendirikan PT.Solar Global Internasional bergerak dengan konsep Sistem Jami'ah jaringan ekonomi Muhammadiyah. Sistem ini sebenarnya merupakan adaptasi terhadap sistem ekonomi modern yang sedang berkembang dalam bentuk berbagai jaringan yang memunculkan hypermarket. Sosialisasi dan perekrutan anggota jaringan ekonomi ini diawali melalui pengaktifan kartu anggota Muhammadiyah (KATAM). Pengembangan bisnis retail yang berlabel MARKAZ memberi kesempatan kepada seluruh anggota atau pemegang kartu KATAM untuk membuka usaha dengan model *franchise*⁸⁰.

Tentunya pengembangan bisnis ini bukannya tanpa hambatan. Menurut Edy adanya daya tolak warga persyarikatan terhadap “sentralisasi Program” dapat terjadi mengingat kemungkinan secara individual aktivitas bisnis telah banyak dilakukan. Karena dapat saja tiap wilayah atau warga persyarikatan lainnya menganggap organisasi sebagai “*Captive Market*” nya⁸¹. Demikian juga menurut Dawam bahwa misi Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah, pendidikan dan sosial, sebagaimana diketahui secara luas, mendasarkan diri pada surat al-Maa'uun. Pada pokoknya, isi surat al-Maa'uun tersebut menggugah tanggung-jawab sosial keagamaan, terutama diarahkan kepada lapisan atas ekonomi, yang telah berhasil meraih surplus dalam

⁸⁰ Lihat *Paradigma Baru Muhammadiyah Revitalisasi Gerakan Da'wah dengan Sistem Jami'ah Jaringan Ekonomi Muhammadiyah* (Jakarta : MPEM PP Muhammadiyah, 2000) hal.33-55

⁸¹ Edy Suandi Hamid dkk (Peny), “*Rekonstruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multiperadaban*”, (Yogyakarta, UII Press, 2000) hal.167

proses reproduksi ekonomi yang bersipat sosial⁸². Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan mereka berkumpul di organisasi atau persyarikatan adalah dalam rangka amal *jariah* bukan motif pengembangan ekonominya semata.

Tampaknya gerakan ekonomi persyarikatan Muhammadiyah dijalankan tidak berdasarkan tantangan – tantangan sosial kemasyarakatan yang mengakar. Persoalan-persoalan pemberdayaan keumatan (rakyat) secara langsung tidak merupakan agenda penting dalam gambaran pengembangan jaringan ekonomi Muhammadiyah tersebut. Demikian juga konsep-konsep ekonomi syari'ah ternyata tidak dikembangkan oleh pelaku organisasi, utamanya dalam rangka menjawab hasil keputusan Majelis Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 tentang realitas bunga bank konvensional

A.1.7.Keputusan Majelis Tarjih Terhadap Realitas Ekonomi(Bank) Konvesional

Majelis Tarjih sebagai lembaga fatwa syari'ah merupakan lembaga yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas syari'ah warga Muhammadiyah. Lembaga ini berfungsi memberikan fatwa agama terhadap segala permasalahan ibadah dan muamalah menurut dali-dalil al-Qur'an, Sunnah, ijtihad yang kuat sehingga tidak menimbulkan pertentangan dan perpecahan. Menurut Mul Khan (2000) secara historis dalam periode tertentu terjadi dominasi ahli syari'ah (fatwa Majelis Tarjih) namun secara perlahan mengalami penyusutan. Tentunya hal ini perlu dibuktikan sejauh

⁸² Lihat Dawam Rahardjo, *"Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi"*, (Jakarta, LSAF, 1999), hal.355

mana pengaruh institusi Majelis Tarjih pada warga Muhammadiyah dewasa ini karena salah satu alasan orang memilih bergabung dalam organisasi adalah mencapai pelaksanaan ajaran Islam yang murni.

Jauh sebelum gerakan ekonomi Islam (GEI) marak, utamanya fenomena perkembangan bank syari'ah, Muhammadiyah telah memikirkan dan mengambil keputusan tentang eksistensi bank menurut ajaran Islam. Meskipun bukan dalam bentuk konsep ekonomi yang utuh namun dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengamanahkan pembentukan lembaga keuangan (bank) syari'ah yang jauh dari sistem bunga (riba). Hasil keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah di sidoarjo tersebut seperti dikutip berikut ini.⁸³

"Muktamar Majlis Tarjih Muhammadiyah setelah mempelajari

- 1. Uraian tentang masalah bank dalam segala seginya yang disampaikan oleh Nandang Komar, Direktur Bank Negara Indonesia Unit I Cabang Surabaya,*
- 2. Pembahasan dari para Mu'yamirin*

Dengan bertawakkal kepada Allah s.w.t.

Menyadari :

- 1. Bahwa bank dalam sisim ekonomi-pertukaran adalah mempunyai fungsi yang vital bagi perekonomian pada masa sekarang.*
- 2. Bahwa dalam wujudnya sekarang bukan merupakan lembaga yang lahir dari cita-cita sosial ekonomi Islam.*
- 3. Bunga adalah sendi dari sistim perbankan yang berlaku selama ini.*
- 4. Bahwa ummat Islam sebagai ummat pada dewasa ini tidak dapat melepaskan diri daripada pengaruh perbankan yang*

⁸³ www.Tarjih Muhammadiyah.com

langsung atau tidak langsung menguasai perekonomian ummat Islam.

Mengingat

1. *Bahwa nash-nash Quran dan Sunnah dengan jelas mengharamkan riba.*
2. *Bahwa fungsi bunga bank dalam perekonomian modern sekarang ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan bagi bank, melainkan juga berfungsi sebagai alat politik perekonomian negara untuk kesejahteraan ummat (stabilitas ekonomi).*
3. *Bahwa adanya Undang-undang yang mengatur besar kecilnya bunga adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya penghisapan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah di samping untuk melindungi langsungnya kehidupan bank itu sendiri.*
4. *Bahwa hingga saat ini belum ada konsepsi sistim perekonomian yang disusun dan dilaksanakan sesuai dengan qaidah Islam.*

Menimbang

1. *Bahwa nash-nash Quran dan Sunnah tentang haramnya riba mengesankan adanya 'illah terjadinya penghisapan oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah.*
2. *Bahwa perbankan adalah suatu sistim lembaga perekonomian yang belum pernah dialami ummat Islam pada masa Rasulullah s.a.w.*
3. *Bahwa hasil keuntungan bank-bank milik negara pada akhirnya akan kembali untuk kemashlahatan ummat*
4. *Bahwa termasuk atau tidaknya bunga bank ke dalam pengertian riba syar'i dirasa belum mencapai bentuk yang meyakinkan.*

Memutuskan

1. *Riba hukumnya haram dengan nash sharih Quran dan Sunnah*
2. *Bank dengan sistim riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal*
3. *Bunga bank yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara "musytabihat".*
4. *Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistim perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qa'idah Islam.*

Penjelasan dari Majelis Tarjih

Penjelasan ini mengarah kepada ungkapan mengapa keputusan tentang masalah perbankan tersebut terjurus kepada sifat-sifat :

- Pengkhususan Bank Kredit
- Penyebutan Bank Negara
- Penggunaan kata musytabihat.

Mengapa Bank Kredit

Meskipun judul pembahasan sebagaimana yang dicantumkan sebagai acara adalah soal perbankan, namun sejak pertama telah terkesan--setelah dikemukakan segala penerangan dan penjelasan mengenai perbankan--bahwa di tengah-tengah segala fungsi perbankan yang bermacam-macam, Bank Perkreditan khususnya yang dirasa dapat disangkutpautkan dengan sesuatu hukum agama, yakni masalah riba.

Demikian yang telah menjadi pengertian umum dalam mu'tamar.

Mengapa Bank Negara

Pengkhususan Bank Negara sebagai landasan pembicaraan timbul di tengah-tengah pembahasan oleh Panitia Perumus. Dalam pembahasannya sebagai berikut :

- Pada pembahasan oleh anggota panitia, pembicaraan jelas menjurus untuk membebaskan rente-bunga dalam macam-macam bentuknya sebagaimana berlaku pada Bank Kredit dewasa ini, dari persamaan dengan sifat riba yang diharamkan oleh Agama, disebabkan oleh adanya kecenderungan pendapat bahwa riba yang diharamkan oleh Agama ialah sifat pembungaannya yang disertai unsur penyalahgunaan kesempatan dan penindasan, sedang yang berlaku dewasa ini sama sekali tak menimbulkan rasa penindasan atau kekecewaan oleh siapapun yang bersangkutan.
- Salah seorang anggota panitia yang hadir mengungkapkan praktek yang berlaku pada salah satu Bank di Indonesia demikian : seorang akan menitipkan sejumlah uang pada bank tersebut untuk memperoleh bunga tiap bulannya sebanyak 10 % - suatu pembungaannya yang tidak kecil.- Kemudian bank itu pada gilirannya memberi pinjaman kepada pedagang dengan menarik bunga 15 %. Gambaran

dalam keadaan ekonomi seperti Indonesia dewasa ini, besar sekali adanya kemungkinan si pedagang meminjamkan lagi uang pinjaman itu kepada pihak keempat untuk mendapatkan bunga lagi. Walaupun dalam panitia tidak dibicarakan lagi tentang siapa yang rugi atau menderita atau tertindas dalam praktek serupa di atas, namun reaksi para hadirin adalah negatif terhadap cara yang demikian. Namun begitu panitia berpendapat bahwa hal itu hanya mungkin berlaku pada bank swasta. Maka oleh karena itu ditentukan Bank Negara.

Bank Negara

Bank negara dianggap badan yang mencakup hampir semua kebaikan dalam alam perekonomian modern dan dipandang memiliki norma yang menguntungkan masyarakat di bidang kemakmuran. Bunga yang dipungut dalam sistem pengkreditannya adalah sangat rendah sehingga sama sekali tak ada pihak yang dikecewakan.

Tetapi bunga atau riba tetaplah merupakan kelebihan jumlah pengembalian hutang atau titipan. Dan itulah riba konvensional.

Mengapa dalam membicarakan hal yang dimaksud tak disinggung-seinggung segala riwayat hadits tentang riba, misalnya :

lihaditsi Abi Hurairata r.a. qa-la qa-la Rasu-lulla-hi s.a.w. adz-dzahabu bidz-dzahabi waznan bi waznin mitslan bi mitslin wal fidh-dhatu bil fidh-dhati waznan bi waznin mitslan bi mitslin faman za-da awistaza-da fahuwa riban (rawahu muslim)

(Karena Hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sa.w. bersabda : "Jual beli mas dengan mas itu mesti seimbang dan sepadan, pun jual beli perak dengan perak mestilah seimbang dan sepadan; siapa yang menambah atau meminta ditambah maka itulah riba" (HR. Muslim halaman 632)

Kata orang riba itu fadl

Katakanlah riba itu fadl, tetapi hendaklah kita akui bahwa itu riba. Salah seorang anggota panitia mengungkapkan bahwa sepanjang yang iaketahui melalui bacaan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga di negeri Islam: RPA, Pakistan dan Saudi Arabia dalam rangka mempersoalkan bunga bank yang lazim berlaku di seluruh dunia tidak menyangkal bahwa bunga serupa itu adalah riba,

sambil mengatakan bahwa sangat perlu Ummat Islam membuat suatu konsep perbankan yang dapat mencerminkan penghapusan sifat-sifat riba.

Belum mencapai bentuk meyakinkan

Walaupun diakui bahwa perbungaan yang seminimal-minimalnyapun tak mudah dilepaskan dari pengertian riba, tetapi terang diinsyafi bahwa segi positif daripada bank pengkreditan sangat besar bagi dunia perekonomian.

Apakah yang demikian itulah benar-benar riba syar'i yang diancam pelakunya dalam Al-Quran ? Pengertian yang kita dapati belum demikian meyakinkan.

Apakah itu musytabihat

Kata-kata dalam pengertian bahasa ialah perkara yang tidak jelas. Adapun menurut pengertian syara' ialah sebagaimana yang tersimpul di dalam Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Basyir yang kesimpulannya sebagai berikut :

*Bahwasanya yang halal itu sudah jelas, demikian pula yang haram yaitu yang telah dijelaskan oleh Quran atau Hadits dengan nash-sharihnya. Misalnya daging unta adalah haram dimakan, daging khinzir adalah haram dan lain-lain. Selain yang telah ditentukan hukumnya dengan jelas itu, terdapat beberapa hal yang hukumnya tidak jelas bagi seseorang atau beberapa orang, apakah itu halal atau haram, sehingga dari mereka timbul rasa ragu-ragu dan tidak dapat menentukan salah satu diantara dua macam hukum itu. Perkara yang masih meragukan karena tidak jelasnya inilah yang disebut **musytabihat**.*

Dalam hal ini suatu perkara yang semula dihukumkan musytabihat bagi seseorang atau beberapa orang, kemudian ia dapat menjadi tidak musytabihat lagi bagi mereka, yaaitu apabila setelah dikaji dan diselidiki dengan seksama dengan melalui prosedur-prosedure tertentu dan yang berlaku, kemudian atas ijtihad mereka telah dapat menentukan salah satu di antara dua hukum yang semula diragukan itu.

Terhadap-hal-hal yang masih musytabihat atau yang masih diragukan hukumnya, oleh Nabi s.a.w. telah dianjurkan agar kita sekalian berlaku hati-hati dengan menghindari atau menjauhkan untuk menjaga kemurnian jiwa dalam pengabdian kita kepada Allah s.w.t. kecuali apabila ada sesuatu kepentingan masyarakat atau kepentingan pribadi yang sesuai dengan maksud-maksud daripada tujuan agama Islam pada umumnya, maka tidak ada halangan perkara musytabihat tersebut kita kerjakan sekedar sesuaide nagn kepentingan-kepentingan itu."

Keputusan Mukhtar Majelis nampaknya hanya memperhatikan pernyataan "musytabihat" atau sikap "permissive" Muhammadiyah terhadap bank konvensional dan lebih tegas lagi adanya pilihan-pilihan yang lebih baik terhadap berbagai jenis bank, utamanya dalam hal ini bank negara. Sehingga hal yang penting pada point (4) saran kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qa'idah Islam ternyata terabaikan sampai saat ini.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

A.2.1. Sejarah dan Perkembangan Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia

Bermula dari inisiatif mahasiswa ITB di Bandung yang mendirikan *Baitul Tanwil Teknosa* pada tahun 1989, -meskipun pada akhirnya berakhir dengan meninggalkan banyak masalah- pemunculannya memicu banyak pihak untuk mendirikan lembaga yang sama dalam ruh dan motivasi syari'ah. Pada tahap selanjutnya tokoh-tokoh Islam yang lain melakukan upaya-upaya yang lebih jauh dalam bentuk bank. Lahirnya BPRS tahun 1991 dengan didirikannya Bank

Perkreditan Rakyat “Dana Mardhatillah” (BPRDM) dan Bank Perkreditan Rakyat “Berkah Amal Sejahtera” (BPRBAS), yang beroperasi berdasarkan hukum Islam (syari’ah) pada tahun yang sama.⁸⁴ Kemudian diikuti munculnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang diperakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia (BMI) semakin memantapkan langkah gerakan ekonomi Islam karena ternyata mendapat respon politik dari pemerintah berupa keikutsertaan yang diikuti kebijakan dalam bentuk perubahan perundang-undangan perbankan dan aturan-aturan lainnya khususnya Undang-Undang Perbankan Nasional No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 mengenai ketegasan pendirian dan dukungan pemerintah terhadap bank syari’ah.⁸⁵

Gerakan Ekonomi Islam berkembang dalam bentuk institusionalisasi syari’ah Islam dalam berbagai sektor ekonomi utamanya yang paling menonjol sektor keuangan. Perkembangan sektor keuangan dapat dibagi atas Bank Umum Syari’ah, BPRS, *Baitul Maal wat Tanwil* (BMT), bidang Asuransi Takafful, Pegadaian syari’ah, dan Obligasi Syari’ah. Disamping itu upaya menyiapkan sumber daya manusia yang profesional berkembang pesat dalam bentuk pendidikan ekonomi Islam yang terkonsentrasi pada pendidikan ekonomi, perbankan dan manajemen .

Gerakan ekonomi Islam berkembang tidak dalam sebuah jaringan yang integratif. Dinamika gerakan ini muncul dari berbagai kalangan organisasi Islam

⁸⁴ Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syari’ah*, cet.I (Yogyakarta: LkiS, 2000) hal. 99-100

⁸⁵ Y.Sri Susilo dkk., *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, cet.I (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2000), hal. 109

dengan kegiatan yang mandiri maupun bekerja sama. Ada beberapa wadah yang mengumpulkan mereka seperti Asbisindo untuk BPRS atau Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) untuk BMT. Gerakan ini sepakat untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam dengan prinsip-prinsip syari'ah sebagai alternatif atas ekonomi konvensional yang dianggap telah gagal dalam memberikan kesejahteraan dan keadilan ekonomi pada masyarakat. Misi yang dijalankan adalah mendirikan institusi ekonomi Islam baik pengembangan perbankan, pengembangan wiraswasta dan pengembangan sumberdaya manusia⁸⁶.

A.2.2. Prinsip – Prinsip Syari'ah Ekonomi Islam

Motif perkembangan gerakan ekonomi Islam secara umum adalah bahwa kegiatan gerakan ini memihak pada gerakan ekonomi rakyat. Secara khusus terlihat dari tipologi gerakan ekonomi Islam yang ditunjukkan oleh sikap terhadap bunga bank yang dianggap mengandung unsur riba. Mengenai masalah riba dalam Al-Qur'an disebutkan dalam arti :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁸⁷

⁸⁶ Sesuai dengan pandangan *Robert.W.Hefner* tentang reaksi ummat Islam atas peminggiran ekonominya. Gerakan ekonomi Islam adalah gerakan ekonomi populis yang menekankan pada kemandirian dan penegakan prinsip-prinsip syari'ah, sementara gerakan ekonomi diwujudkan dengan perluasan bank Islam dengan bentuk lembaga keuangan lainnya, pengelolaan zakat beserta pendidikan dan pelatihan.

⁸⁷ Al-Baqarah (2) : 275

Demikian juga dalam ayat lain Allah Swt berfirman dalam arti :

*“ Hai orang-orang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan ”*⁸⁸

Peringatan Allah Swt kepada orang-orang yang memakan riba dengan balasan siksaan yang pedih, seperti dalam firman-Nya dalam arti :

*“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih ”*⁸⁹

Demikian juga pandangan terhadap optimalisasi pengumpulan zakat, sadaqah dan infaq (ZIS) dalam bentuk-bentuk produktif. Pandangan umat Islam terhadap zakat berdasarkan perintah Allah Swt dalam arti:

*“Wahai orang-orang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu ”*⁹⁰

demikian juga keyakinan umat islam terhadap pentingnya pengsucian harta sebagaimana firman Allah Swt dalam arti: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian”*⁹¹

Prinsip-prinsip gerakan ekonomi Islam yang sementara masih fokus pada bidang keuangan mengaplikasikan model-model syari'ah dalam bentuk-bentuk

⁸⁸ Ali-Imran (3) : 130

⁸⁹ An-Nisaa (4) : 161

⁹⁰ QS:Al-Baqarah (2) : 276

transaksi jual - beli dan bagi hasil termasuk pengelolaan zakat secara produktif. Beberapa model yang menonjol diuraikan seperti berikut ini⁹².

1). Jual Beli

a). *Bai' Al-Muthlaqah*

Bai' al-muthlaqah adalah jual-beli biasa, yaitu pertukaran barang dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar.

Aplikasi dalam lembaga keuangan : *bai al-muthlaqah* dilakukan untuk pelaksanaan jual beli barang keperluan kantor (*fixed assets*). Jual-beli macam ini pun menjiwai semua produk yang didasarkan pada transaksi jual-beli.

b). *Muqayyadah*

Muqayyadah adalah jual-beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter)

Aplikasi dalam lembaga keuangan : jual-beli semacam ini dilakukan sebagai jalan keluar bagi ekspor yang tidak bisa menghasilkan mata uang asing (valas). Karena itu dilakukan pertukaran barang yang dinilai dalam valuta asing. Tradisi ini lazim disebut Counter Trade.

c). *Sharf*

Sharf adalah jual-beli mata uang asing yang berbeda , seperti rupiah dengan dollar, dollar dengan yen, dan sebagainya.

⁹¹ QS : Adz-Dzaariyaat (51) : 19

⁹² Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta : Aivabet, 1999), hal.199-205

Aplikasi dalam lembaga keuangan: *sharf* dilakukan dalam dua macam, *pertama* dalam bentuk *bank notes* (uang kertas fisik); yang *kedua*, melalui transfer.

d). *Murābahah*

Murābahah adalah jual-beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli.

Aplikasi dalam lembaga keuangan: pada sisi aset, *murabahah* dilakukan antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dengan harga dan keuntungan disepakati diawal. Pada sisi liabilitas, *murabahah* diterapkan untuk deposito, yang dananya dikhususkan untuk pembiayaan murabaha saja.

e). *Musawamah*

Musawamah adalah jual-beli biasa di mana penjual tidak memberitahu harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

Aplikasi dalam lembaga keuangan : produk ini jarang digunakan kecuali untuk menjual aktiva tetap (*fixed assets*), karena untuk mencari keuntungan dari selisih dengan nilai bukunya.

f). *Tauliyah*

Tauliyah adalah jual-beli di mana penjual tidak mengambil untung. Harga yang ditetapkan adalah harga dari produsen. Penjual hanya mendapat komisi.;

Aplikasi dalam lembaga keuangan: jarang lembaga keuangan menggunakan transaksi ini baik dari sisi aset maupun liabilitasnya.

g). *Muwadha'ah*

Muwadha'ah adalah jual-beli yang dilakukan dimana penjual menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah dari biasanya atau dengan potongan (*discount*).

Aplikasi dalam lembaga keuangan: jarang lembaga keuangan mengaplikasikan produk ini. Kalaupun ada, biasanya dilakukan dalam penjualan aktiva tetap (*fixed assets*) yang dijual lebih murah dari harga pasar karena nilai bukunya sudah tidak ada.

h). *Bai' Salām*

Bai' Salām adalah jual-beli yang dilakukan dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya, dan diantarkan kemudian.

Aplikasi dalam lembaga keuangan: biasanya dipergunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya lebih dulu, sedangkan para nasabah menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya. Karena pengantarannya berupa produk pertanian, biasanya lembaga keuangan melakukan paralel *salam*, yaitu mencari pembeli kedua sebelum saat panen tiba.

i). *Istishna*

Bai' Istishna adalah jual-beli yang dilakukan di mana penjual membuat barang yang dipesan pembeli dengan modal sendiri.

Aplikasi dalam lembaga keuangan : lembaga keuangan bertindak sebagai penjual (*mustashni*' ke-1) kepada *bahir* (pemilik proyek, pembeli), dan mensubkannya kepada kontraktor (*mustashni*' ke-2)

2). Bagi Hasil

a). *Mudhārabah*

Mudhārabah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan *mudhārib* (pengelola), dimana keuntungan disepakati diawal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Aplikasi dalam lembaga keuangan: di sisi liabilitas, *mudhārabah* adalah akad antara depositor (pemilik modal) dengan lembaga keuangan (*mudhārib*) untuk mengelola dana depositor . Di sisi aset, *mudhārabah* adalah akad pembiayaan lembaga keuangan terhadap usaha /proyek nasabah, di mana lembaga keuangan menyediakan modal 100% dari usaha/proyek tersebut dengan sistem bagi hasil.

b). *Mudhārabah Muqayyadah*

Mudhārabah Muqayyadah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan *mudhārib* (pengelola) untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal, dimana keuntungan disepakati diawal untuk dibagi bersama kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Aplikasi dalam lembaga keuangan: akad ini diterapkan untuk proyek yang dibiayai langsung oleh dana nasabah, sedangkan lembaga keuangan hanya bertindak

sebagai wakil yang mengadministrasikan proyek itu. Dalam terminologi perbankan syari'ah ini lazim disebut *special investment*.

c). *Musyārahah*

Musyārahah adalah akad antara 2 pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka

Aplikasi dalam lembaga keuangan:

- (a). akad ini diterapkan pada usaha/proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan yang jumlahnya tidak 100% sedangkan selebihnya oleh nasabah;
- (b). akad ini juga diterapkan pada sindikasi antar lembaga keuangan.

d). *Musyārahah Mutanāqishah*

Musyārahah Mutanāqishah adalah akad antara dua pihak yang berserikat pada suatu barang, dimana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap.

Aplikasi dalam lembaga keuangan:

- (a). akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan lainnya, dimana bagian lembaga keuangan secara bertahap dibeli oleh pihak lainnya dengan cara mencicil;
- (b). akad ini juga terjadi pada *mudharabah* yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usaha itu berjalan terus dengan modal yang tetap.

3). Akad-akad Jasa

a). *Wadī'ah*

Wadī'ah adalah akad yang terjadi antara dua pihak, dimana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua.

Aplikasi dalam lembaga keuangan: lembaga keuangan menerapkan akad ini pada rekening giro (liabilitas).

b). *Ijārah*

Ijārah adalah akad sewa-menyewa barang antara dua pihak

Aplikasi dalam lembaga keuangan: akad sewa yang terjadi antara lembaga keuangan (pemilik barang) dengan nasabah (penyewa), dengan cicilan sewa yang sudah termasuk cicilan pokok harga barang. Karena itu, biasanya *ijarah* ini dinamai *Ijārah wal Iktina* atau *Ijārah al-Muntahia Bittamlūk*

c). *Wakālah*

Wakālah adalah perwakilan antara dua belah pihak

Aplikasi dalam lembaga keuangan:

- (a). *wakālah* biasanya diterapkan untuk pembuatan *letter of credit*, atas pembelian barang di luar negeri (*L/C import*), atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank luar negeri (*L/C Export*);
- (b). *wakālah* juga diterapkan untuk melakukan transfer dana dari nasabah kepada alamat di tempat lain.

d). *Kafālah*

Kafalah adalah akad jaminan satu pihak kepada pihak lain.

Aplikasi dalam lembaga keuangan: dalam lembaga keuangan biasanya digunakan untuk membuat garansi atas suatu proyek (*performance bonds*), partisipasi dalam tender (*tender bonds*), atau pembayaran lebih dulu (*advance payment bonds*)

e). *Hawālah*

Hawālah adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain.

Aplikasi dalam lembaga keuangan:

(a). dalam lembaga keuangan, *hawālah* diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur, ini lazim disebut *Post Dated Check*;

(b). bisa juga diterapkan pada produk *factoring* (anjak piutang)

f). *Rahn*

Rahn adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak yang lain, dengan uang sebagai gantinya.

Aplikasi dalam lembaga keuangan:

(a). akad ini digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan;

(b). akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk keperluan nasabah yang sipatnya jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang tersebut.

g). *Qard*

Qard adalah akad pinjam-meminjam (uang) antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jika ada jaminan, maka ia menjadi rahn.

Aplikasi dalam lembaga keuangan: akad ini menjadi fasilitas tambahan bagi nasabah pembiayaan yang memerlukan dana mendesak untuk membiayai usahanya.

A.2.4 Perkembangan Bank Syari'ah

Fenomena gerakan ekonomi Islam masih berkuat pada masalah kebijakan moneter dengan prinsip-prinsip syari'ah seperti diatas. Melalui berbagai model-model produk yang sesuai dengan aplikasi teknis bank konvensional, prinsip-prinsip syari'ah diterapkan dan dikembangkan dengan metodologi islamisasi. Dengan latar belakang kondisi ekonomi yang morat-marit serta dukungan berbagai pihak khususnya pemerintah telah memberi ruang gerak yang cepat pada gerakan ekonomi islam di sektor ini.

Perkembangan Bank Syari'ah berdasarkan undang-undang no.10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal I ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syari'ah, sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia' Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :

- 1) Kegiatan Usaha dan Produk – Produk Bank beradaskan Prinsip Syari'ah;
- 2) Pembentukan dan Tugas pokok Dewan Pengawas Syari'ah;
- 3) Persyaratan bagi pembukaan Kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Bank Syari'ah terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Perkreditan Syari'ah (BPRS). Pengelolaan Bank Umum Syari'ah adalah jenis perbankan yang menghimpung dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat disesuaikan dengan itu. Memberi kredit dan menerbitkan surat pengakuan hutang, dikelola awal dengan prinsip-prinsip syari'ah, baik pada awal berdirinya maupun didirikan karena konversi atau melakukan *dual sistem* (konvensional & Syari'ah) diversifikasi produk berdasarkan prinsip syari'ah atau konversi bank syari'ah. Muamalat Indonesia sebagai bank pertama berprinsip syari'ah lahir pada tahun 1992. Memasuki tahun 2002 bank umum yang melakukan kegiatan operasional bank syari'ah adalah Bank IFI , Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank Jabar. Perkembangan bank umum syari'ah tersebut dapat dilihat dalam tabel⁹³ :

⁹³ <http://www.Moslemworld.co.id/bisnis/2002/2>

Tabel.1.A.2.4
Jumlah Kantor Bank Umum Syari'ah
(posisi per november 2001)

Bank	KPO	KC	KCP	KK
Bank Muamalat Indonesia (BMI)	1	13	3	27
Bank Syari'ah Mandiri	1	19	-	-
Bank IFI	1	1	-	-
Bank BNI Syari'ah	1	9	-	-
Bank Jabar (BPD)	1	1	-	-
Jumlah	5	43	3	27

Sumber : Karim Business Consulting 2001

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara umum berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan pembiayaan (kredit) dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain. Perkembangan Bank Perkreditan Syari'ah dapat dilihat sebagai berikut⁹⁴

⁹⁴ Y.Sri Susilo, Bank., hal. 111

Tabel.2..A.2.4
Perkembangan Bank Perkreditan Syariah
Di Indonesia sampai November 2001

No	Propinsi	Jumlah BPRS
1	Acch	5
2	Sumatera Utara	5
3	Sumatera Barat	2
4	Sumatera Selatan	1
5	Lampung	2
6	Jawa Barat	16
7	DKI Jakarta	19
8	Jawa Tengah	2
9	Dacrah Istimewa Yogyakarta	2
10	Jawa Timur	5
11	Bali	1
12	Kalimantan Timur	1
13	Sulawesi Selatan	6
14	Nusa Tenggara Barat	2
15	Irian Jaya	1
16	Lain-lain*	11
	Jumlah	81

Sumber : Buku Y.Sri Susilo dkk , * *Karim Business Consulting 2001*

Di seluruh Indonesia terdapat 162 bank umum dan 2.262 BPR, dengan jumlah total volume usaha hingga akhir Maret 2000 sebedar Rp 921,9 trilyun. Dari total volume usaha perbankan nasional tersebut, volume usaha yang dicapai BMI, BSM, Bank IFI cabang syariah sera Bank BNI cabang syariah, hanya sebesar Rp 1,2 trilyun

atau hanya 0,1% dari total aset bank konvensional. Dari data di atas dapat diketahui, volume usaha perbankan syariah masih relatif kecil dalam statistik perbankan nasional. Walaupun demikian, masih menurut Subarjo, perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan dua kali lebih besar dibandingkan pertumbuhan pada periode sebelum diberlakukannya UU No 10 tahun 1998⁹⁵.

Peranan perbankan syariah dalam mobilisasi dana dan penyaluran pembiayaan walaupun masih kecil, namun mengalami peningkatan yaitu masing-masing dari 0,05% dan 0,08% pada tahun 1998 menjadi 0,07% dan 0,17% pada tahun 1999. Peningkatan peran perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaan yang sedemikian rupa, disebabkan terutama adanya peningkatan volume penyaluran pembiayaan dari Rp 455 milyar pada tahun 1998 menjadi Rp 472 milyar pada tahun 1999 dan pada saat yang bersamaan penyaluran kredit oleh perbankan konvensional menurun dari Rp 545 trilyun menjadi Rp 227 trilyun.

Dengan diberlakukannya UU No 10/1998 yang menetapkan sistem perbankan di Indonesia sebagai *dual banking system* dimana bank-bank konvensional beroperasi berdampingan dengan bank-bank syariah, maka landasan hukum bank syariah telah cukup jelas dan kuat baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya. Yang terakhir, dengan diberlakukannya UU No 23/1999, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah,

⁹⁵ <http://www.hidayatullah.com/2000/10/ihwal2.shtml>

sehingga bank sentral tersebut dapat pula mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank syariah. Dengan kata lain, keberadaan perbankan syariah telah diakui secara utuh dalam sistem perbankan nasional.

Pada tahun 2001 total aset Bank Syariah meningkat dari 1000 miliar menjadi 2,4 triliun . Sementara pembiayaan (kredit) dari 100 miliar menjadi 1,8 triliun. Nonperforming Financings (NPF) dari 1% menjadi 9,6%. Dana pihak ketiga meningkat dari 1,4 triliun menjadi 1,5 triliun . Laba dari 7 miliar menjadi 24 miliar.

A.2.5. Perkembangan BMT

Baitul mal wa Tamwil (BMT) merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Baitul tamwil merupakan cikal bakal lahirnya bank syariah pada tahun 1992. Segment masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Hasil riset Akhyar dkk⁹⁶ mencatat jumlah BMT di Indonesia sampai tahun 1999 lalu sebanyak 2808. Uraianya seperti berikut ini :

⁹⁶ Muhammad Akhyar Adnan, dkk, . *Studi on Factors Influencing Performance of the Best Baitul Maal wat Tamwils (BMTs) In Indonesia*, Riset, Jakarta: PT.Redecon, 2000, hal. 14a

Tabel.1.A.2.5
Perkembangan Baitul Mal wa Tanwil (BMT)
Di Indonesia sampai tahun 1999

<i>No</i>	<i>Propinsi</i>	<i>Jumlah BMT</i>
1	Acch	50
2	Sumatera Utara	156
3	Sumatera Barat	61
4	Sumatera Selatan	60
5	Riau	33
6	Jambi	12
7	Bengkulu	14
8	Lampung	40
9	Jawa Barat	697
10	DKI Jakarta	162
11	Jawa Tengah	513
12	Dacrah Istimewa Yogyakarta	65
13	Jawa Timur	600
14	Bali	15
15	Kalimantan Barat	15
16	Kalimantan Selatan	15
17	Kalimantan Tengah	10
18	Kalimantan Timur	24
19	Sulawesi Selatan	121
20	Sulawesi Utara	62
21	Sulawesi Tenggara	25
22	Sulawesi Tengah	11
23	Nusa Tenggara Barat	93
24	Nusa Tenggara Timur	8
25	Irian Jaya	16



**UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA**

26	Maluku	20
	Jumlah	2808

Sumber : Riset M.Akhyar Adnan dkk

Sementara itu data Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)⁹⁷ yang didirikan pada tahun 1995, menyampaikan bahwa sampai April tahun 2001 jumlah BMT dibawah kordinasinya adalah 2939 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut 2402 unit BMT secara aktif menyampaikan laporan mereka ke PINBUK. BMT- BMT yang aktif ini diketahui kinerjanya seperti berikut ini:

Tabel.2.A.2.5
Kinerja Keseluruhan BMT Nasional
di bawah Kordinasi Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Keci (PINBUK)
Sampai Tahun 2001

No	Kegiatan	Posisi Kinerja
1	Modal	Rp. 503.815.879.064
2	Dana Fihak ke Tiga	Rp. 501.639.061.849
3	Pembiayaan	Rp. 500.522.926.041
4	Aset	Rp. 521.070.607.254
5	Nasabah	810.187.506 orang
6	Nasabah Pembiayaan	520.770.486 orang

Sumber : Esai M.Amin Aziz

Sebagaimana di katakan Amin Aziz bahwa prestasi BMT jika dibanding dengan jumlah pengusaha kecil yang banyaknya 39,5 juta pengusaha kecil diseluruh Indonesia maka berdasarkan data tersebut diatas, bila diasumsikan tiap BMT melayani 200 orang maka masih dibutuhkan sebanyak 184.586 BMT.

A.2.6. Perkembangan Asuransi Takafful

Asuransi Takafful merupakan proyek lain gerakan ekonomi Islam yang sangat menonjol perkembangannya. "Takafful" diambil dari kata Arab yang berarti "Jaminan kerjasama". Takafful bisa diartikan sebagai suatu perjanjian diantara sekelompok anggota atau partisipan yang sepakat bersama-sama menjamin di antara mereka terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin menimpa mereka, seperti dijelaskan dalam perjanjian. Tujuan dasar takafful adalah membayar atas kerugian tertentu dari simpanan dana yang telah ditetapkan. Setiap anggota dalam kelompok menyatukan upaya untuk membantu yang membutuhkan.

Kinerja Asuransi Takafful antara 1997 dan tahun 1998 menduduki peringkat pertama dengan perubahan data-data keuangan seperti berikut ini⁹⁸ :

Tabel.1.A.2.6
Kondisi Keuangan Asuransi Takafful
1997-2001

Keterangan	Tahun 1997	Tahun 1998
Laba Bersih		Rp. 23.145.000.000
Aset	Rp. 32.251.000.000	Rp. 45.772.000.000
Investasi	Rp. 29.121.000.000	Rp. 38.884.000.000
Kewajiban	Rp.26.312.000.000	Rp. 38.999.000.000
Cadangan Teknis	Rp.	Rp. 146.000.000
Modal di Sektor	Rp.	Rp. 9.000.000.000
Solvency Margin	Rp. -11.522.000.000	Rp.

Sumber : majalah Investor

⁹⁷ M. Amin Aziz, "Pinbuk dan Dakwah Ekonomi", *Republika*, (16 Juli 2001), hal. (4), kolom 5.

⁹⁸ "Peringkat Perusahaan Asuransi 1999", *Investor*, No.11 (1999), hal.39-44

Perusahaan asuransi yang berasaskan saling menanggung (*takaful*)/ satu dengan lainnya atas musibah yang diderita saudaranya ini dari tahun ke tahun terus berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya. Menurut Direktur Utama Takaful⁹⁹, Iwa Sewaka, pada bulan oktober 2000 Asuransi Takaful Keluarga telah memiliki kekayaan sekitar Rp 54 milyar, sedangkan Asuransi Takaful Umum telah memiliki kekayaan Rp 33 milyar dan akumulasi premi Rp 71 milyar. Adapun peserta Asuransi Takaful Keluarga kini telah mencapai 450 ribu orang. Sehingga asuransi tersebut telah masuk dalam peringkat sepuluh industri asuransi jiwa di Indonesia dari segi kepesertaannya.

Sejak April 2000 PT Syarikat Takaful Indonesia, perusahaan induk dari Asuransi Takaful Umum dan Asuransi Takaful Keluarga, mencanangkan pola baru pemasaran jasa asuransi berupa jalinan kerjasama dan kemitraan yang disebut *Takaful Networking*. Mitra yang dibidik berbagai lembaga-lembaga ekonomi ummat, seperti koperasi pondok pesantren (kopontren), bank perkreditan rakyat (BPR) syariah, serta badan amil zakat infaq dan shadaqah (Bazis). Untuk mendukung program tersebut, pada tahun ini Asuransi Takaful berencana membuka kantor-kantor baru yang disebut *Underwriting Office Takaful* di enam kota besar: Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Samarinda dan Jakarta. Selanjutnya dari keenam UOT tersebut akan hadir gerai *Takaful Authorized Agency* (TAA) sebanyak 330 kantor dengan 3.300 karyawannya.

⁹⁹ <http://www.hidayatullah.com/2000/10/ihwal3.shtml>

A.2.7. Perkembangan Pendidikan Ekonomi Islam

Sebagai upaya menyediakan sumber daya manusia untuk penerapan konsep-konsep syari'ah dalam berekonomi dibutuhkan tidak hanya sekedar penguasaan ilmu fikih semata tapi juga kemampuan analisis finansial. Kebutuhan akan tenaga Perbankan syari'ah atau Dewan Syari'ah yang dapat mendukung vitalitas pengelolaan institusi bisnis Islam seperti bank syari'ah tumbuh dimana-mana. Tujuan pengajaran ekonomi Islam (Syari'ah) menurut Adi¹⁰⁰ adalah meliputi *philosophy of economics* dan *the science of economics*. Sehingga materi-materi yang diberikan terdiri atas :

- Pemahaman syari'ah (Islam) dan ekonomi syari'ah (Islam)
- Pemahaman ekonomi konvensional
- Pemahaman analisis kuantitatif
- Kemampuan mengevaluasi secara kritis ilmu ekonomi
- Kesadaran profesi akan kebutuhan pendekatan baru dalam ilmu ekonomi
- Motivasi mahasiswa untuk terlibat dalam proses islamisasi pengetahuan

Beberapa kegiatan-kegiatan dalam bentuk kursus maupun pengembangan perguruan tinggi bahkan universitas membuka program pendidikan yang berkaitan

¹⁰⁰ Adiwarman, "Menyiapkan SDM dan Lembaga Keuangan Islam di Indonesia", Makalah disampaikan pada acara Second International Conference, Islamic Education and Economic Institution, Naotur Garuda, Yogyakarta, tanggal 27-29 Oktober 2000. Hal.11

dengan kebutuhan pengembangan keilmuan dan kegiatan-kegiatan praktis pada sektor bisnis dan keuangan. Perguruan tinggi tersebut sebagaimana disampaikan dalam makalah Adiwarman berdasarkan data Bank Indonesia dan hasil survey penulis seperti berikut ini¹⁰¹.

Tabel.1.A.2.7.
Perkembangan Pendidikan Ekonomi Islam
Tahun 2001

No.	Nama PTi	Jurusan/ Mata Kuliah Pilihan	Program/ Program	Jenjang Studi	Jumlah rnhs Aktif	Jumlah Alumni
1	UII Yogyakarta	• Ekonomi Islam		• Strata dua (S2)	142	33
2	STIS Yogyakarta	• Lembangan Keuangan Syari'ah Manajemen Islami	Bisnis	• Diploma Tiga (D3) Strata Satu (S1)	450	169
3	STAIN Yogyakarta	• Perbankan Syari'ah • Manajemen Syari'ah • Manajemen Islami	Bisnis	• Diploma tiga (D3) • Strata Satu (S1)	560	-
4	IAIN Yogyakarta	• Muamalah • Keuangan Islam		Strata Dua (S2) Strata Satu (S1)	60 120	-
5	UMY	• Ekonomi & Perbank Islam		Strata Satu (S1)	200	-
6	TAZKIA Institute	• Ekonomi Islam • Manajemen Bisnis & Kewirausahaan • Bank & Keuangan Islam • Asuransi		Strata Satu (S1)	28	-
7	IAIN Jakarta	• Perbankan Syari'ah • Takafful		Strata Satu (S1)	400	-
8	Universitas Juanda Bogor	• Manajemen & Akuntansi Islam		Strata Satu (S1)	200	100
9	STAIN Malang	• Ekonomi Syari'ah		Strata satu (S1)	380	20
10	Universitas Brawijaya	• Manajemen & Akuntansi Islam (Mata Kuliah Pilihan		Strata Satu (S1)		
11	Universitas Airlangga	• Ekonomi Islam (Mata Kuliah Pilihan		Strata Satu (S1)		

¹⁰¹ *ibid*, hal.12-13

12.	IAIN Medan	• Manajemen Perbankan & LKS	Diploma Tiga (D3)	120	20
-----	------------	--------------------------------	-------------------	-----	----

Sumber : diolah dari beberapa perguruan tinggi

Sebagai respon atas perkembangan ril gerakan ekonomi Islam khususnya perbankan syari'ah, Bank Indonesia sendiri secara langsung bekerja sama dengan Asosiasi BPRS Syari'ah Indonesia (ASBISINDO) menjajaki pelaksanaan pelatihan terhadap pengelola bank syari'ah yang telah eksis sebanyak 79 BPRS.

A.2.8. Perkembangan Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer

Implikasi dari perkembangan gerakan ekonomi Islam di bidang keuangan semakin ditanggapi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah baik untuk melengkapi aturan-aturan disektor keuangan maupun perluasan aktivitas ekonomi syari'ah (Islam) itu sendiri. Berdasarkan laporan yang tertulis dalam website Hidayatullah oktober tahun 2000¹⁰² sekurang-kurang ada dua hal yang mendorong percepatan perkembangan gerakan ekonomi Islam yakni :

1). Perkembangan pada tingkat Kebijakan Pemerintah

Dengan berbekal rangkaian kebijakan baru, antar bank syariah dapat melakukan pinjam-meminjam uang melalui Pasar Uang Antar-Bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) yang disediakan BI. Sedangkan piranti yang digunakan adalah sertifikat Investasi Mudharabah Antar-Bank (IMA). Mudharabah Antar-Bank (IMA). Dengan demikian, bagi bank yang memiliki kelebihan dan (bank penanam dana) dapat melakukan investasi

kepada bank yang mengalami kekurangan dana (bank penerbit) yang selanjutnya akan menerbitkan sertifikat IMA. Produk aturan baru lainnya untuk perbankan syariah adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). SWBI adalah alternatif darurat pengganti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dikeluarkan BI. Piranti SWBI dapat dijadikan sarana penitipan jangka pendek, khususnya bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas.” Pada bulan Mei tahun 2000 lalu, Jumlah dana yang dititipkan melalui SWBI sekurang-kurangnya Rp 500 juta dan selebihnya kelipatan Rp 50 juta.

Untuk menghindari terjadi “mal praktek” sejak awal masing-masing lembaga keuangan syariah di Indonesia diharuskan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing perusahaannya. Anggota DPS ini adalah para ulama yang berkompeten dalam bidangnya, dengan tugas utama adalah mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan itu sehari-harinya serta meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan yang diawasinya. Secara berkala —biasanya setahun sekali— DPS membuat pernyataan bahwa lembaga keuangan yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan itu dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) lembaga keuangan bersangkutan.

¹⁰²<http://www.hidayatullah.com/2000/10/ihwal3.shtml>

Dalam perkembangannya, karena lembaga keuangan bertambah banyak dan bertambah beragam dikhawatirkan terjadi perbedaan fatwa antara DPS suatu lembaga keuangan dengan fatwa DPS lembaga lainnya. Sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap perlu untuk membentuk satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga-lembaga keuangan syariah. Namanya Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan yang dibentuk dari hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah (1997) tersebut merupakan lembaga otonomi di bawah MUI, dipimpin oleh Ketua Umum MUI dan Sekretaris (*ex-officio*).

Kegiatan sehari-hari DSN dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. Fungsi utamanya mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar benar-benar sesuai dengan syariah Islam. Untuk keperluan tersebut DSN membuat garis panduan produk syariah yang akan menjadi panduan kerja DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah. DSN juga dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah tertentu jika diketahui melakukan penyimpangan dari garis panduan yang telah ditetapkan. Jika teguran itu tidak diindahkan, maka DSN mengusulkan kepada otoritas yang berwenang seperti BI dan Departemen Keuangan untuk menjatuhkan sanksi kepada lembaga keuangan yang menyimpang itu.

2). Perkembangan pada Tingkat Aktivitas

Selain wacana tentang pegadaian syariah, dana pensiun syari'ah, belakangan lahir dan bahkan telah berkembang apa yang disebut reksadana syariah . Reksadana adalah bentuk investasi kolektif yang memungkinkan investor mengumpulkan dananya agar dapat diinvestasikan dalam bentuk portofolio (kumpulan surat berharga) yang dikelola oleh manajer investasi (*fund manager*). Sedangkan reksadana syariah (*Islamic investment funds*) adalah reksadana yang diinvestasikan pada produk-produk yang halal menurut syariat Islam. Sejauh ini tercatat baru dua perusahaan manajer investasi yang beroperasi di Indonesia, yakni PT Danareksa dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Seperti juga perbankan syariah, nilai kapitalisasi reksadana syariah di Indonesia masih terbilang kecil. Seperti dilaporkan pengamat reksadana dan pasar modal Iggi H Achsien, hingga Juli 2000 kapitalisasi nilai aktiva bersihnya hanya Rp 29,9 milyar. “Sekedar 0,55% dari total kapitalisasi reksadana,” .PT PNM -melalui PT PNM Invesment Management- tahun ini telah menerbitkan dua jenis reksadana sebanyak empat miliar unit yang ditargetkan terserap pasar dalam dua tahun kedepan dengan nilai sedikitnya Rp 4 triliun. Kedua jenis reksa dana itu diberi nama PNM Syariah dan PNM Dana Sejahtera yang masing-masing memiliki karakter investasi yang berbeda dengan segmentasi pasar yang berbeda pula. Menurut Direktur PNM Invesment Management Hendarto,

seperti dikutip *Bisnis Indonesia*, PNM Syariah merupakan reksa dana campuran yang investasinya di arahkan ke efek ekuitas, efek utang, serta instrumen pasar uang dari perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan PNM Dana Sejahtera merupakan reksa dana berpendapatan tetap (*fix income fund*) yang investasinya ditujukan ke efek utang dan instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh BUMN atau pemerintah, serta efek ekuitas yang tercatat di bursa efek. “Jumlah unit yang ditawarkan oleh masing-masing reksa dana adalah 2 miliar unit. Dalam dua tahun kedepan kedua jenis reksadana akan terserap seluruhnya oleh pasar,” katanya optimis. Dalam memasyarakatkan dan menjual reksadana syariah, PT PNM Investment Management mengajak dua bank yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri sebagai bank penerima pembayaran reksa dana, sekaligus agen penjualannya. PNM Investment Management juga menunjuk sejumlah institusi jadi penjual reksadana syariah produk PNM secara ritel. Institusi itu antara lain PT Asuransi Takaful Keluarga, PT Asuransi Takaful Umum, *Tazkia Institute*, PT Jaring Global Nusantara, serta PT Lintasinso. Untuk menarik minat investor komunitas Muslim, akhir April lalu Bursa Efek Jakarta dan PT Danareksa Sekuritas meluncurkan Indeks Syariah yang populer dengan nama *Jakarta Islamic Index* (JII). Divisi Komunikasi Perusahaan BEJ menyatakan perusahaan yang sahamnya akan dimasukkan

ke dalam penghitungan Indeks Syariah harus lebih dulu lolos saringan Dewan Syariah Nasional. Dirut Danareksa *Invesment Management* Iwan Pontjowinoto, seperti disitir *Bisnis Indonesia* menyatakan pihaknya akan membantu BEJ dalam memilih emiten (perusahaan peserta pasar modal) yang layak masuk dalam daftar tersebut. Pada tahap pertama akan dipilih sekitar 28 hingga 36 emiten, selanjutnya dalam jangka waktu tiga tahun akan dikembangkan menjadi 70 emiten, jelasnya. Dia mengungkapkan perusahaan yang bisa menjadi emiten syariah harus memenuhi beberapa syarat, pertama, hasil usahanya tidak mengandung unsur riba. Kedua, produk atau jasa yang dihasilkan tidak dikategorikan haram, misal minuman keras, rokok, hotel, perbankan, industri senjata atau bahan peledak. Ketiga, memberikan informasi yang transparan. Keempat, rasio utang terhadap modal memenuhi ketentuan. Kelima, rasio piutang terhadap pendapatan juga harus memenuhi ketentuan. Peluang usaha syariah yang berprospek baik lainnya adalah dana pensiun syariah. Lagi-lagi alasannya berupa besarnya jumlah masyarakat Muslim di negeri ini. Tahun ini sudah ada dua perusahaan yang memberanikan diri terjun dalam bisnis Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah, yakni BMI dan Principal Indonesia. Tahun ini BMI memproyeksikan pengumpulan iuran peserta Dana Pensiun Muamalat (DPLK syariah) sebesar Rp 7 miliar. Sampai Juli 2000 BMI telah

mengumpulkan iuran sebesar Rp 3 miliar pada posisi Juli dengan jumlah 4.700 peserta dari 14 perusahaan.

B. Muhammadiyah dan Gerakan Ekonomi Islam

Berbagai latar belakang reaksi, strategi dan tujuan yang mengedepan ketika umat Islam diperhadapkan pada masalah ekonomi. Reaksi umat Islam terhadap peminggiran ekonominya seperti analisis Hefner, Nasional-Statis, Ekonomi populis dan Kerjasama tentunya tidak berarti menunjukkan kategori-kategori yang ketat secara strategis dan ideologis. Perkembangan ekonomi populis yang direpresentasikan pada gerakan ekonomi Islam berkembang pesat dengan berbagai diversifikasi dan modifikasi. Setidaknya-tidaknya ada tiga kelompok kepentingan muncul dewasa ini, yakni kaum oportunis, syari'ah sentris dan kelompok Islam transformatif. Munculnya ketiga kelompok ini dimungkinkan karena gerakan ini memenuhi standar ideologi-idealitas atau objektif-empiris. Meskipun hubungan sejarah gerakan ekonomi Islam lebih cenderung pada gerakan Islam transformatif.

Muhammadiyah yang lahir pada tahap ideologi, berkembang dengan kesadaran teologis (subjektif-normatif) melakukan gerakan dakwah Islam dengan merujuk firman Allah dalam surah *Ali imran* : 114. Mencoba memahami realitas dengan berupaya menumbuhkan masyarakat rasional-nilai (modernisasi). Membentuk kepribadian Islam yang modernis, melakukan institusionalisasi sosial dengan

mendirikan Sekolah, Rumah Sakit dan Panti Asuhan. Melakukan upaya purifikasi terhadap unsur-unsur *takhayyul*, *bid'ah* dan *khurafat* dalam ritual keagamaan..

Gerakan ekonomi Islam yang hadir pada tahap ilmu, berkembang dengan kesadaran sosiologis. Refleksi objektif-empiris gerakan ekonomi Islam fokus pada realitas kondisi umat yang tidak berdaya secara ekonomi, menghadapi tantangan ekonomi konglomerasi, eksploitasi dan moralitas pelaku ekonomi. Gerakan ini bertujuan membentuk karakter ekonomi Islami yang modernis. Melakukan pelebagaan syari'ah Islam dalam bentuk lembaga Bank, BMT, Asuransi, Pegadaian dan lainnya. Melakukan upaya purifikasi atas unsur-unsur riba dalam ekonomi. keuangan, asuransi.

Sebagaimana pandangan Bahtiar Efendy, dapat dikatakan Muhammadiyah dengan generasi baru Islam pada tahun 1970-an dan 1980-an memiliki hubungan yang erat. Sejak depolitisasi yang memunculkan gerakan kultural Islam, perkembangan Islam menjadi lebih beragam dan aktual secara peran dan fungsional yang sebenarnya merupakan kader-kader organisasi modernis pra orde baru. Gerakan ekonomi Islam adalah bagian dari pemikiran intelektual dan aktivis dasawarsa 1970-an tersebut. Sehingga mata rantai gerakan Muhammadiyah dan gerakan ekonomi Islam adalah pada kemajuan dibidang pendidikan.

Secara umum dapat dikatakan keberhasilan gerakan Islam kultural, tidak lepas dari upaya-upaya Muhammadiyah melakukan gerakan institusionalisasi persoalan-persoalan sosial. Dukungan semangat berorganisasi yang kuat dan pembentukan

kepribadian yang cinta pada ilmu menjadi modal Muhammadiyah dalam turut melahirkan cendekiawan-cendekiawan tahun 1970 – 1980-an . Pergeseran-pergeseran persoalan bangsa dari masalah politik ke masalah ekonomi dan kondisi etatisme terlebih lagi munculnya gerakan Islam yang semakin kritis secara sosial-filosofis menjadi awal lahirnya nuansa refleksi gerakan Islam kultural yang objektif-empiris.

Meskipun demikian akhir-akhir ini daya kritis Muhammadiyah dalam perubahan zaman sedang digugat oleh banyak kalangan. Pada persoalan ekonomi, seperti konsep ekonomi Muhammadiyah yang telah diuraikan di depan, nampaknya konsep tersebut tidak didasari pada pengkajian yang mendalam terhadap persoalan ekonomi umat dan persoalan teori-teori ekonomi Muhammadiyah lebih melihat masalah ekonomi dari ketertinggalan Islam secara makro dan secara mikro pada sisi moral dan ahklak pelaku, yang semakin jauh dari nilai-nilai agama.

Akan halnya dalam mencermati program kerja Muhammadiyah tahun 2000-2005 pada bagian ekonomi dan kewiraswastaan, nampaknya ada sikap ambivalensi dalam menentukan tipologi ekonomi. Dalam program tersebut disebutkan adanya upaya menuju ke pengkajian dan penggalan sistem dan teori ekonomi Islam namun dilain pihak *grand concept* ekonomi Muhammadiyah sangat bersipat *industrialis* dan *profit oriented*. Berdasarkan alasan-alasan terbentuknya Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) dengan konsep jami'ah jaringan ekonomi Muhammadiyah hanya berkaitan dengan peluang dan potensi ekonomi semata.

C. Uji Perbedaan Komitmen dan Sikap Anggota Muhammadiyah

Secara individual anggota Muhammadiyah sebenarnya telah mengambil peran bahkan menjadi pioner aktivitas gerakan transformasi sosial masyarakat. Keberadaan Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak lepas dari pengaruh intelektual-intelktual Muhammadiyah yang tentunya merupakan kader-kader yang loyal.¹⁰³ Pertanyaan mendasar dalam tesis ini adalah apakah ada perbedaan sikap anggota Muhammadiyah dipandang dari latar belakang lingkungan yang cenderung agraris atau industrialis, desa atau kota bahkan kota atau metropolitan. Salah satu tujuan penulisan tesis ini ingin mengetahui kemungkinan ada perbedaan komitmen organisasi, komitmen keumatan dan sikap Muhammadiyah terhadap format gerakan ekonomi Islam dipandang dari wilayah. Dalam hal ini wilayah Yogyakarta dan Jakarta.

Sebagaimana dikemukakan pada pendahuluan bahwa wilayah menjadi pertimbangan berdasarkan alasan pada perkembangan dinamis organisasi Muhammadiyah di dua wilayah utama yakni Jakarta dan Yogyakarta. Kemudian dinamika pembangunan dan gejala industrialisasi dapat saja berkaitan dengan sikap kecenderungan individualitas dan sosialitas. Sebagaimana dipahami dalam teoriti yang dikemukaakan Kuntowijoyo bahwa perkembangan sikap dan perilaku masyarakat berkaitan dengan perkembangan kecenderungan lingkungan dari tahapan

¹⁰³ Robert W. Hefner dalam Mark R. Woodward, ed." *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*", Cet.II (Yogyakarta, Mizan,1999), hal. 261-262

agraris sampai ke tahapan industrialis. Wilayah Jakarta adalah merupakan kota bercirikan metropolitan –industrialis dan Yogyakarta Agraris - semi industrialis.

Melalui analisis kuantitatif dengan menggunakan uji independent t-test, penulisan melakukan riset lapangan atas tiga puluh (30) orang tokoh Muhammadiyah di wilayah Jogjakarta dan Jakarta. Untuk menganalisis kemungkinan ada perbedaan komitmen organisasi, keumatan dan sikap Muhammadiyah terhadap format gerakan ekonomi Islam ditinjau dari wilayah dengan kriteria tertentu maka penelitian ini disusun atas asumsi-asumsi, identifikasi variabel penelitian, definisi operasional penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan hasil penelitian.

1. Asumsi-asumsi

Asumsi – asumsi terhadap adanya perbedaan wilayah yang memberi pengaruh atas komitmen keumatan dan sikap terhadap gerakan ekonomi Islam.

- Wilayah Jogjakarta merupakan tempat lahirnya organisasi Muhammadiyah memiliki karakteristik ekonomi tradisional dan industri kecil dengan ciri masyarakat toleran, solider dan emosional. Karakteristik seperti ini tentunya dapat membentuk komitmen keumatan, komitmen organisasi serta sikap emosional warga Muhammadiyah terhadap gerakan ekonomi Islam.

- Wilayah Jakarta tempat dimana Muhammadiyah bergerak lebih strategis-struktural dalam memperjuangkan kepentingannya secara nasional memiliki karakteristik ekonomi industri-metropolis dengan ciri masyarakat individualis, dinamis dan rasional. Karakteristik tersebut tentunya berpengaruh sebaliknya atas komitmen keumatan dan sikap terhadap gerakan ekonomi Islam.

2. Identifikasi dan Definisi Istilah Variabel Penelitian

Identifikasi variabel penelitian terdiri atas :

Wilayah, Komitmen Umat, Komitmen Organisasi, Sikap terhadap Format Gerakan Ekonomi Islam

- a. Sikap terhadap Format Gerakan Ekonomi Islam

Suatu respon evaluatif, setuju (*agree*) atau tidak setuju (*disagree*) terhadap institusionalisasi gerakan ekonomi Islam.

- b. Gerakan Islam

Gerakan Islam adalah gerakan yang bertujuan memperbaharui cara berpikir dan cara hidup umat Islam. Aspek yang menjadi perhatian utama gerakan Islam yakni pembaharuan yang lebih menekankan aspek sosial politik yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan pemurnian ajaran Islam.

- c. Gerakan Ekonomi Islam

Gerakan ekonomi Islam adalah gerakan Islam yang menghendaki adanya perubahan sosial menjadi lebih baik (transformatif) dengan mendorong kemajuan ekonomi umat Islam serta merubah pandangan ekonomi agar sesuai dengan syari'ah Islam

d. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah tekad serius untuk bertanggung jawab, mau mengembangkan dan memiliki obsesi masa depan terhadap kemajuan organisasi yang dituangkan dalam bentuk gagasan, konsep dan kebijakan

e. Komitmen Keumatan

Komitmen keumatan adalah tekad serius terhadap penuntasan masalah sosial ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam gagasan, konsep dan kebijakan

f. Wilayah

Daerah domisili responden yang dibagi atas wilayah Jogjakarta dan wilayah Jakarta

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh Muhammadiyah yang berdomisili di wilayah Jogjakarta dan jakarta, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Beragama Islam
- b. Berpendidikan akhir SLTA

- c. Dibesarkan dalam lingkungan organisasi Muhammadiyah aktif di organisasi Muhammadiyah mulai dari pengurus tingkat cabang sampai pengurus Pusat di berbagai organisasi kegiatan Muhammadiyah (meliputi pengurus Muhammadiyah Pusat, wilayah, Cabang dan ranting serta organisasi otonom (Pemuda Muhammadiyah, Aisyiyah, IMM dan IRM) dengan berprofesi sebagai Guru, Wiraswasta, pengurus LSM, wartawan dan dosen
- d. Berdomisili dalam wilayah penelitian minimal 10 tahun

4. Metode Pengumpulan Data

Data dari seluruh variabel dalam penelitian ini diperoleh melalui metode angket. Metode ini digunakan dengan alasan :

- a. Subjek adalah orang yang memiliki pengaruh serta merupakan representasi kelompoknya.
- b. Pernyataan subjek dapat dipercaya
- c. Interpretasi subjek tentang pertanyaan peneliti adalah sama dengan maksud peneliti.

Angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket komitmen organisasi, angket komitmen umat dan angket sikap terhadap format gerakan ekonomi Islam.

1. Angket Komitmen Organisasi dan Keumatan

Angket ini dinamakan KOMITOR untuk komitmen terhadap organisasi dan KOMITUM untuk komitmen keumatan. Disusun oleh peneliti dan dirancang dalam 9 aitem KOMITOR dan KOMITUM 8 aitem. Meliputi delapan aspek yang

sama, yaitu aspek prioritas tugas, memelihara keberlangsungan hidup organisasi, kepercayaan, kewajiban, ikrar, garansi, dukungan, kepastian pilihan moral.

2. Angket Sikap Terhadap Format Gerakan Ekonomi Islam

Angket ini dinamakan SIKAFGEI disusun berdasarkan 6 aspek yang menjadi fenomena dalam gerakan ekonomi Islam masing-masing, prinsip bagi hasil, pemberdayaan masyarakat, institusionalisasi ekonomi Islam, pendidikan ekonomi Islam, jaringan bisnis dan pembentukan infrastruktur sistem ekonomi Islam, sosialisasi ekonomi Islam.

Tiap aitem dalam angket memiliki enam alternatif jawaban, yakni sangat setuju, setuju, cukup setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Semuanya item pertanyaan adalah *agree*, jawaban sangat setuju skor 6, setuju skor 5, cukup setuju skor 4, kurang setuju skor 3, tidak setuju skor 2, sangat tidak setuju skor 1.

5. Metode Analisis Data

Data dianalisis dengan metode Independent sample T-Test. Teknik ini digunakan untuk mengetahui perbedaan komitmen dan sikap terhadap sampel yang memiliki latar belakang aktivitas dan bentuk organisasi yang sama terhadap pengaruh lingkungan yang berbeda. Sebelum dilakukan analisis terlebih dahulu dilakukan uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas sebaran. Uji data dan analisis data menggunakan program SPSS/PC+ versi 7.5 dan program SHAZAM-IBM-PC Version Site No.13-0.

a. Uji Validitas

Angket untuk variabel sikap dikembangkan menjadi 30 aitem. Kemudian dilakukan try out, yang selanjutnya diuji validitasnya dengan program statistik korelasi *product moment*. Koefisien r tabel untuk N sebanyak 30 orang dengan taraf implikasi 0,05 ditemukan koefisien r sebesar = 0,321. Hasil analisis statistik ditemukan koefisien r hitung diatas r tabel dengan nilai koefisien sebesar = 0,345. Hal ini berarti aitem yang nilai koefisiennya diatas 0,321 dinyatakan valid. Namun yang berada dibawah 0,321 dinyatakan tidak valid. Sehingga item yang tidak valid adalah aitem nomor var00002, var00004, var000018, var000019, var000020, var000021, var000023.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menemukan konsistensi angket pada variabel penelitian. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara belah dua kelompok nomor atas (16- 30) dan bawah (1- 15). Hasil analisis korelasi ditemukan koefisien r hitung = 0,715. Jika dikonsultasikan dengan r tabel untuk n = 30 dan taraf signifikan 0,05 koefisiennya adalah 0,321. Dengan demikian r hitung > r tabel. Artinya angket tersebut reliabel.

c. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan menganalisis data menggunakan teknik statistik chi square. Dari hasil analisis normalitas ditemukan koefisien chi square untuk variabel komitor ($x^1 = 3,9548$), komitum ($x^2 = 2,9304$) dan sikafgei

($\chi^2 = 58991$). Jika dikonsultasikan dengan χ^2 tabel dengan $df = 2$ dan taraf signifikansi 0,05 ditemukan hasil sebesar 5,9915. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecenderungan sebaran data untuk variabel komitor χ^2 hitung $< \chi^2$ tabel = normal, komitum χ^2 hitung $< \chi^2$ tabel = normal dan sikapgei χ^2 hitung $< \chi^2$ tabel = normal.

c. Uji Beda

Hasil analisis T-Tes independent sample test menunjukkan bahwa komitor menunjukkan angka rata-rata (mean) 45,3333 untuk AM (anggota Muhammadiyah) wilayah Jogjakarta dan 45,53333 untuk AM wilayah Jakarta. Pengambilan keputusan : Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak. Terlihat bahwa F hitung untuk komitor 0,185 dengan probabilitas 0,670. Karena probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima. Hal ini menunjukkan tidak ada perbedaan komitor antara AM wilayah Jogjakarta dan AM wilayah Jakarta.

Komitum menunjukkan angka rata-rata (mean) 31,9333 untuk AM (anggota Muhammadiyah) wilayah Jogjakarta dan 35,4000 untuk AM wilayah Jakarta. Pengambilan keputusan : Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak. Terlihat bahwa F hitung untuk komitor 0,098 dengan probabilitas 0,756. Karena probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima. Hal ini menunjukkan ada perbedaan komitum AM wilayah Jogjakarta dan AM wilayah Jakarta. *Mean difference* dengan equal variance not assumed maka komitum =

$31,9333 - 35,4000 = 3,4667$. Lower $-6,2393$ (perbedaan rata-rata bagian bawah) dan upper -6941 (perbedaan rata-rata bagian atas). Dengan demikian perbedaan komitum berkisar antara $-6,2393$ sampai $-0,6941$ dengan rata-rata 3, 4..

Sikapgei menunjukkan angka rata-rata (mean) 45,3333 untuk AM (anggota Muhammadiyah) wilayah Jogjakarta dan 45, 53333 untuk AM wilayah Jakarta. Pengambilan keputusan : Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak. Terlihat bahwa F hitung untuk komitor 0,185 dengan probabilitas 0,670. Karena probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima. Hal ini menunjukkan tidak ada perbedaan sikapgei antara AM wilayah Jogjakarta dan AM wilayah Jakarta

Hasil penelitian ini menunjukkan :

1. Tidak ada perbedaan komitmen organisasi antara Muhammadiyah Jakarta dan Muhammadiyah Jogyakarta
2. Ada perbedaan komitmen keumatan antara Muhammadiyah Jakarta dan Muhammadiyah Jogyakarta
3. Tidak ada perbedaan sikap terhadap format gerakan ekonomi Islam antara Muhammadiyah Jakarta dan Muhammadiyah Jogjakarta

Dalam matrik digambarkan perbedaan tersebut dengan ukuran identik untuk tidak menunjukkan perbedaan dan tidak identik untuk menunjukkan adanya perbedaan. Nilai nominal atas perbedaan tersebut dinyatakan dalam tinggi dan rendah sebagaimana dalam kolom berikut ini :

Tabel.1.C.
Uji Beda Statistik Sikap dan Komitmen Muhammadiyah
Menurut Wilayah

Wilayah	Komitor	Komitum	Sikapgei
Jakarta	Identik	Tidak identik rendah	Identik
Jogjakarta	Identik	Tidak identik tinggi	Identik

D. Komitmen Organisasi, Komitmen Keumatan dan Sikap Muhammadiyah terhadap Format Gerakan Ekonomi Islam

Berdasarkan data hasil angket responden secara keseluruhan ditafsirkan bahwa antusiasme responden (selanjutnya disebut anggota Muhammadiyah) terhadap komitmen pada organisasi sangat tinggi hal ini ditunjukkan oleh semangat untuk tetap melestarikan, memperjuangkan dan mengembangkan organisasi sebagaimana tercermin dalam tabel. B.1. Anggota Muhammadiyah memiliki komitmen yang kuat untuk membawa organisasi ke masa depan dengan lebih baik. Sangat kuat keinginan anggota Muhammadiyah untuk melakukan perubahan, dimana visi dan target kedepan tidak hanya sekedar menonjol dalam pembangunan fisik. Anggota Muhammadiyah memiliki ketaatan yang lebih tinggi atas putusan majelis tarjih dari pada himbauan, kebijakan atau putusan PP Muhammadiyah. Anggota Muhammadiyah sangat mendukung organisasi berkiprah di bidang bisnis di banding Muhammadiyah aktif dibidang politik. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi Muhammadiyah tetap relevan membawa misi gerakan Islam kontemporer karena

loyalitas anggotanya. Berkaitan dengan hubungan komitmen organisasi dengan sikap positif dan peran aktif dalam gerakan ekonomi Islam dapat ditentukan oleh ketegasan-ketegasan putusan majelis tarjih khususnya mengenai bunga bank dan dukungan terhadap pengembangan bisnis berdasarkan syari'ah.

Tabel. B.1
Komitmen Organisasi
Anggota Muhammadiyah

Item	Nilai						Total Skor	Rata-rata
	6	5	4	3	2	1		
	SS	S	CS	KS	TS	STS		
1. Anggota Muhammadiyah lebih mementingkan organisasi dari pada keluarga	90	30	12	18	0	0	150	5
2. Organisasi Muhammadiyah sudah saatnya memperbaharui visi dan target kegiatannya tidak sekedar pembangunan mesjid, Sekolah dan Panti Asuhan	120	45	0	3	0	0	168	5.6
3. Anggota Muhammadiyah harus Aktif dalam pertemuan-pertemuan rutin organisasi	78	60	4	9	2	0	153	5.1
4. Anggota Muhammadiyah menyisihkan waktu yang luang untuk perkembangan Organisasi	60	90	8	0	0	0	158	5.2
5. Anggota Muhammadiyah Mematuhi putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam masalah syari'ah Islam	84	55	16	3	0	0	158	5.2
6. Anggota Muhammadiyah Mematuhi himbauan PP Muhammadiyah berhubungan dengan pengembangan organisasi	36	70	28	6	2	0	142	4.7
7. Anggota Muhammadiyah Mendukung Muhammadiyah bergerak di bidang bisnis	102	50	8	3	-	-	163	5.4
8. Anggota Muhammadiyah berpartisipasi di Partai-partai Islam	24	40	44	15	4	-	127	4.2
9. Anggota Muhammadiyah mendukung Kebijakan dan tindakan atas nama Pimpinan	48	60	32	6	-	-	146	4.8

tindakan atas nama Pimpinan Muhammadiyah								
Total								45.5
Rata-rata keseluruhan								5,05

Muhammadiyah bukan hanya organisasi agama tapi juga sebagai organisasi sosial. Dalam tabel. B.2 menunjukkan bahwa komitmen keumatan anggota Muhammadiyah pada umumnya bagus. Anggota Muhammadiyah sependapat bahwa mengatasi krisis ekonomi sebaiknya dimulai dari mendorong partisipasi masyarakat, dilakukan secara terorganisir dan terprogram dan pembelaan terhadap kaum tertindas lebih penting dari pada membendung upaya kristenisasi, perlunya upaya kontrol terhadap berbagai bentuk penyaluran bantuan oleh pemerintah untuk rakyat miskin. Namun kadar antusias anggota Muhammadiyah dalam memilih bentuk keterlibatan aktivitas keumatan yang kongkrit operasional seperti dalam bentuk memperjuangkan aspirasi dalam bentuk demonstrasi, pengelolaan zakat secara produktif tidak menunjukkan tanggapan yang sangat kuat. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya kontroversi terhadap pemikiran-pemikiran strategis-normatif misalnya penyaluran zakat secara produktif atau konsumtif.

Kepekaan sosial anggota Muhammadiyah nampaknya tetap besar meskipun tidak ditunjang oleh program-program organisasi yang kongkrit-strategis namun komitmen keumatan anggota Muhammadiyah sangat mungkin bersipat individual diluar kegiatan rutin organisasi. Berkaitan dengan salah satu dimensi aktivitas gerakan ekonomi Islam yakni pemberdayaan ekonomi rakyat, ada dua hal yang menentukan sikap positif dan peran aktif Muhammadiyah terhadap format gerakan

ekonomi Islam yakni kadar antusiasme terhadap aktivitas keumatan dan konsep pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat dalam tabel.B.2. tidak menunjukkan antusiasme yang tinggi .

Tabel.B.2
Komitmen Keumatan Anggota Muhammadiyah

Item	Nilai						Total Skor	Rata-rata
	6	5	4	3	2	1		
	SS	S	CS	KS	TS	STS		
1. Kepedulian sosial harus difakukan secara terorganisir dan terprogram	72	45	24	6	2	0	149	4.9
2. Demontrasi merupakan alat yang cukup efektif bila dilakukan dengan tertib & aman	42	70	16	6	4	1	139	4.6
3. Mengatasi krisis ekonomi sebaiknya dimulai dari mendorong partisipasi masyarakat dan pengentasan kemiskinan	90	55	12	0	2	0	159	5.3
4. Aktivitas tidak langsung (forum-forum ilmiah) dan langsung (aksi-aksi sosial) sama pentingnya dan harus senantiasa dilakukan	66	80	8	3	0	0	157	5.2
5. Aktivis keumatan lebih mengutamakan kepentingan umat dari pada kepentingan keluarga	36	65	20	18	0	0	139	4.6
6. Aktivis keumatan lebih mengutamakan pembelaan terhadap kaum tertindas dari pada membendung kristenisasi	90	55	4	3	2	1	155	5.1
7. Pemerintah seyogyanya diawasi dalam aktivitas penyaluran bantuan kepada umat	72	70	12	3	0	0	157	5.2
8. Untuk pemberdayaan umat zakat lebih tepat diberikan dalam bentuk zakat produktif	42	60	36	6	0	0	144	4.8
Total								39.9
Rata – rata keseluruhan								4,9

Sikap Anggota Muhammadiyah secara langsung terhadap format gerakan ekonomi Islam menunjukkan respon yang baik. Sikap antusias ditunjukkan bentuk aktivitas ekonomi yang memprioritaskan kesejahteraan umat dari pada keuntungan perusahaan, menyelenggaraan pendidikan khusus ekonomi Islam, penerapan sistem bagi hasil, prinsip-prinsip syari'ah masuk dalam aturan pemerintah membuat sistem dan jaringan ekonomi Islam. Sikap kurang antusias di tunjukkan pada alasan utama pengembangan institusi ekonomi Islam untuk mengatasi kesejahteraan ekonomi umat, tidak tergantung pada pemerintah dan pengelolaan zakat produktif . Sikap anggota Muhammadiyah yang dapat membantu pengembangan gerakan ekonomi Islam adalah kadar antusiasnya pada pengembangan pendidikan dan pengembangan jaringan ekonomi Islam

Tabel. B.3
Sikap Muhammadiyah Terhadap Format Gerakan Ekonomi Islam

Item	NILAI						Total Skor	Rata-rata
1. Menjalankan syari'at Islam dalam berekonomi adalah melakukan kegiatan usaha bebas bunga dan menerapkan sistem bagi hasil	66	75	16	0	0	0	157	5.2
2. Prinsip-prinsip syari'ah seharusnya menjadi bagian aturan dan kebijakan ekonomi pemerintah	72	75	8	3	0	0	158	5.2
3. Dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat maka seharusnya strategi bisnis dan ekonomi dijalankan melalui gerakan pembangunan institusi ekonomi Islam (BMT, BPRS dll)	60	70	20	3	0	0	153	5.1
4. Kemajuan ekonomi umat dapat dicapai tanpa ketergantungan pemerintah	60	80	12	3	0	0	155	5.1

5. Untuk kepentingan kemajuan ekonomi Islam, perlu diajarkan pendidikan khusus ekonomi Islam	96	45	20	0	0	0	161	5.3
6. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang lebih mengutamakan kesejahteraan umat (sosial) daripada keuntungan perusahaan	96	40	16	6	0	0	158	5.2
7. Gerakan ekonomi Islam harus diwujudkan dalam satu wadah Islam, sistem, jaringan bisnis dan keuangan yang khas syariah Islam	72	70	8	6	0	0	156	5.2
8. Pengelolaan zakat secara produktif (modal usaha) merupakan cara terbaik pemberian zakat untuk kesejahteraan masyarakat	48	95	4	6	0	0	153	5.1
Total								41.7
Rata-rata keseluruhan								5,2

E. Generalisasi Sikap Muhammadiyah terhadap Format Gerakan Ekonomi Islam.

Sikap yang sangat mendukung pengembangan dan perkembangan format gerakan ekonomi Islam baik secara organisasi maupun anggota ditunjukkan oleh kehendak Muhammadiyah berkiprah dibidang bisnis, mengembangkan pendidikan ekonomi Islam dan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh loyalitas organisasi yang sangat baik dan komitmen keumatan yang baik. Hambatan-hambatan ditunjukkan oleh ketidak tegasan terhadap bunga bank, konsep pengelolaan zakat untuk pemberdayaan (produktif), langkah-langkah normatif-strategis operasional dalam mengatasi persoalan keumatan demikian serta visi dan misi bisnis Muhammadiyah yang sedang dibangun lebih menunjukkan upaya-upaya pemanfaatan peluang bisnis dalam bentuk *corporate*.

Perubahan dan antusiasme sikap majelis tarjih terhadap format gerakan ekonomi Islam akan sangat membantu perkembangan dan pengembangan gerakan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam komitmen organisasi, loyalitas anggota Muhammadiyah masih tetap memandang paling penting keputusan majelis tarjih dalam berMuhammadiyah utamanya dalam melaksanakan ibadah dan muamalah berdasarkan syari'ah Islam yang benar.

Alasan kenapa Muhammadiyah tidak memanfaatkan jaringan organisasinya untuk kepentingan ekonomi umat. Pertama, Muhammadiyah lebih mengutamakan pembentukan kepribadian individu (*akhlak yang baik*) sebagai tujuan organisasi. Artinya Muhammadiyah memandang masalah ekonomi adalah masalah pendidikan moral. Sehingga pilihan ekonomi yang diperjuangkan tidak memiliki kerangka konsep yang jelas. Kedua, Muhammadiyah menjadi besar berkat dukungan anggota dan simpatisan dengan motif berdasarkan keyakinan subjektif-normatif dengan tujuan pengamalan surah *al-maa'uun*. Alasan utama mereka berkumpul di Muhammadiyah adalah untuk kepentingan aktivitas sosial-kemasyarakatan sebagai bagian dari amal *jariyah* bukan kepentingan ekonomi.

Menurut Asjmuni Abdurahman Pengurus PP Muhammadiyah, pada dasarnya Muhammadiyah memandang gerakan ekonomi Islam adalah salah satu bentuk partisipasi umat Islam yang perlu didukung sebagai reaksi atas ekkses negatif ekonomi kapitalis. Institusionalisasi prinsip-prinsip syari'ah dalam berekonomi adalah sesuatu

yang wajar sebagai ciri dan kepribadian Islam. Partisipasi masyarakat merupakan cermin eksistensi perlu tidaknya gerakan ekonomi Islam.

Namun demikian seperti yang dikatan Syamsul Anwar ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Munir Mul Khan anggota PP Muhammadiyah, Muhammadiyah belum memandang perlu ada ketegasan perilaku didalam memilih gerakan ekonomi Islam atau menolak realitas ekonomi modern (kapitalis). Alasan-alasan yang dikemukakan, pertama, Gerakan ekonomi Islam dianggap belum secara meyakinkan menemukan pijakan konseptual-operasional. Kedua, reaksi masyarakat menjadi ukuran perlu tidaknya ketegasan pilihan dalam sikap berekonomi yang tentunya tercermin dalam keputusan majelis tarjih Muhammadiyah. Keempat, dengan dasar tersebut Muhammadiyah memandang ekonomi konvensional (kapitalis) berada pada kondisi darurat yang perlu dikawal dan secara bertahap dibenahi atau ditingalkan. Menurut Sukriyanto AR bendahara PP Muhammadiyah, Muhammadiyah tetap menganggap pembentukan perilaku pelaku ekonomi lebih penting dari pada upaya-upaya institusionalisasi syari'ah di bidang ekonomi dalam rangka menciptakan sistem ekonomi Islam.

Ada beberapa catatan penting atas sikap persetujuan Muhammadiyah terhadap gerakan ekonomi Islam yang berkaitan dengan bagaimana perilaku Muhammadiyah dalam berekonomi.

1. Muhammadiyah tidak merekomendasi secara tegas pilihan-pilihan dalam berekonomi. Keterlibatan dalam gerakan ekonomi Islam merupakan inisiatif dan keputusan non organisasi
2. Gerakan ekonomi Islam dianggap belum secara meyakinkan menemukan pijakan konseptual-operasional.
3. Muhammadiyah meyakini ekonomi konvensional (kapitalis) berada pada kondisi darurat yang perlu dikawal dan secara bertahap dibenahi atau mungkin ditingalkan.
4. Muhammadiyah tetap menganggap pembentukan perilaku pelaku ekonomi (etika) lebih penting dari pada upaya-upaya institusionalisasi syari'ah (hukum) di bidang ekonomi dalam rangka menciptakan sistem ekonomi Islam.



BAB. V PENUTUP

A. Kesimpulan

Muhammadiyah dan Gerakan Ekonomi Islam merupakan gerakan sosial-keagamaan yang berkembang secara kultural dengan misi Islamisasi dan modernisasi. Kedua gerakan ini berkembang di era modern dalam rentang waktu dan tantangan yang berbeda. Muhammadiyah lahir pada tahapan masyarakat ideologi berjuang dengan strategi pemberdayaan pendidikan, kesehatan dan pemeliharaan masyarakat. Titik tolak pemikirannya adalah normatif-subjektif. Gerakan ekonomi Islam lahir pada tahapan masyarakat ilmu dengan strategi perjuangan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya umat Islam. Titik tolak pemikirannya adalah objektif-empiris. Hubungan antara Muhammadiyah dan gerakan ekonomi Islam adalah pada kemajuan di bidang pendidikan.

Sikap dan komitmen yang sangat mendukung pengembangan dan perkembangan format gerakan ekonomi Islam baik secara organisasi maupun anggota ditunjukkan oleh kehendak Muhammadiyah berkiprah dibidang bisnis, mengembangkan pendidikan ekonomi Islam dan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh loyalitas organisasi sangat baik dan komitmen keumatan yang baik. Hambatan-hambatan ditunjukkan oleh ketidak tegasan terhadap bunga bank, konsep pengelolaan zakat produktif, langkah-langkah normatif-strategis operasional dalam

mengatasi persoalan keumatan demikian serta visi dan misi bisnis Muhammadiyah yang sedang dibangun lebih menunjukkan upaya-upaya pemanfaatan peluang bisnis dalam bentuk *corporate*.

Perubahan dan antusiasme sikap majelis tarjih terhadap format gerakan ekonomi Islam akan sangat membantu perkembangan dan pengembangan gerakan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam komitmen loyalitas sikap anggota Muhammadiyah masih tetap memandang sangat penting keputusan majelis tarjih dalam melaksanakan ibadah dan muamalah berdasarkan syari'ah Islam yang benar.

Ada perbedaan pada komitmen keumatan menunjukkan bahwa aktivitas keumatan yang lebih ril lebih merupakan komitmen individu anggota organisasi. Anggota Muhammadiyah yang berdomisili di wilayah Jakarta nampaknya lebih antusias dan berpandangan objektif-empiris terhadap masalah keumatan dari pada anggota Muhammadiyah yang berdomisili di Jogjakarta yang lebih cenderung berpikir seperti Muhammadiyah konvensional normatif subjektif (syari'ah sentris).

Ada dua alasan kenapa Muhammadiyah tidak memanfaatkan jaringan organisasinya untuk kepentingan ekonomi umat. *Pertama*, Muhammadiyah lebih mengutamakan pembentukan kepribadian individu (akhlak yang baik) sebagai tujuan organisasi. Artinya Muhammadiyah memandang masalah ekonomi adalah masalah pendidikan moral. Sehingga pilihan tipologi ekonomi yang diperjuangkan tidak memiliki kerangka konsep yang jelas. *Kedua*, Muhammadiyah menjadi besar berkat dukungan anggota dan simpatisan dengan motif berdasarkan keyakinan subjektif-

normatif dengan tujuan pengamalan surah *al-maa'uun*. Alasan utama mereka berkumpul di Muhammadiyah adalah untuk kepentingan aktivitas sosial-kemasyarakatan sebagai bagian dari amal *jariyah*.

B. Saran - Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan secara lebih meyakinkan latar belakang komitmen keumatan antara Muhammadiyah Yogyakarta dan Jakarta, Sejahterama otoritas Majelis tarjih Muhammadiyah. Faktor-faktor apa yang mengakibatkan kuatnya komitmen organisasi di Muhammadiyah sehingga dapat tetap eksis dan tidak menunjukkan adanya friksi-friksi yang signifikan. Sejahterama implikasi pengembangan ekonomi-bisnis Muhammadiyah terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi syari'ah (Islam).

C. Keterbatasan Penelitian

Karena keterbatasan dana, penelitian ini bersipat purposive sample dengan jumlah yang terbatas dan belum representatif secara nasional. Perlu dilakukan sampling penelitian yang lebih luas meliputi wilayah Jawa dan luar Jawa untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin 1996. *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas ?* Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Anwar, M. Syafi'i, 1995. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta, Paramadina
- Adnan, M. Akhyar, dkk, 2000. *Study on Factors Influencing Performance of the Best Baitul Maal wat Tamwils (BMTs) In Indonesia*, Jakarta, PT Redecon
- Azwar Karim, Adiwarmanto, 2000. "Menyiapkan SDM dan Lembaga Keuangan Islam di Indonesia", *Makalah Second International Conference Islamic Education and Economic Institution* di Hotel Natour Garuda Yogyakarta, 27-29 Oktober 2000
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999. *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta, Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institute
- Adnan Amal, Taufik, 1989. *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, Bandung, Mizan
- Arifin, Zainul, 1999. *Memahami Bank Syariah, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta, Alfabeta
- Aminudin, 1999. *Kekuatan Islam dan Pergulatan kekuasaan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Azhari, Muntaha, Abdul Mun'im Saleh (ed.). 1989, *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
- Andreski, Stanislav, 1989. Max Weber : *Kapitalisme, Birokrasi dan Agama*, Yogyakarta, Tiara Wacana
- Azis, M. Amin, 2000. "Pinbuk dan Dakwah Ekonomi", Dalam *Republika*, 16 Juli 2000. Jakarta.

Arifin, Syamsul, 2001. "Islam dan Visi Ekonomi Transformatif", Dalam *Republika*, 17 Januari. Jakarta.

Baswir, Revrison, 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar & IDEA

Capra, Fritjof, 1999. *Titik Balik Peradaban, Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, Yogyakarta, Bentang

Castle, Lance, 1967. *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa : Industri Rokok Kudus*, Jakarta, Sinar Harapan

Effendy, Bahtiar, 2001. *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani dan Etos Kewirausahaan*, Yogyakarta, Galang Press.

Gunawan Asep, Dewi Nurjulianti (ed.). 1999. *Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society, Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan*, Jakarta, kerjasama Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dengan The Asia Foundation (TAF)

Hefner, Robert W, 2000. *Islam Pasar Keadilan, Artikulasi Lokal, Kapitalisme, dan Demokrasi*, Terjemahan oleh Amiruddin dkk. Yogyakarta, LKIS

Kamal, Mustafa, (ed.). 1997. *Wawasan Islam dan Ekonomi, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Kuntowijoyo, 1999. *Paradigma Islam Intrepretasi Untuk Aksi*, Bandung, Mizan

-----, 1997. *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung, Mizan

-----, 2001. *Muslim Tanpa Masjid, Esai-Esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, Bandung, Mizan

K.Gama, Judistira, 1997. *Antropologi Agama, Tinjauan Agama dari Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Jurusan Antropologi Universitas Padjadjaran

Kahmad, Dadan, 2000. *Sosiologi Agama, Bandung*, Rosda

Mudzhar, H.M. Atho, 1998. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Mulkhan, Abdul Munir, 2000. *Menggugat Muhammadiyah*, Yogyakarta, Fajar Pustaka

-----, 2000. *Islam Murni Dalam Masyarakat Petani*, Bentang, Yogyakarta

Muhamad, 2000, *Lembaga Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta, UII Press.

Madjid, Nurcholish, 2000. *Islam Dotrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta, Paramadina

MPEM PP Muhammadiyah, Tanpa Tahun. *Paradigma Baru Muhammadiyah, Revitalisasi Gerakan Dakwah dengan Sistem Jami'ah Jaringan Ekonomi Muhammadiyah*, Jakarta, PT.Solar Global Internasional.

Nasution Harun, Azyumardi Azra (ed.). 1985. *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta, yayasan Obor

Nasution, Anwar, 1990. *Tinjauan Ekonomi Atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1988 pada Sistem Keuangan Indonesia*, Jakarta, PT.Gramedia

Peacock, James L, 1986, *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia*, Jakarta, Cipta Kreatif

Pasha, H.Musthafa Kamal, 2000. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

- P3EI UII dan Tiara Wacana, 1992, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta
- R.Woodward, Mark (ed.). 1999. *Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Bandung, Mizan
- Rahardjo, M. Dawam, 1999. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta, Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).
- , 2000, "Format dan Strategi Pengembangan Ekonomi Muhammadiyah dalam Millenium Ketiga", *Kertas Kerja*, Prasaran Seminar dan Lokakarya Format dan Strategi Pengembangan Gerakan Ekonomi Muhammadiyah Memasuki Millenium III, Yogyakarta, tanggal 24 Maret 2000, Hotel Garuda Natour
- Rosecrance, Richard, 1991, *Kebangkitan Negara Dagang*, Terjemahan oleh Budiono Kusumohamidjojo dari *The Rise of Trading State (1986)*. Jakarta, PT Gramedia
- Shihab, Alwi, 1999. *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung, Mizan.
- Shihab, Quraisy, 2000, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan
- Susilo, Y.Sri, dkk. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat
- Santoso, Hasan, Komang Darmawang, 1999. "Peringkat Perusahaan Asuransi 1999" Dalam Laporan Khusus *Investor*, Agustus 1999 No.11, hal. 39-44. Jakarta
- Shiddiqi, Nourouzzaman, 1996. *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Triyuwono, Iwan, 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*, LkiS Yogyakarta
- Toffler, Alvin. 1988. *Kejutan dan Gelombang*, Terjemahan oleh Sri Koesdiyantinah SB dari *Previews and Premises (1983)*. Jakarta, PT. Pantja Simpati

Tuheleley, Said, 2000. “Masa Depan Muhammadiyah: Kualitas Versus Kuantitas”, Dalam *Media Inovasi* No.2 TH. X (2000), hal. 5. Yogyakarta.

Tim Penyusun Program Kerja Muhammadiyah 2000-2005. “Konsep Program Muhammadiyah Periode-2000-2005” Dalam Laporan Serba-Serbi Muktamar *Suara Muhammadiyah* : No. 7 – No. 12. Th.Ke.85/ hal.28-29 dan No. 13.Th.Ke.85/hal. 27- 31.Yogyakarta

Tjandrasasmita, Uka (Ed.), 1984. *Sejarah Nasional Indonesia III*, Jakarta, PN Balai Pustaka.

Van Bruinesen, Martim, 1992. “Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia : Latar Belakang Sosial Budaya” , Dalam *Ulumul Qur’an*, Vol.III No.I (1992), hal. 17. Jakarta.

Weber, Max, 2000. *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Terjemahan oleh Yusuf Priyasudiarja dari *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. Surabaya, Pustaka Prometheus

Yatim, Badri, 2000. *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*, Jakarta, Rajawali Press

Wawancara penulis dengan Asmuny Abdurrahman, *Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pembinaan Tarjih dan Tajdid* pada tanggal 3 Pebruari 2002

Wawancara penulis dengan Syamsul Anwar *Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pusat* pada tanggal 15 Maret 2002

Wawancara penulis dengan Sukriyanto AR *Bendahara Pimpinan Pusat Muhammadiyah* pada tanggal 15 Maret 2002

Wawancara penulis dengan Munir Mul Khan *Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah* pada tanggal 5 April 2002

<http://www.tempo.co.id/harian/fokus/31/2,1,9,id.html-25k>

<http://www.muhammadiyah.or.id/indonesia/amal.php-9k>

<http://www.moslemworld.co.id/bisnis>

<http://www.hidayatullah.com/2000/10/ihwal2.shtml>

<http://www.Majelis Tarjih.com>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⑪ لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ
مَنْ أَمَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّى يُغَيِّرُوا
مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا
مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

⑫ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



⑬ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هَوَّاعَنَّهُ وَآلِهِمْ أَمْوَالُ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا

⑭ تَحَقُّقُ اللَّهِ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ غَافِلٍ

⑮ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

ANGKET PENELITIAN

PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan penelitian yang saya adakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan Islam, maka dengan segala kerendahan hati saya mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi angket berikut.

Angket penelitian ini terdiri atas tiga bagian, yaitu : (1) Komitmen organisasi; (2) Komitmen Keumatan; (3) sikap terhadap format gerakan ekonomi . Untuk itu, saya mohon dengan kerendahan hati kiranya Bapak/Ibu/Saudara mengisi seluruh pertanyaan atau pernyataan dalam angket tersebut. Identitas dan jawaban/tanggapan Bapak/Ibu/Saudara merupakan rahasia pribadi. Untuk itu saya akan menjaga sebaik mungkin kerahasiaan tersebut.

Bantuan Bapak/Ibu/Saudara sangat berarti bagi saya dan semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita, khususnya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan perbankan syari'ah, serta akan menjadi amal kebaikan yang akan diterima oleh Allah SWT.

Terima kasih,
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 3 Agustus 2001
Peneliti,

Mujahid Quraisy, SE



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama	
2. Alamat Responden	
3. Pekerjaan	
4. Pendidikan Terakhir	
5. Riwayat aktivitas di Muhammadiyah	
4. Aktivitas sosial diluar organisasi	 <p>UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA</p>

B.HUBUNGAN ANTARA KOMITMEN ORGANISASI DAN KEUMATAN DENGAN SIKAP TERHADAP FORMAT GERAKAN EKONOMI ISLAM PETUNJUK

Isilah pernyataan dan pertanyaan berikut ini secara jujur dan benar dengan cara melingkari salah satu jawaban a, b, c, d, e, atau f, sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu/Saudara rasakan. Contoh : a, b, ©, d, e, f

A. Komitmen Organisasi

1. Anggota Muhammadiyah yang baik lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan keluarga
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Cuku setuju
 - d. Kurang setuju
 - e. Tidak setuju
 - f. Sangat tidak setuju

2. Anggota Muhammadiyah seharusnya melakukan kegiatan tablig dan pengkaderan untuk menunjukkan loyalitas dan kepentingan kemajuan organisasi
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Cuku setuju
 - d. Kurang setuju
 - e. Tidak setuju
 - f. Sangat tidak setuju

3. Organisasi Muhammadiyah sudah saatnya memperbaharui visi dan target kegiatannya yang hanya berhubungan dengan upaya pembangunan mesjid, pemeliharaan anak yatim, pengembangan sekolah, pengelolaan zakat, dan pengembangan rumah sakit.
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Cukup setuju
 - d. Kurang setuju
 - e. Tidak setuju
 - f. Sangat tidak setuju

4. Menjadi Anggota Muhammadiyah berarti siap menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kemajuan organisasi
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Cukup setuju
 - d. Kurang setuju
 - e. Tidak setuju
 - f. Sangat tidak setuju

5. Untuk kemajuan dan perkembangan organisasi Muhammadiyah maka penting senantiasa ikut terlibat dalam pertemuan-pertemuan baik dalam bentuk rapat, musyawarah maupun muktamar.

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | d. Kurang setuju |
| b. Setuju | e. Tidak setuju |
| c. Cukup setuju | f. Sangat tidak setuju |

6. Agar keberlangsungan hidup Muhammadiyah tetap terjaga anggota organisasi menyisihkan waktunya secara maksimal untuk kepentingan organisasi.

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | d. Kurang setuju |
| b. Setuju | e. Tidak setuju |
| c. Cukup setuju | f. Sangat tidak setuju |

7. Anggota Muhammadiyah seharusnya mengikuti Keputusan tarjih menyangkut syari'ah Islam

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | d. Kurang setuju |
| b. Setuju | e. Tidak setuju |
| c. Cukup setuju | f. Sangat tidak setuju |

8. Anggota Muhammadiyah Seharusnya mengambil kartu anggota KATAM, sesuai keputusan PP Muhammadiyah melalui majelis ekonomi tentang Upaya penghimpunan dana dan pembentukan badan usaha milik Muhammadiyah melalui partisipasi pemilikan KATAM

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | d. Kurang setuju |
| b. Setuju | e. Tidak Setuju |
| c. Cukup | f. Sangat tidak setuju |

9. Program PP Muhammadiyah (Majelis Ekonomi) membentuk jaringan bisnis dan keuangan adalah langkah yang tepat dan harus didukung

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | d. Kurang setuju |
| b. Setuju | e. Tidak Setuju |
| c. Cukup | f. Sangat tidak setuju |

10. Anggota Muhammadiyah seharusnya berpartisipasi dibidang politik melalui partai-partai Islam

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | d. Kurang setuju |
| b. Setuju | e. Tidak Setuju |
| c. Cukup | f. Sangat tidak setuju |

11. Setiap kebijakan dan tindakan atas nama Pimpinan Muhammadiyah seharusnya didukung

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | d. Kurang setuju |
| b. Setuju | e. Tidak setuju |
| c. Cukup setuju | f. Sangat tidak setuju |

B. Komitmen Keumatan

12. Kepedulian pada masalah keumatan seharusnya dilakukan melalui lembaga resmi secara terprogram dan terjadwal.

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | d. Kurang setuju |
| b. Setuju | e. Tidak setuju |
| c. Cukup setuju | f. Sangat tidak setuju |

13. Kegiatan – kegiatan demonstrasi kaum buruh, tukang becak, dan rakyat kecil lainnya adalah cukup efektif sepanjang dilakukan dengan tertib dan aman

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | d. Kurang setuju |
| b. Setuju | e. Tidak setuju |
| c. Cukup setuju | f. Sangat tidak setuju |

14. Untuk mengatasi krisis ekonomi saat ini, maka sebaiknya terlebih dahulu kita mendorong partisipasi masyarakat melalui upaya-upaya pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan .

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | d. Kurang setuju |
| b. Setuju | e. Tidak setuju |
| c. Cukup setuju | f. Sangat tidak setuju |

15. Melakukan pemberdayaan umat berarti menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk perubahan umat terkebelakang menjadi umat yang maju dan sejahtera

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Cukup setuju
- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju
- f. Sangat tidak setuju

16. Kegiatan-kegiatan berupa forum-forum ilmiah dan aktivitas langsung untuk perkembangan dan kemajuan pemberdayaan umat penting senantiasa dilaksanakan dan diikuti

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Cukup setuju
- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju
- f. Sangat tidak setuju

17. Agar keberlangsungan aktivitas keumatan (sosial) tetap terpelihara maka sebaiknya kepentingan keumatan (sosial) lebih diutamakan dari pada kepentingan keluarga.

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Cukup setuju
- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju
- f. Sangat tidak setuju

18. Pembelaan terhadap kaum tertindas lebih utama dan strategis dari pada upaya membendung kristenisasi

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Cukup setuju
- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju
- f. Sangat tidak setuju

19. Pemerintah seyogyanya diawasi dalam aktivitas penyaluran bantuan kepada umat

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Cukup setuju
- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju
- f. Sangat tidak setuju

20 Pemberian zakat seyogyanya diberikan secara produktif (untuk kegiatan usaha) dalam rangka upaya pemberdayaan umat dibidang ekonomi

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Cukup setuju
- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju
- f. Sangat tidak setuju

21. Untuk kepentingan hak asasi manusia maka perjuangan organisasi buruh, masyarakat petani, guru, tukang becak melalui jalan musyawarah atau demonstrasi, merupakan cara yang efektif menyampaikn aspirasi

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Cukup setuju
- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju
- f. Sangat tidak setuju

22. Pemerintah berhak menggusur pedagang kaki lima, tukang becak untuk kemaslahatan umum

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Cukup setuju
- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju
- f. Sangat tidak setuju

C. Sikap Terhadap Format Gerakan Ekonomi Islam

23. Menjalankan syari'ah Islam dalam muamalah ekonomi adalah melakukan kegiatan usaha yang bebas bunga dan menerapkan sistem bagi hasil

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Cukup setuju
- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju
- f. Sangat tidak setuju

24. Prinsip-prinsip syari'ah seharusnya menjadi bagian dari peraturan dan kebijakan ekonomi pemerintah

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Cukup setuju
- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju
- f. Sangat tidak setuju

25. Dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat maka seharusnya strategi bisnis dan ekonomi dijalankan melalui gerakan pembangunan institusi ekonomi Islam (BMT, BPRS, Asuransi Syari'ah dll)

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | d. Kurang setuju |
| b. Setuju | e. Tidak setuju |
| c. Cukup setuju | f. Sangat tidak setuju |

26. Kemajuan ekonomi umat islam dapat dicapai melalui sistem mandiri (tanpa tergantung pemerintah) dengan memperbanyak institusi ekonomi Islam seperti Bank syari'ah, asuransi takafful dan sebagainya

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | d. Kurang setuju |
| b. Setuju | e. Tidak setuju |
| c. Cukup setuju | f. Sangat tidak setuju |

27. Untuk menguasai ekonomi, umat Islam perlu mengajarkan pendidikan khusus ekonomi Islam .

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | d. Kurang setuju |
| b. Setuju | e. Tidak setuju |
| c. Cukup setuju | f. Sangat tidak setuju |

28. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang harus lebih mengutamakan kesejahteraan umat (sosial) daripada keuntungan perusahaan

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | d. Kurang setuju |
| b. Setuju | e. Tidak setuju |
| c. Cukup setuju | f. Sangat tidak setuju |

29. Gerakan ekonomi Islam harus diwujudkan dalam satu wadah Islam dalam bentuk sistem dan jaringan keuangan dan bisnis yang khas syari'ah Islam

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | d. Kurang setuju |
| b. Setuju | e. Tidak setuju |
| c. Cukup setuju | f. Sangat tidak setuju |

30. Pengelolaan zakat yang dilakukan di lembaga keuangan syari'ah secara produktif (modal usaha) merupakan cara terbaik pemberian zakat untuk kesejahteraan masyarakat

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | d. Kurang setuju |
| b. Setuju | e. Tidak setuju |
| c. Cukup setuju | f. Sangat tidak setuju |



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Correlations

Correlations

		TOTAL	VAR00001	VAR00002
Pearson Correlation	TOTAL	1,000	,460*	,245
	VAR00001	,460*	1,000	,998**
	VAR00002	,245	,998**	1,000
Sig. (2-tailed)	TOTAL	,	,011	,192
	VAR00001	,011	,	,000
	VAR00002	,192	,000	,
N	TOTAL	30	30	30
	VAR00001	30	31	31
	VAR00002	30	31	31

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

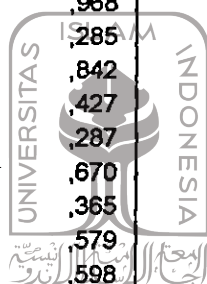
Correlations

Correlations

		TOTAL	VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005
Pearson Correlation	TOTAL	1,000	,460*	,245	,615**	,072	,478**
	VAR00001	,460*	1,000	,431*	,477**	,479**	,348
	VAR00002	,245	,431*	1,000	,217	,263	,409*
	VAR00003	,615**	,477**	,217	1,000	,152	,287
	VAR00004	,072	,479**	,263	,152	1,000	,100
	VAR00005	,478**	,348	,409*	,287	,100	1,000
	VAR00006	,460*	,656**	,405*	,343	,534**	,455*
	VAR00007	,352	,144	,135	,271	-,130	,498**
	VAR00008	,491**	,438*	,162	,401*	,262	,273
	VAR00009	,753**	,467**	,073	,601**	,003	,480**
	VAR00010	,664**	,202	,106	,221	,044	,211
	VAR00011	,401*	,135	,046	,083	-,372*	,305
	VAR00012	,500**	-,271	,065	,223	-,145	,169
	VAR00013	,446*	-,104	-,019	,283	-,157	,052
	VAR00014	,543**	-,039	-,299	,330	-,255	,198
	VAR00015	,345	-,147	-,201	-,070	-,017	-,213
	VAR00016	,464**	,024	,127	,223	-,149	,227
	VAR00017	,371*	,390*	,008	,092	,302	-,005
	VAR00018	,390*	,287	,202	,192	,185	,109
	VAR00019	,399*	-,139	,038	,325	-,449*	,392*
	VAR00020	,555**	,017	-,151	,452*	-,147	,046
	VAR00021	,515**	,061	,201	,159	-,059	,396*
	VAR00022	,061	,038	-,081	-,231	,134	-,176
	VAR00023	,555**	,097	-,171	,435*	,050	-,152
	VAR00024	,482**	,060	-,105	,405*	,061	-,031
	VAR00025	,528**	,194	,100	,326	,048	,045
	VAR00026	,639**	,351	-,021	,598**	-,130	,174
	VAR00027	,475**	,267	,320	,153	-,078	,092
	VAR00028	,542**	-,115	-,080	,359	-,245	,111
	VAR00029	,783**	,311	,030	,426*	,071	,307
VAR00030	,565**	,247	,116	,355	-,034	,422*	

Correlations

	TOTAL	VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005
Sig. (2-tailed)	TOTAL	,011	,192	,000	,705	,008
	VAR00001	,011	,017	,008	,007	,060
	VAR00002	,192	,017	,250	,161	,025
	VAR00003	,000	,008	,250	,422	,124
	VAR00004	,705	,007	,161	,422	,600
	VAR00005	,008	,060	,025	,124	,600
	VAR00006	,011	,000	,026	,064	,002
	VAR00007	,056	,446	,476	,148	,492
	VAR00008	,006	,015	,392	,028	,163
	VAR00009	,000	,009	,702	,000	,986
	VAR00010	,000	,284	,576	,241	,817
	VAR00011	,028	,476	,808	,661	,043
	VAR00012	,005	,147	,734	,237	,446
	VAR00013	,014	,585	,922	,129	,406
	VAR00014	,002	,837	,108	,075	,174
	VAR00015	,062	,439	,286	,711	,930
	VAR00016	,010	,899	,502	,237	,433
	VAR00017	,043	,033	,968	,629	,105
	VAR00018	,033	,124	,285	,309	,327
	VAR00019	,029	,464	,842	,080	,013
	VAR00020	,001	,931	,427	,012	,437
	VAR00021	,004	,748	,287	,400	,759
	VAR00022	,750	,842	,670	,219	,481
	VAR00023	,001	,609	,365	,016	,793
	VAR00024	,007	,754	,579	,026	,747
	VAR00025	,003	,304	,598	,079	,800
	VAR00026	,000	,057	,913	,000	,492
	VAR00027	,008	,153	,084	,421	,682
	VAR00028	,002	,544	,673	,051	,191
	VAR00029	,000	,095	,873	,019	,709
	VAR00030	,001	,187	,543	,054	,860



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Correlations

	TOTAL	VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005
N	TOTAL	30	30	30	30	30
	VAR00001	30	30	30	30	30
	VAR00002	30	30	30	30	30
	VAR00003	30	30	30	30	30
	VAR00004	30	30	30	30	30
	VAR00005	30	30	30	30	30
	VAR00006	30	30	30	30	30
	VAR00007	30	30	30	30	30
	VAR00008	30	30	30	30	30
	VAR00009	30	30	30	30	30
	VAR00010	30	30	30	30	30
	VAR00011	30	30	30	30	30
	VAR00012	30	30	30	30	30
	VAR00013	30	30	30	30	30
	VAR00014	30	30	30	30	30
	VAR00015	30	30	30	30	30
	VAR00016	30	30	30	30	30
	VAR00017	30	30	30	30	30
	VAR00018	30	30	30	30	30
	VAR00019	30	30	30	30	30
	VAR00020	30	30	30	30	30
	VAR00021	30	30	30	30	30
	VAR00022	30	30	30	30	30
	VAR00023	30	30	30	30	30
	VAR00024	30	30	30	30	30
	VAR00025	30	30	30	30	30
	VAR00026	30	30	30	30	30
	VAR00027	30	30	30	30	30
	VAR00028	30	30	30	30	30
	VAR00029	30	30	30	30	30
	VAR00030	30	30	30	30	30

INDONESIA

Correlations

		VAR00006	VAR00007	VAR00008	VAR00009	VAR00010	VAR00011
Pearson	TOTAL	,460*	,352	,491**	,753**	,664**	,401*
Correlation	VAR00001	,656**	,144	,438*	,467**	,202	,135
	VAR00002	,405*	,135	,162	,073	,106	,046
	VAR00003	,343	,271	,401*	,601**	,221	,083
	VAR00004	,534**	-,130	,262	,003	,044	-,372*
	VAR00005	,455*	,498**	,273	,480**	,211	,305
	VAR00006	1,000	,346	,289	,271	,332	,227
	VAR00007	,346	1,000	-,055	,461*	,248	,649**
	VAR00008	,289	-,055	1,000	,615**	,298	,044
	VAR00009	,271	,461*	,615**	1,000	,379*	,466**
	VAR00010	,332	,248	,298	,379*	1,000	,450*
	VAR00011	,227	,649**	,044	,466**	,450*	1,000
	VAR00012	-,098	,203	,172	,356	,384*	,063
	VAR00013	-,042	,010	,005	,293	,109	-,073
	VAR00014	-,174	,042	,367*	,613**	,224	,285
	VAR00015	-,044	-,329	,051	,011	,365*	-,080
	VAR00016	-,096	,188	,150	,253	,497**	,194
	VAR00017	,339	-,125	,328	,117	,331	-,102
	VAR00018	,377*	-,282	,327*	,181	,149	-,048
	VAR00019	-,293	-,024	,086	,347	,039	,090
	VAR00020	-,066	,025	,267	,332	,289	-,047
	VAR00021	,164	,031	,157	,178	,284	-,121
	VAR00022	,250	-,014	,069	-,158	,079	-,079
	VAR00023	,097	,016	-,013	,307	,324	,195
	VAR00024	,053	,195	,000	,377*	,154	,187
	VAR00025	,206	,070	,136	,249	,506**	,114
	VAR00026	,110	,367*	,359	,709**	,552**	,491**
	VAR00027	,261	,411*	-,037	,221	,537**	,542**
	VAR00028	-,236	,023	,100	,450*	,078	,107
	VAR00029	,230	,112	,215	,533**	,460*	,200
	VAR00030	,303	,363*	,354	,586**	,349	,534**

INDONESIA

Correlations

		VAR00006	VAR00007	VAR00008	VAR00009	VAR00010	VAR00011
Sig.	TOTAL	,011	,056	,006	,000	,000	,028
(2-tailed)	VAR00001	,000	,446	,015	,009	,284	,476
	VAR00002	,026	,476	,392	,702	,576	,808
	VAR00003	,064	,148	,028	,000	,241	,661
	VAR00004	,002	,492	,163	,986	,817	,043
	VAR00005	,012	,005	,144	,007	,262	,101
	VAR00006	,	,061	,121	,147	,073	,229
	VAR00007	,061	,	,772	,010	,186	,000
	VAR00008	,121	,772	,	,000	,110	,817
	VAR00009	,147	,010	,000	,	,039	,009
	VAR00010	,073	,186	,110	,039	,	,013
	VAR00011	,229	,000	,817	,009	,013	,
	VAR00012	,607	,282	,364	,053	,036	,742
	VAR00013	,824	,957	,977	,117	,567	,701
	VAR00014	,357	,824	,046	,000	,234	,126
	VAR00015	,819	,075	,789	,952	,048	,674
	VAR00016	,612	,319	,428	,177	,005	,305
	VAR00017	,067	,509	,077	,539	,074	,593
	VAR00018	,040	,131	,078	,339	,433	,802
	VAR00019	,117	,899	,653	,060	,839	,636
	VAR00020	,728	,895	,154	,073	,121	,806
	VAR00021	,387	,869	,407	,346	,128	,524
	VAR00022	,183	,939	,716	,404	,678	,677
	VAR00023	,609	,934	,947	,099	,081	,301
	VAR00024	,780	,303	1,000	,040	,416	,323
	VAR00025	,276	,714	,474	,185	,004	,550
	VAR00026	,562	,046	,051	,000	,002	,006
	VAR00027	,163	,024	,844	,240	,002	,002
	VAR00028	,209	,905	,597	,013	,680	,575
	VAR00029	,221	,554	,253	,002	,011	,289
	VAR00030	,104	,049	,055	,001	,059	,002

INDONESIA

Correlations

		VAR00006	VAR00007	VAR00008	VAR00009	VAR00010	VAR00011
N	TOTAL	30	30	30	30	30	30
	VAR00001	30	30	30	30	30	30
	VAR00002	30	30	30	30	30	30
	VAR00003	30	30	30	30	30	30
	VAR00004	30	30	30	30	30	30
	VAR00005	30	30	30	30	30	30
	VAR00006	30	30	30	30	30	30
	VAR00007	30	30	30	30	30	30
	VAR00008	30	30	30	30	30	30
	VAR00009	30	30	30	30	30	30
	VAR00010	30	30	30	30	30	30
	VAR00011	30	30	30	30	30	30
	VAR00012	30	30	30	30	30	30
	VAR00013	30	30	30	30	30	30
	VAR00014	30	30	30	30	30	30
	VAR00015	30	30	30	30	30	30
	VAR00016	30	30	30	30	30	30
	VAR00017	30	30	30	30	30	30
	VAR00018	30	30	30	30	30	30
	VAR00019	30	30	30	30	30	30
	VAR00020	30	30	30	30	30	30
	VAR00021	30	30	30	30	30	30
	VAR00022	30	30	30	30	30	30
	VAR00023	30	30	30	30	30	30
	VAR00024	30	30	30	30	30	30
	VAR00025	30	30	30	30	30	30
	VAR00026	30	30	30	30	30	30
	VAR00027	30	30	30	30	30	30
	VAR00028	30	30	30	30	30	30
	VAR00029	30	30	30	30	30	30
	VAR00030	30	30	30	30	30	30

INDONESIA

Correlations

		VAR00012	VAR00013	VAR00014	VAR00015	VAR00016	VAR00017
Pearson	TOTAL	,500**	,446*	,543**	,345	,464**	,371*
Correlation	VAR00001	-,271	-,104	-,039	-,147	,024	,390*
	VAR00002	,065	-,019	-,299	-,201	,127	,008
	VAR00003	,223	,283	,330	-,070	,223	,092
	VAR00004	-,145	-,157	-,255	-,017	-,149	,302
	VAR00005	,169	,052	,198	-,213	,227	-,005
	VAR00006	-,098	-,042	-,174	-,044	-,096	,339
	VAR00007	,203	,010	,042	-,329	,188	-,125
	VAR00008	,172	,005	,367*	,051	,150	,328
	VAR00009	,356	,293	,613**	,011	,253	,117
	VAR00010	,384*	,109	,224	,365*	,497**	,331
	VAR00011	,063	-,073	,285	-,080	,194	-,102
	VAR00012	1,000	,426*	,441*	,331	,488**	,006
	VAR00013	,426*	1,000	,350	,286	,112	,296
	VAR00014	,441*	,350	1,000	,292	,333	,013
	VAR00015	,331	,286	,292	1,000	,417*	,158
	VAR00016	,488**	,112	,333	,417*	1,000	,140
	VAR00017	,006	,296	,013	,158	,140	1,000
	VAR00018	,007	,358	,140	,228	-,194	,228
	VAR00019	,347	,349	,536**	,120	,250	-,197
	VAR00020	,425*	,392*	,492**	,079	,220	,291
	VAR00021	,361	,450*	,215	,268	,350	,258
	VAR00022	,013	-,244	-,201	,195	-,101	,224
	VAR00023	,306	,321	,420*	,438*	,259	,200
	VAR00024	,404*	,302	,379*	,129	,191	,058
	VAR00025	,371*	,180	,309	,241	,160	,023
	VAR00026	,243	,148	,450*	,117	,188	,003
	VAR00027	,043	,088	,023	,288	,382*	,108
	VAR00028	,446*	,560**	,611**	,416*	,300	-,057
	VAR00029	,373*	,483**	,497**	,547**	,331	,234
	VAR00030	,149	,143	,421*	,140	,095	,136

INDONESIA

Correlations

	VAR00012	VAR00013	VAR00014	VAR00015	VAR00016	VAR00017
Sig. (2-tailed)						
TOTAL	,005	,014	,002	,062	,010	,043
VAR00001	,147	,585	,837	,439	,899	,033
VAR00002	,734	,922	,108	,286	,502	,968
VAR00003	,237	,129	,075	,711	,237	,629
VAR00004	,446	,406	,174	,930	,433	,105
VAR00005	,371	,783	,295	,258	,229	,981
VAR00006	,607	,824	,357	,819	,612	,067
VAR00007	,282	,957	,824	,075	,319	,509
VAR00008	,364	,977	,046	,789	,428	,077
VAR00009	,053	,117	,000	,952	,177	,539
VAR00010	,036	,567	,234	,048	,005	,074
VAR00011	,742	,701	,126	,674	,305	,593
VAR00012	.	,019	,015	,074	,006	,975
VAR00013	,019	.	,058	,126	,554	,112
VAR00014	,015	,058	.	,118	,072	,947
VAR00015	,074	,126	,118	.	,022	,405
VAR00016	,006	,554	,072	,022	.	,461
VAR00017	,975	,112	,947	,405	,461	.
VAR00018	,972	,052	,460	,225	,304	,225
VAR00019	,061	,058	,002	,528	,183	,297
VAR00020	,019	,032	,006	,676	,243	,119
VAR00021	,050	,013	,255	,152	,058	,168
VAR00022	,946	,193	,286	,303	,594	,234
VAR00023	,100	,083	,021	,015	,168	,290
VAR00024	,027	,105	,039	,496	,312	,761
VAR00025	,044	,342	,097	,199	,397	,905
VAR00026	,196	,436	,013	,538	,319	,988
VAR00027	,821	,642	,904	,123	,037	,569
VAR00028	,014	,001	,000	,022	,107	,764
VAR00029	,042	,007	,005	,002	,074	,214
VAR00030	,432	,452	,020	,461	,617	,475

INDONESIA

Correlations

		VAR00018	VAR00019	VAR00020	VAR00021	VAR00022	VAR00023
Pearson	TOTAL	,390*	,399*	,555**	,515**	,061	,555**
Correlation	VAR00001	,287	-,139	,017	,061	,038	,097
	VAR00002	,202	,038	-,151	,201	-,081	-,171
	VAR00003	,192	,325	,452*	,159	-,231	,435*
	VAR00004	,185	-,449*	-,147	-,059	,134	,050
	VAR00005	,109	,392*	,046	,396*	-,176	-,152
	VAR00006	,377*	-,293	-,066	,164	,250	,097
	VAR00007	-,282	-,024	,025	,031	-,014	,016
	VAR00008	,327	,086	,267	,157	,069	-,013
	VAR00009	,181	,347	,332	,178	-,158	,307
	VAR00010	,149	,039	,289	,284	,079	,324
	VAR00011	-,048	,090	-,047	-,121	-,079	,195
	VAR00012	,007	,347	,425*	,361	,013	,306
	VAR00013	,358	,349	,392*	,450*	-,244	,321
	VAR00014	,140	,536**	,492**	,215	-,201	,420*
	VAR00015	,228	,120	,079	,268	,195	,438*
	VAR00016	-,194	,250	,220	,350	-,101	,259
	VAR00017	,228	-,197	,291	,258	,224	,200
	VAR00018	1,000	,192	,234	,323	-,160	,222
	VAR00019	,192	1,000	,517**	,447*	-,277	,273
	VAR00020	,234	,517**	1,000	,517**	,120	,429*
	VAR00021	,323	,447*	,517**	1,000	,209	,082
	VAR00022	-,160	-,277	,120	,209	1,000	,094
	VAR00023	,222	,273	,429*	,082	,094	1,000
	VAR00024	,064	,284	,437*	,000	,084	,749**
	VAR00025	,403*	,220	,505**	,152	-,080	,395*
	VAR00026	,051	,282	,348*	,031	-,108	,411*
	VAR00027	,088	-,064	,005	,002	-,066	,279
	VAR00028	,153	,607**	,428*	,423*	,008	,547**
	VAR00029	,427*	,343	,357	,367*	-,024	,556**
	VAR00030	,103	,202	,105	-,110	-,155	,272

INDONESIA

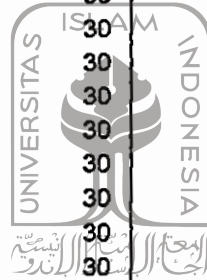
Correlations

	VAR00018	VAR00019	VAR00020	VAR00021	VAR00022	VAR00023
Sig. (2-tailed)						
TOTAL	,033	,029	,001	,004	,750	,001
VAR00001	,124	,464	,931	,748	,842	,609
VAR00002	,285	,842	,427	,287	,670	,365
VAR00003	,309	,080	,012	,400	,219	,016
VAR00004	,327	,013	,437	,759	,481	,793
VAR00005	,565	,032	,809	,030	,353	,422
VAR00006	,040	,117	,728	,387	,183	,609
VAR00007	,131	,899	,895	,869	,939	,934
VAR00008	,078	,653	,154	,407	,716	,947
VAR00009	,339	,060	,073	,346	,404	,099
VAR00010	,433	,839	,121	,128	,678	,081
VAR00011	,802	,636	,806	,524	,677	,301
VAR00012	,972	,061	,019	,050	,946	,100
VAR00013	,052	,058	,032	,013	,193	,083
VAR00014	,460	,002	,006	,255	,286	,021
VAR00015	,225	,528	,676	,152	,303	,015
VAR00016	,304	,183	,243	,058	,594	,168
VAR00017	,225	,297	,119	,168	,234	,290
VAR00018	.	,310	,213	,082	,397	,238
VAR00019	,310	.	,003	,013	,138	,144
VAR00020	,213	,003	.	,003	,528	,018
VAR00021	,082	,013	,003	.	,268	,666
VAR00022	,397	,138	,528	,268	.	,622
VAR00023	,238	,144	,018	,666	,622	.
VAR00024	,736	,128	,016	,000	,660	,000
VAR00025	,027	,243	,004	,422	,675	,031
VAR00026	,790	,131	,059	,869	,572	,024
VAR00027	,644	,737	,980	,992	,730	,136
VAR00028	,420	,000	,018	,020	,969	,002
VAR00029	,019	,063	,053	,046	,899	,001
VAR00030	,589	,283	,580	,564	,414	,146

INDONESIA

Correlations

		VAR00018	VAR00019	VAR00020	VAR00021	VAR00022	VAR00023
N	TOTAL	30	30	30	30	30	30
	VAR00001	30	30	30	30	30	30
	VAR00002	30	30	30	30	30	30
	VAR00003	30	30	30	30	30	30
	VAR00004	30	30	30	30	30	30
	VAR00005	30	30	30	30	30	30
	VAR00006	30	30	30	30	30	30
	VAR00007	30	30	30	30	30	30
	VAR00008	30	30	30	30	30	30
	VAR00009	30	30	30	30	30	30
	VAR00010	30	30	30	30	30	30
	VAR00011	30	30	30	30	30	30
	VAR00012	30	30	30	30	30	30
	VAR00013	30	30	30	30	30	30
	VAR00014	30	30	30	30	30	30
	VAR00015	30	30	30	30	30	30
	VAR00016	30	30	30	30	30	30
	VAR00017	30	30	30	30	30	30
	VAR00018	30	30	30	30	30	30
	VAR00019	30	30	30	30	30	30
	VAR00020	30	30	30	30	30	30
	VAR00021	30	30	30	30	30	30
	VAR00022	30	30	30	30	30	30
	VAR00023	30	30	30	30	30	30
	VAR00024	30	30	30	30	30	30
	VAR00025	30	30	30	30	30	30
	VAR00026	30	30	30	30	30	30
	VAR00027	30	30	30	30	30	30
	VAR00028	30	30	30	30	30	30
	VAR00029	30	30	30	30	30	30
	VAR00030	30	30	30	30	30	30



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

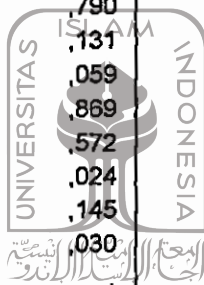
Correlations

		VAR00024	VAR00025	VAR00026	VAR00027	VAR00028
Pearson	TOTAL	,482**	,528**	,639**	,475**	,542**
Correlation	VAR00001	,060	,194	,351	,267	-,115
	VAR00002	-,105	,100	-,021	,320	-,080
	VAR00003	,405*	,326	,598**	,153	,359
	VAR00004	,061	,048	-,130	-,078	-,245
	VAR00005	-,031	,045	,174	,092	,111
	VAR00006	,053	,206	,110	,261	-,236
	VAR00007	,195	,070	,367*	,411*	,023
	VAR00008	,000	,136	,359	-,037	,100
	VAR00009	,377*	,249	,709**	,221	,450*
	VAR00010	,154	,506**	,552**	,537**	,078
	VAR00011	,187	,114	,491**	,542**	,107
	VAR00012	,404*	,371*	,243	,043	,446*
	VAR00013	,302	,180	,148	,088	,560**
	VAR00014	,379*	,309	,450*	,023	,611**
	VAR00015	,129	,241	,117	,288	,416*
	VAR00016	,191	,160	,188	,382*	,300
	VAR00017	,058	,023	,003	,108	-,057
	VAR00018	,064	,403*	,051	,088	,153
	VAR00019	,284	,220	,282*	-,064	,607**
	VAR00020	,437*	,505**	,348	,005	,428*
	VAR00021	,000	,152	,031	,002	,423*
	VAR00022	,084	-,080	-,108	,066	,008
	VAR00023	,749**	,395*	,411*	,279	,547**
	VAR00024	1,000	,354	,272	,211	,531**
	VAR00025	,354	1,000	,397*	,342	,151
	VAR00026	,272	,397*	1,000	,411*	,390*
	VAR00027	,211	,342	,411*	1,000	,080
	VAR00028	,531**	,151	,390*	,080	1,000
	VAR00029	,456*	,434*	,517**	,426*	,634**
	VAR00030	,197	,273	,538**	,358	,285

INDONESIA

Correlations

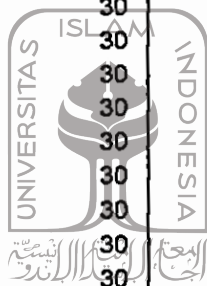
		VAR00024	VAR00025	VAR00026	VAR00027	VAR00028
Sig. (2-tailed)	TOTAL	,007	,003	,000	,008	,002
	VAR00001	,754	,304	,057	,153	,544
	VAR00002	,579	,598	,913	,084	,673
	VAR00003	,026	,079	,000	,421	,051
	VAR00004	,747	,800	,492	,682	,191
	VAR00005	,870	,811	,358	,629	,560
	VAR00006	,780	,276	,562	,163	,209
	VAR00007	,303	,714	,046	,024	,905
	VAR00008	1,000	,474	,051	,844	,597
	VAR00009	,040	,185	,000	,240	,013
	VAR00010	,416	,004	,002	,002	,680
	VAR00011	,323	,550	,006	,002	,575
	VAR00012	,027	,044	,196	,821	,014
	VAR00013	,105	,342	,436	,642	,001
	VAR00014	,039	,097	,013	,904	,000
	VAR00015	,496	,199	,538	,123	,022
	VAR00016	,312	,397	,319	,037	,107
	VAR00017	,761	,905	,988	,569	,764
	VAR00018	,736	,027	,790	,644	,420
	VAR00019	,128	,243	,131	,737	,000
	VAR00020	,016	,004	,059	,980	,018
	VAR00021	1,000	,422	,869	,992	,020
	VAR00022	,660	,675	,572	,730	,969
	VAR00023	,000	,031	,024	,136	,002
	VAR00024	.	,055	,145	,263	,003
	VAR00025	,055	.	,030	,064	,426
	VAR00026	,145	,030	.	,024	,033
	VAR00027	,263	,064	,024	.	,673
	VAR00028	,003	,426	,033	,673	.
	VAR00029	,011	,017	,003	,019	,000
	VAR00030	,297	,144	,002	,052	,128



INDONESIA

Correlations

		VAR00024	VAR00025	VAR00026	VAR00027	VAR00028
N	TOTAL	30	30	30	30	30
	VAR00001	30	30	30	30	30
	VAR00002	30	30	30	30	30
	VAR00003	30	30	30	30	30
	VAR00004	30	30	30	30	30
	VAR00005	30	30	30	30	30
	VAR00006	30	30	30	30	30
	VAR00007	30	30	30	30	30
	VAR00008	30	30	30	30	30
	VAR00009	30	30	30	30	30
	VAR00010	30	30	30	30	30
	VAR00011	30	30	30	30	30
	VAR00012	30	30	30	30	30
	VAR00013	30	30	30	30	30
	VAR00014	30	30	30	30	30
	VAR00015	30	30	30	30	30
	VAR00016	30	30	30	30	30
	VAR00017	30	30	30	30	30
	VAR00018	30	30	30	30	30
	VAR00019	30	30	30	30	30
	VAR00020	30	30	30	30	30
	VAR00021	30	30	30	30	30
	VAR00022	30	30	30	30	30
	VAR00023	30	30	30	30	30
	VAR00024	30	30	30	30	30
	VAR00025	30	30	30	30	30
	VAR00026	30	30	30	30	30
	VAR00027	30	30	30	30	30
	VAR00028	30	30	30	30	30
	VAR00029	30	30	30	30	30
	VAR00030	30	30	30	30	30



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Correlations

		VAR00029	VAR00030
Pearson	TOTAL	,783**	,565**
Correlation	VAR00001	,311	,247
	VAR00002	,030	,116
	VAR00003	,426*	,355
	VAR00004	,071	-,034
	VAR00005	,307	,422*
	VAR00006	,230	,303
	VAR00007	,112	,363*
	VAR00008	,215	,354
	VAR00009	,533**	,588**
	VAR00010	,460*	,349
	VAR00011	,200	,534**
	VAR00012	,373*	,149
	VAR00013	,483**	,143
	VAR00014	,497**	,421*
	VAR00015	,547**	,140
	VAR00016	,331	,095
	VAR00017	,234	,136
	VAR00018	,427*	,103
	VAR00019	,343	,202
	VAR00020	,357	,105
	VAR00021	,367*	-,110
	VAR00022	-,024	-,155
	VAR00023	,556**	,272
	VAR00024	,456*	,197
	VAR00025	,434*	,273
	VAR00026	,517**	,538**
	VAR00027	,426*	,358
	VAR00028	,634**	,285
	VAR00029	1,000	,500*
	VAR00030	,500**	1,000



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Correlations

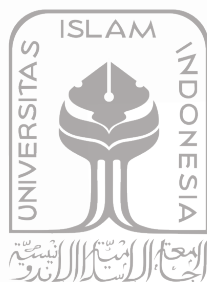
Sig. (2-tailed)	TOTAL	VAR00029	VAR00030
	TOTAL	,000	,001
	VAR00001	,095	,187
	VAR00002	,873	,543
	VAR00003	,019	,054
	VAR00004	,709	,860
	VAR00005	,099	,020
	VAR00006	,221	,104
	VAR00007	,554	,049
	VAR00008	,253	,055
	VAR00009	,002	,001
	VAR00010	,011	,059
	VAR00011	,289	,002
	VAR00012	,042	,432
	VAR00013	,007	,452
	VAR00014	,005	,020
	VAR00015	,002	,461
	VAR00016	,074	,617
	VAR00017	,214	,475
	VAR00018	,019	,589
	VAR00019	,063	,283
	VAR00020	,053	,580
	VAR00021	,046	,564
	VAR00022	,899	,414
	VAR00023	,001	,146
	VAR00024	,011	,297
	VAR00025	,017	,144
	VAR00026	,003	,002
	VAR00027	,019	,052
	VAR00028	,000	,128
	VAR00029	.	,005
	VAR00030	,005	.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Correlations

		VAR00029	VAR00030
N	TOTAL	30	30
	VAR00001	30	30
	VAR00002	30	30
	VAR00003	30	30
	VAR00004	30	30
	VAR00005	30	30
	VAR00006	30	30
	VAR00007	30	30
	VAR00008	30	30
	VAR00009	30	30
	VAR00010	30	30
	VAR00011	30	30
	VAR00012	30	30
	VAR00013	30	30
	VAR00014	30	30
	VAR00015	30	30
	VAR00016	30	30
	VAR00017	30	30
	VAR00018	30	30
	VAR00019	30	30
	VAR00020	30	30
	VAR00021	30	30
	VAR00022	30	30
	VAR00023	30	30
	VAR00024	30	30
	VAR00025	30	30
	VAR00026	30	30
	VAR00027	30	30
	VAR00028	30	30
	VAR00029	30	30
	VAR00030	30	30



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		X1	X2
Pearson Correlation	X1	1,000	,715**
	X2	,715**	1,000
Sig. (2-tailed)	X1	,	,000
	X2	,000	,
N	X1	30	30
	X2	30	30

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

SHAZAM - IBM-PC VERSION SITE NO. 13- 0

FOR USE ONLY BY: Faculty, Students, and Staff
AT: University of Michigan

If this does not describe you then you have stolen this copy
and if you type anything except STOP or HELP SHAZAM you agree
to send payment to SHAZAM within 7 days for a software license

(c) SHAZAM 6.1 *** for assistance type HELP or DEMO or MENU

SITE LICENSE - FOR USE ON ALL COMPUTERS AT ABOVE LOCATION

Hello/Bonjour -

Welcome to SHAZAM - Version 6.1 - DEC 1988 SYSTEM=IBM-PC PAR= 234

|_ SAMPLE 1 30
|_ READ X1 X2 X3
|_ 3 VARIABLES AND 30 OBSERVATIONS STARTING AT OBS 1

|_ GENR T=TIME(0)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

|_OLS X1 T/LIST GF

REQUIRED MEMORY IS PAR= 3 CURRENT PAR= 234
 OLS ESTIMATION

30 OBSERVATIONS DEPENDENT VARIABLE = X1
 ...NOTE..SAMPLE RANGE SET TO: 1, 30

R-SQUARE = 0.0095 R-SQUARE ADJUSTED = -0.0259
 VARIANCE OF THE ESTIMATE = 25.731
 STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE = 5.0726
 MEAN OF DEPENDENT VARIABLE = 45.433
 LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -90.2488

MODEL SELECTION TESTS - SEE JUDGE ET AL. (1985, P.242)
 AKAIKE (1969) FINAL PREDICTION ERROR- FPE = 27.446
 (FPE ALSO KNOWN AS AMEMIYA PREDICTION CRITERION -PC)
 AKAIKE (1973) INFORMATION CRITERION- AIC = 3.3120
 SCHWARZ (1978) CRITERION-SC = 3.4055

VARIABLE	ESTIMATED	STANDARD	T-RATIO	PARTIAL	STANDARDIZED
ELASTICITY					
NAME	COEFFICIENT	ERROR	28 DF	CORR.	COEFFICIENT AT MEANS

T	-0.55395E-01	0.10700	-0.51771		-0.0974 -0.97374E-01 -
0.18898E-01					
CONSTANT	46.292	1.8995	24.370	0.9772	0.00000E+00 1.0189

CBS.	OBSERVED	PREDICTED	CALCULATED		
NO.	VALUE	VALUE	RESIDUAL		
1	52.000	46.237	5.7634		I
2	47.000	46.181	0.81884		I*
3	51.000	46.126	4.8742		I *
4	46.000	46.070	-0.70374E-01		*
5	46.000	46.015	-0.14980E-01		*
6	48.000	45.960	2.0404		I *
7	49.000	45.904	3.0958		I *
8	50.000	45.849	4.1512		I *
9	45.000	45.793	-0.79340		*I
10	43.000	45.738	-2.7380		* I
11	41.000	45.683	-4.6826		* I
12	30.000	45.627	-15.627	*	I
13	46.000	45.572	0.42818		*
14	42.000	45.516	-3.5164		* I
15	44.000	45.461	-1.4610		*I
16	42.000	45.406	-3.4056		* I
17	41.000	45.350	-4.3502	*	I
18	49.000	45.295	3.7052		I *
19	48.000	45.239	2.7605		I *
20	51.000	45.184	5.8159		I *
21	47.000	45.129	1.8713		I *
22	43.000	45.073	-2.0733		* I
23	42.000	45.018	-3.0179		* I
24	40.000	44.962	-4.9625	*	I
25	47.000	44.907	2.0929		I *
26	38.000	44.852	-6.8517	*	I
27	53.000	44.796	8.2037		I *
28	42.000	44.741	-2.7409	*	I
29	46.000	44.686	1.3145		I*
30	54.000	44.630	9.3699		I *

URBIN-WATSON = 1.6299 VON NEUMAN RATIO = 1.6861 RHO = 0.11508
RESIDUAL SUM = -0.12257E-12 RESIDUAL VARIANCE = 25.731
SUM OF ABSOLUTE ERRORS= 112.61
-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED = 0.0095
RUNS TEST: 13 RUNS, 15 POSITIVE, 15 NEGATIVE, NORMAL STATISTIC = -
.1148
COEFFICIENT OF SKEWNESS = -0.7550 WITH STANDARD DEVIATION OF 0.4269
COEFFICIENT OF EXCESS KURTOSIS = 2.1286 WITH STANDARD DEVIATION OF 0.8327

GOODNESS OF FIT TEST FOR NORMALITY OF RESIDUALS - 6 GROUPS
OBSERVED 1.0 1.0 13.0 11.0 4.0 0.0
EXPECTED 0.7 4.1 10.2 10.2 4.1 0.7
CHI-SQUARE = 3.9548 WITH 2 DEGREES OF FREEDOM



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

|_OLS X2 T/LIST GF

REQUIRED MEMORY IS PAR= 3 CURRENT PAR= 234

OLS ESTIMATION

30 OBSERVATIONS DEPENDENT VARIABLE = X2

...NOTE..SAMPLE RANGE SET TO: 1, 30

R-SQUARE = 0.2017 R-SQUARE ADJUSTED = 0.1732

VARIANCE OF THE ESTIMATE = 13.020

STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE = 3.6083

MEAN OF DEPENDENT VARIABLE = 33.667

LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -80.0303

MODEL SELECTION TESTS - SEE JUDGE ET.AL.(1985, P.242)

AKAIKE (1969) FINAL PREDICTION ERROR- FPE = 13.888

(FPE ALSO KNOWN AS AMEMIYA PREDICTION CRITERION -PC)

AKAIKE (1973) INFORMATION CRITERION- AIC = 2.6308

SCHWARZ(1978) CRITERION-SC = 2.7242

VARIABLE	ESTIMATED	STANDARD	T-RATIO	PARTIAL	STANDARDIZED
ELASTICITY					
NAME	COEFFICIENT	ERROR	28 DF CORR.	COEFFICIENT	AT MEANS
T	0.20245	0.76112E-01	2.6599	0.4491	0.44912
0.93206E-01					
CONSTANT	30.529	1.3512	22.594	0.00000E+00	0.90679

OBS. NO.	OBSERVED VALUE	PREDICTED VALUE	CALCULATED RESIDUAL			
1	28.000	30.731	-2.7312	*	I	
2	26.000	30.934	-4.9336	*	I	
3	34.000	31.136	2.8639		I	*
4	32.000	31.339	0.66148		I*	
5	33.000	31.541	1.4590		I	*
6	28.000	31.743	-3.7434	*	I	
7	37.000	31.946	5.0541		I	*
8	35.000	32.148	2.8517		I	*
9	33.000	32.351	0.64924		I*	
10	29.000	32.553	-3.5532	*	I	
11	36.000	32.756	3.2443		I	*
12	22.000	32.958	-10.958	*	I	
13	36.000	33.161	2.8395		I	*
14	30.000	33.363	-3.3630	*	I	
15	40.000	33.565	6.4346		I	*
16	34.000	33.768	0.23211		*	
17	39.000	33.970	5.0297		I	*
18	35.000	34.173	0.82722		I*	
19	37.000	34.375	2.6248		I	*
20	36.000	34.578	1.4223		I	*
21	37.000	34.780	2.2199		I	*
22	34.000	34.983	-0.98257	*	I	
23	35.000	35.185	-0.18502	*	*	
24	35.000	35.387	-0.38747	*	I	
25	31.000	35.590	-4.5899	*	I	
26	34.000	35.792	-1.7924	*	I	
27	37.000	35.995	1.0052		I*	
28	35.000	36.197	-1.1973	*	I	
29	35.000	36.400	-1.3997	*	I	
30	37.000	36.602	0.39785		I*	

DURBIN-WATSON = 2.5032 VON NEUMAN RATIO = 2.5895 RHO = -0.26215
RESIDUAL SUM = 0.75495E-14 RESIDUAL VARIANCE = 13.020
SUM OF ABSOLUTE ERRORS= 79.634
R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED = 0.2017
RUNS TEST: 14 RUNS, 17 POSITIVE, 13 NEGATIVE, NORMAL STATISTIC = -
0.6562
COEFFICIENT OF SKEWNESS = -0.8587 WITH STANDARD DEVIATION OF 0.4269
COEFFICIENT OF EXCESS KURTOSIS = 1.8730 WITH STANDARD DEVIATION OF 0.8327

GOODNESS OF FIT TEST FOR NORMALITY OF RESIDUALS - 6 GROUPS
OBSERVED 1.0 3.0 9.0 14.0 3.0 0.0
EXPECTED 0.7 4.1 10.2 10.2 4.1 0.7
CHI-SQUARE = 2.9304 WITH 2 DEGREES OF FREEDOM



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

OLS X3 T/LIST GF

REQUIRED MEMORY IS PAR= 3 CURRENT PAR= 234

OLS ESTIMATION

30 OBSERVATIONS DEPENDENT VARIABLE = X3
 ...NOTE..SAMPLE RANGE SET TO: 1, 30
 R-SQUARE = 0.0017 R-SQUARE ADJUSTED = -0.0340
 VARIANCE OF THE ESTIMATE = 15.594
 STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE = 3.9489
 MEAN OF DEPENDENT VARIABLE = 36.567
 LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -82.7367

MODEL SELECTION TESTS - SEE JUDGE ET.AL.(1985, P.242)
 AKAIKE (1969) FINAL PREDICTION ERROR- FPE = 16.634
 (FPE ALSO KNOWN AS AMEMIYA PREDICTION CRITERION -PC)
 AKAIKE (1973) INFORMATION CRITERION- AIC = 2.8112
 SCHWARZ(1978) CRITERION-SC = 2.9047

VARIABLE	ESTIMATED	STANDARD	T-RATIO	PARTIAL	STANDARDIZED
ELASTICITY					
NAME	COEFFICIENT	ERROR	28 DF	CORR.	COEFFICIENT AT MEANS

T	-0.18020E-01	0.83297E-01	-0.21633		-0.0408 -0.40849E-01 -
0.76384E-02					
CONSTANT	36.846	1.4788	24.917	0.9782	0.00000E+00 1.0076

OBS. NO.	OBSERVED VALUE	PREDICTED VALUE	CALCULATED RESIDUAL		
1	35.000	36.828	-1.8280		* I
2	35.000	36.810	-1.8099		* I
3	40.000	36.792	3.2081		I *
4	34.000	36.774	-2.7739		* I
5	39.000	36.756	2.2441		I *
6	39.000	36.738	2.2621		I *
7	41.000	36.720	4.2802		I *
8	37.000	36.702	0.29818		*
9	36.000	36.684	-0.68380		* I
10	34.000	36.666	-2.6658		* I
11	39.000	36.648	2.3522		I *
12	27.000	36.630	-9.6297	*	I
13	39.000	36.612	2.3883		I *
14	35.000	36.594	-1.5937		* I
15	42.000	36.576	5.4243		I *
16	30.000	36.558	-6.5577	*	I
17	40.000	36.540	3.4604		I *
18	37.000	36.522	0.47838		I*
19	39.000	36.504	2.4964		I *
20	40.000	36.486	3.5144		I *
21	38.000	36.468	1.5324		I *
22	35.000	36.450	-1.4495		* I
23	35.000	36.432	-1.4315		* I
24	35.000	36.413	-1.4135		* I
25	35.000	36.395	-1.3955		* I
26	27.000	36.377	-9.3775	*	I
27	42.000	36.359	5.6406		I *
28	35.000	36.341	-1.3414		* I
29	35.000	36.323	-1.3234		* I
30	42.000	36.305	5.6946		I *

DURBIN-WATSON = 2.6275 VON NEUMAN RATIO = 2.7181 RHO = -0.38317
RESIDUAL SUM = 0.23093E-13 RESIDUAL VARIANCE = 15.594
SUM OF ABSOLUTE ERRORS= 90.549
R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED = 0.0017
RUNS TEST: 16 RUNS, 15 POSITIVE, 15 NEGATIVE, NORMAL STATISTIC =
0.0000
COEFFICIENT OF SKEWNESS = -0.8118 WITH STANDARD DEVIATION OF 0.4269
COEFFICIENT OF EXCESS KURTOSIS = 0.8106 WITH STANDARD DEVIATION OF 0.8327

GOODNESS OF FIT TEST FOR NORMALITY OF RESIDUALS - 6 GROUPS

OBSERVED 2.0 1.0 12.0 11.0 4.0 0.0
EXPECTED 0.7 4.1 10.2 10.2 4.1 0.7
CHI-SQUARE = 5.8991 WITH 2 DEGREES OF FREEDOM
|_STOP



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Group Statistics

Tokoh Wilayah sampel	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
KOMITOR Jogjakarta	15	45.3333	5.3140	1.3721
KOMITOR Jakarta	15	45.5333	4.8678	1.2569
KOMITUM Jogjakarta	15	31.9333	4.7580	1.2285
KOMITUM Jakarta	15	35.4000	1.8822	.4860
SIKAPGEI Jogjakarta	15	36.8000	3.7455	.9671
SIKAPGEI Jakarta	15	36.3333	4.1346	1.0676



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Mean	
									Lower	Upper
KOMITOR	Equal variances assumed	.185	.670	-.107	28	.915	-.2000	1.8607	-4.0115	3.6115
	Equal variances not assumed			-.107	27.787	.915	-.2000	1.8607	-4.0128	3.6128
KOMITUM	Equal variances assumed	10.212	.003	-2.624	28	.014	-3.4667	1.3211	-6.1729	-.7604
	Equal variances not assumed			-2.624	18.277	.017	-3.4667	1.3211	-6.2393	-.6941
SIKAPGEI	Equal variances assumed	.098	.756	.324	28	.748	.4667	1.4405	-2.4840	3.4173
	Equal variances not assumed			.324	27.731	.748	.4667	1.4405	-2.4853	3.4186



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA